



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN KEMISKINAN MASYARAKAT LOKAL  
STUDI KASUS DI KELURAHAN SUMURBATU  
KECAMATAN BANTARGEBAK KOTA BEKASI**

**TESIS**

**FUTIA FARIDA HASANAH**

**0706299605**

**FAKULTAS EKONOMI**

**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**JAKARTA**

**JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN KEMISKINAN MASYARAKAT LOKAL  
STUDI KASUS DI KELURAHAN SUMURBATU  
KECAMATAN BANTARGEBAH KOTA BEKASI**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 2 (dua) pada  
Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Universitas Indonesia**

**FUTIA FARIDA HASANAH  
0706299605**

**FAKULTAS EKONOMI  
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

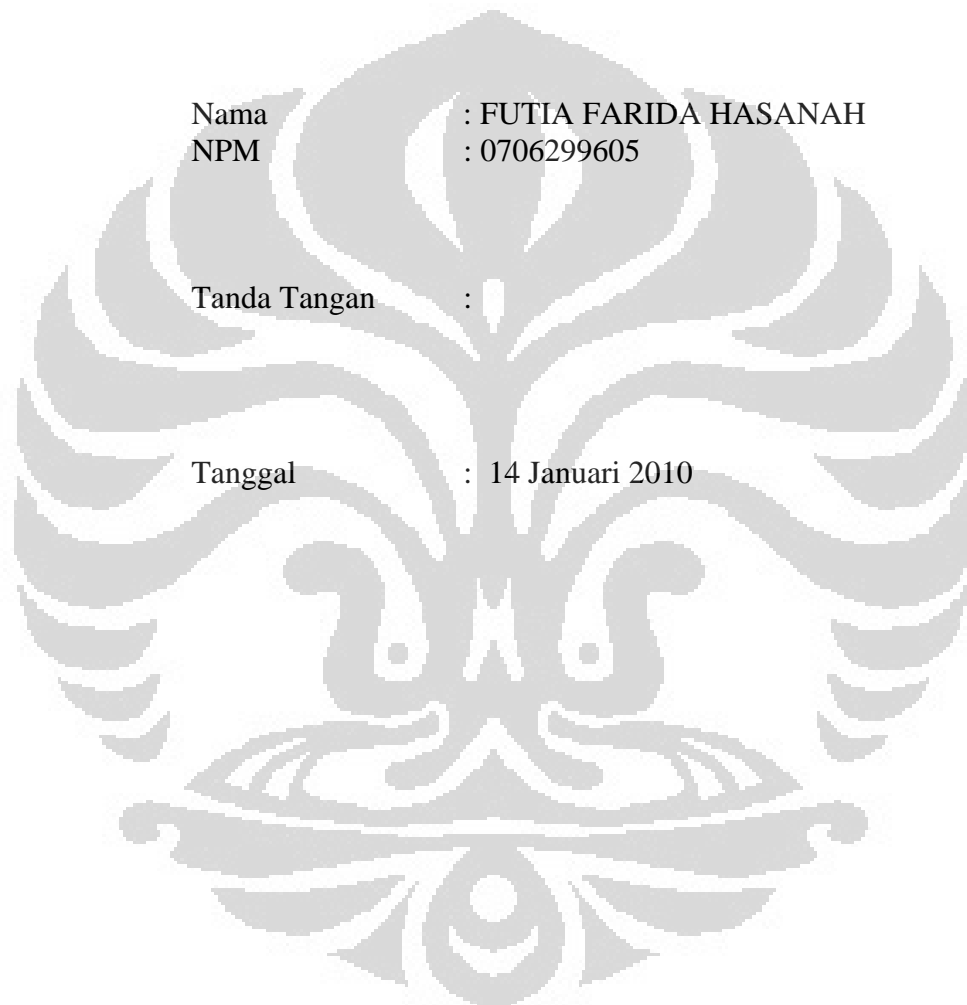
## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FUTIA FARIDA HASANAH  
NPM : 0706299605

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Januari 2010



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Futia Farida Hasanah  
NPM : 0706299605  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : **KAJIAN KEMISKINAN MASYARAKAT  
LOKAL (SUATU STUDI KASUS DI  
KELURAHAN SUMURBATU KECAMATAN  
BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI**

**Telah Berhasil Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Budi Sulistyowati, MA (.....)

Penguji : Darlis Rabai, SE.,MA. (.....)

Penguji : Iman Rozani, SE, M.Sos.Sc (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karuniaNya, tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar strata 2 (dua) pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Budi Sulistyowati, MA, selaku pembimbing yang benar-benar telah memberikan banyak waktu serta pikirannya untuk membantu penulis merampungkan tesis ini.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), instansi tempat penulis bekerja yang telah memberikan kepercayaan berupa beasiswa untuk menjalani pendidikan strata dua (S2) di MPKP-FEUI.
3. Ibu Hj. Sumiyati selaku Lurah Sumurbatu beserta seluruh aparat kelurahan yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.
4. Serta seluruh warga Kelurahan Sumurbatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan studi dan penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tua dan mertua penulis yang selalu memberikan dukungan berupa dorongan semangat dan doanya selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Suami dan anak-anakku tersayang yang telah rela untuk mengorbankan waktu-waktu kebersamaan dan memberikan dukungan yang luar biasa selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga atas segala bantuannya. Akhir kata, semoga kelebihan dan kekurangan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih

Jakarta, 14 Januari 2010

Penulis



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Futia Farida Hasanah  
NPM : 0706299605  
Program Studi : MSP Penanggulangan Kemiskinan  
Departemen : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KAJIAN KEMISKINAN MASYARAKAT LOKAL (SUATU STUDI KASUS DI  
KELURAHAN SUMURBATU KECAMATAN BANTARGEBAWANG KOTA  
BEKASI)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediaformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Januari 2010

Yang Menyatakan

Futia Farida Hasanah

## ABSTRAK

Nama : Futia Farida Hasanah  
Program Studi : MPKP  
Judul : Kajian Kemiskinan Masyarakat Lokal (Suatu Studi Kasus di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi)

Tesis ini mencoba mengkaji dan memahami kemiskinan masyarakat lokal di Kelurahan Sumurbatu. Perubahan struktural yang terjadi akibat pembangunan Kota Bekasi telah menyebabkan masyarakat lokal di wilayah ini mengalami marginalisasi dan ketidakberdayaan. Secara internal disebabkan ketidakmampuan masyarakat lokal sendiri dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan secara eksternal disebabkan oleh pilihan-pilihan strategi pembangunan yang tidak berpihak kepada orang miskin dan masyarakat lokal.

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode *PRA (Participatory Rural Appraisal)*. Atas dasar kajian yang dilakukan, disusun suatu skenario rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengentaskan masalah yang terjadi di masyarakat lokal

Kata Kunci : Masyarakat lokal, marginalisasi, perubahan struktural, PRA  
Pemberdayaan, rencana aksi



## *ABSTRACT*

Name : Futia Farida Hasanah  
Study Programe : MPKP  
Title : Local Community Poverty Examination (A Case Study in Sumurbatu Village Bantargebang District Bekasi Municipality)

This tesis tries to examine and understand the local community poverty in Sumurbatu Village. Structural changes as a consequences of the development in Bekasi have caused the marginalization and powerless condition on local community. Internally, because of local community incapability to adapt with those changes and externally, because of the options of development strategies that unfortunately do not take side with the poor and local community.

The data were collected through Participatory Rural Appraisal. And base on this examination, an action plan scenario of community empowerment were arranged to eradicate problem on the local community.

Key Words: local community, marginalization, tructural changes, PRA empowerment, action plan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Perkembangan Kota Bekasi dan Permasalahannya	1
1.1.2. Kemiskinan di Kota Bekasi	3
1.1.3. Stagnasi Sektor Pertanian di Kota Bekasi dan hubungannya dengan Kemiskinan	4
1.1.4. Kelurahan Sumurbatu di antara Lahan Pertanian dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	6
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kerangka Pemikiran	9
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	15
1.7. Manfaat Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan	16
2. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Definisi dan Tujuan Pembangunan	18
2.2. Perubahan Struktural Kota dan Marginalisasi Penduduk Lokal	23

2.3. Kemiskinan dan Hubungannya dengan Marginalisasi Penduduk Lokal	27
2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Modal Sosial Masyarakat	34
3. SASARAN DAN METODE PENELITIAN	39
3.1. Sasaran Penelitian	39
3.2. Metode Penelitian	39
3.2.1. Pendekatan Kualitatif	40
3.2.1.1. Kegiatan Pra Survey	40
3.2.1.2. Wawancara Mendalam	41
3.2.2. <i>Participatory Rural Appraisal</i>	41
3.2.3. Analisis Data	45
3.2.4. Keabsahan Data	45
3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian	46
4. HASIL PENELITIAN	47
4.1. Gambaran Umum	47
4.1.1. Administrasi Wilayah	47
4.1.2. Struktur Pemerintahan	47
4.1.3. Kondisi Geografis Wilayah	48
4.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana	49
4.1.5. Kondisi Demografis	51
4.1.5.1. Kemasyarakatan	52
4.1.5.2. Agama	53
4.1.5.3. Pendidikan	54
4.1.5.4. Kesehatan	55
4.1.5.5. Mata Pencaharian Masyarakat	56
4.2. Sejarah Daerah	58
4.3. Dinamika Kehidupan Masyarakat Saat Ini	62
4.3.1. Pendidikan dan Kesehatan	62
4.3.2. Perekonomian masyarakat	65
4.3.3. Potensi Pertanian sebagai Mata Pencaharian dan Permasalahannya	67
4.3.4. Sosial kemasyarakatan	73

4.3.5. Dampak Modernisasi	74
4.4. Kelembagaan di Masyarakat	77
4.4.1. Peran Lembaga yang Ada di Masyarakat	79
4.4.1.1. Aparat Kelurahan	79
4.4.1.2. Pengurus RT/RW	81
4.4.1.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	81
4.4.1.4. Madrasah Informal	84
4.4.1.5. SD dan SMP	84
4.4.1.6. Puskesmas	84
4.4.1.7. Kelompok Tani	85
4.4.1.8. Penyuluh Pertanian Lapangan	85
4.4.1.9. Karang Taruna	86
4.4.1.10. TPA Sampah	87
4.4.1.11. Kelompok Pengajian	88
4.4.1.12. PKK dan Posyandu	89
4.4.1.13. Badan Keswadayaan Masyarakat	89
4.4.1.14. Sekolah Alam Tunas Mulia	90
4.4.2. Modal Sosial Masyarakat	93
5. Identifikasi Masalah dan Analisa <i>SWOT</i>	95
5.1. Identifikasi Permasalahan Umum	95
5.2. Analisa <i>SWOT</i>	96
5.2.1. <i>Strength</i>	97
5.2.2. <i>Weakness</i>	98
5.2.3. <i>Opportunity</i>	98
5.2.4. <i>Threats</i>	99
5.3. Identifikasi Akar Masalah	100
5.4. Penentuan Prioritas Masalah	104
6. Skenario <i>Action Plan</i>	106
6.1. Bentuk Kegiatan Skenario <i>Action Plan</i>	107
6.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	108

6.2.1. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	108
6.2.2. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam untuk Petani	110
6.2.3. Pemberdayaan Kelompok Pengajian sebagai Sarana Pendukung	111
6.2. Tahapan Pelaksanaan	112
6.3. Pengelolaan Program	114
6.4. Tindak Lanjut Program	114
DAFTAR REFERENSI	115
LAMPIRAN	118



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Teknik-teknik PRA	43
Tabel 4.1.	Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumurbatu	50
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Bantargebang tahun 2007	51
Tabel 4.3.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sumurbatu	54
Tabel 4.4.	Lapangan Pekerjaan Penduduk Kelurahan Sumurbatu	57
Tabel 4.5.	Peruntukan Tanah di Kelurahan Sumurbatu	58
Tabel 4.6.	Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Bantargebang	65
Tabel 4.7.	Jumlah RTS penerima raskin di Kelurahan Sumurbatu per RW	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Pemikiran	13
Gambar 2.1.	Lingkaran Setan Kemiskinan dari sisi Permintaan	30
Gambar 2.2.	Lingkaran Setan Kemiskinan dari sisi Penawaran	31
Gambar 2.3.	Akar Penyebab Kemiskinan menurut P2KP	32
Gambar 2.4.	Relasi antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	36
Gambar 4.1.	Peta Desa	68
Gambar 4.2.	Bagan Alur Pemasaran Beras	69
Gambar 4.3.	Bagan Alur Pemasaran Tanaman Hias	69
Gambar 4.4.	Bagan Alur Pemasaran Bebek dan Telur Bebek	70
Gambar 4.5.	Bagan Alur Pemasaran Sayuran	70
Gambar 4.6.	Diagram Venn Hubungan Kelembagaan	79
Gambar 5.1.	Diagram Tulang Ikan Pencarian Akar Masalah	103
Gambar 6.1.	Skema Pemberdayaan Masyarakat	108

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Tabel Perkembangan Jumlah dan Persentase keluarga miskin (pra sejahtera dan sejahtera I) di Kota Bekasi tahun 2000 s.d 2007	118
LAMPIRAN 2. Tabel Perbandingan Hasil Rekapitulasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) hasil pendataan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dengan RTS hasil pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 menurut kecamatan di Kota Bekasi	119
LAMPIRAN 3. Tabel Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi	120
LAMPIRAN 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	121
LAMPIRAN 5. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Bantargebang, Tahun 2007	123
LAMPIRAN 6. Kalender Musim Pertanian	124
LAMPIRAN 7. Matriks Identifikasi SWOT	125
LAMPIRAN 8. Dokumentasi Foto	130



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Perkembangan Kota Bekasi dan Permasalahannya**

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Barat yang mengalami perkembangan cukup pesat. Letaknya sangat strategis di perbatasan Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi DKI Jakarta. Bekasi dikembangkan pertama kali menjadi penyangga Jakarta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976. Inpres tersebut menempatkan Bekasi sebagai kota satelit Jakarta dan menjadi bagian kawasan pengembangan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (jabotabek).

Sebagai penyangga Jakarta, Kota Bekasi telah mengalami perubahan struktur tata ruang yang ditandai oleh alih fungsi lahan yang semula didominasi wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman, industri, jasa dan perdagangan. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan berkembangnya jaringan transportasi dan fasilitas pelayanan publik. Perubahan struktur sosial ekonomi juga terjadi ditandai dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan investasi di sektor industri, jasa dan perdagangan, serta perubahan sosial budaya agraris menjadi budaya industri dan bisnis.

Sementara dari struktur administrasi, Kota Bekasi (awalnya kecamatan Bekasi) juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Kabupaten Bekasi terbentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk kecamatan Bekasi) dan 95 desa. Pesatnya perkembangan kecamatan Bekasi menuntut pemekarannya menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yang seluruhnya meliputi 18 kelurahan dan 8 desa. Status Kotif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 yang pada awalnya terdiri dari 10 kecamatan tetapi mulai tahun 2004 menjadi 12 kecamatan. Salah satu yang mengalami pemekaran adalah kecamatan Bantar gebang yang dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pesatnya perkembangan dan perubahan struktural yang terjadi ternyata tidak serta merta membawa peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Kota Bekasi saat ini menghadapi berbagai permasalahan akibat laju pertumbuhan penduduk yang menurut sensus penduduk tahun 2000, mencapai 3,49 persen. Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi lebih banyak disebabkan karena adanya migrasi. Penyebab tingginya migrasi tidak lain adalah berkembangnya Kota Bekasi menjadi pusat ekonomi dan pusat bisnis. Ini disebabkan letak Kota Bekasi yang berada di jalur ekonomi yang dinamis, yakni antara Jakarta dan Jawa Barat. Selain itu, Kota Bekasi berkembang pesat karena terimbas perkembangan Jakarta yang sudah mencapai titik jenuh (Kompas, Al Rasyid, 2009). Di pihak lain, tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi menimbulkan beragam persoalan bagi Kota Bekasi. Mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, sampai transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta interaksi sosial masyarakat (Kompas, 2009).

Penduduk pendatang di Kota Bekasi saat ini lebih banyak dibanding penduduk lokal. Kenyataan yang tampak adalah terjadi ketimpangan antara pesatnya perkembangan pemukiman penduduk dari Jakarta di Kota Bekasi dan tergesernya pemukiman penduduk lokal Bekasi ke daerah pinggiran. Penduduk lokal Bekasi dapat dikatakan sebagai komunitas marginal atau komunitas yang terpinggirkan, karena kalah bersaing dalam sistem ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu juga sulit beradaptasi terhadap perubahan struktural kota karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, kehilangan mata pencaharian, semakin miskin dan terpaksa tinggal di daerah kumuh atau bertahan hidup di pinggiran kompleks-komplek perumahan.

Kekalahan penduduk lokal Bekasi dalam persaingan dengan penduduk pendatang juga dinyatakan oleh Arifin Dimiyati (Kompas Cybermedia, 2007) *Pengusaha di Kota Bekasi sering mengeluhkan buruknya kualitas sebagian besar sumber daya manusia lokal Bekasi dibanding pencari kerja dari luar daerah. Akibatnya, perusahaan lebih banyak menerima tenaga kerja dari luar daerah daripada tenaga kerja lokal Bekasi.*

Namun berbeda dengan kutipan di atas, Pemerintah Kota Bekasi justru menuding para pendatang sebagai penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Sebagaimana dikatakan pihak Pemerintah Kota Bekasi “ ... *Kota Bekasi adalah daerah tujuan untuk mencari nafkah, namun para pendatang tersebut tidak dibekali keahlian yang memadai, maka akhirnya mereka menganggur dan mencoba bergerak dibidang informal yang tidak ada kepastiannya.*”(Dadang Hidayat dalam Madina.com, )

### **1.1.2. Kemiskinan di Kota Bekasi**

Persoalan kemiskinan di wilayah Kota Bekasi sangat kompleks. Setiap tahun angkanya terus naik. Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk miskin, yaitu pada bulan Desember 2005 jumlah penduduk miskin hanya 28.000 jiwa, pada tahun 2006 jumlahnya naik menjadi 38.000 jiwa. Oleh karena itu untuk menekan angka kemiskinan tersebut Pemerintah Kota Bekasi harus mengambil kebijakan.

Data tahapan keluarga sejahtera di Kota Bekasi selama kurun waktu 2000 s.d 2007 menunjukkan jumlah keluarga miskin versi BKKBN yang terdiri dari keluarga pra sejahtera (Pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I) setiap tahun terus bertambah, dari 82.127 keluarga di tahun 2000 meningkat menjadi 93.443 keluarga di tahun 2007. Dari tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi sedikit penurunan jumlah keluarga miskin secara total. Namun demikian, jumlah keluarga pra sejahtera atau keluarga yang kesejahteraannya paling rendah, justru meningkat dari 18.726 keluarga di tahun 2006 menjadi 20.448 keluarga di tahun 2007 . Rincian selengkapnya lihat di lampiran tabel 1.

Sementara hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Kota Bekasi tahun 2008 menunjukkan sedikit penurunan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kota Bekasi jika dibandingkan dengan hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 yaitu dari 38.109 RTS di tahun 2005 menjadi 37.744 RTS di tahun 2008. Namun demikian, terdapat 6 kecamatan yang justru mengalami peningkatan jumlah rumah tangga miskin sasaran yaitu kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bantargebang, Rawalumbu, Bekasi Barat dan Jati Sampurna. Rincian selengkapnya lihat di lampiran tabel 2. Terlepas dari perbedaan angka-

angka kemiskinan yang disajikan oleh berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, semua mengakui bahwa jumlah keluarga miskin di Bekasi cukup tinggi dan belum terjadi penurunan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Pemerintah daerah Kota Bekasi, sama halnya dengan pemerintah pusat, telah menjalankan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Baik yang dilakukan sendiri oleh pemerintah maupun dengan melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Raskin (pembagian beras untuk rakyat miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) maupun PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri dan berbagai bentuk kemudahan dan fasilitas untuk UKM (Usaha Kredit Menengah). Namun, program-program tersebut tampaknya belum efektif menurunkan angka kemiskinan di Kota Bekasi.

Program terbaru unggulan Kota Bekasi untuk penanggulangan kemiskinan adalah Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) yang telah dicanangkan sejak 28 Oktober 2008 dan hingga saat ini telah berdiri 56 Posdaya se-Kota Bekasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi lingkungan masyarakat di daerah setempat untuk dapat mengembangkan sumber daya dan ketrampilan untuk membuka usaha baru, khususnya untuk keluarga sebagai motor lingkungan setempat. Namun, untuk saat ini belum dapat dilihat hasil dari program Posdaya ini.

### **1.1.3. Stagnasi Sektor Pertanian di Kota Bekasi dan hubungannya dengan kemiskinan**

Sebagai wilayah perkotaan, saat ini peranan sektor pertanian di Kota Bekasi relatif kecil. Sejak tahun 1998 sampai saat ini lahan pertanian di Kota Bekasi terus mengalami konversi sehingga mengalami penurunan yang tajam. Pada tahun 1998 lahan pertanian masih mencapai 9.594,13 hektar atau 45,58 persen dari luas wilayah Kota Bekasi seluas 21.049 hektar. Namun saat ini dalam waktu 10 tahun, lahan pertanian di Kota Bekasi hanya tinggal 600 hektar atau 3 persen saja. Sementara lahan untuk perumahan meningkat dari 46,36 persen menjadi 53,68 persen. Selengkapnya lihat di lampiran tabel 3.

Meski sudah mengalami konversi lahan pertanian secara besar-besaran, di Kota Bekasi masih tersisa empat kecamatan yang memiliki areal sawah yang cukup luas yaitu Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya, Medan Satria dan Bekasi Utara. Jika dihubungkan dengan data PPLS tahun 2008 dalam tulisan sebelumnya, 3 dari 6 kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah rumah tangga miskin sasaran dibanding tahun 2005 adalah kecamatan yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian (kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, dan Bantargebang). Hal ini tampaknya berkaitan dengan kesulitan petani lokal untuk beradaptasi dengan perubahan struktural Kota Bekasi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar petani hanya berpendidikan SD bahkan lebih rendah sehingga ketika terjadi perubahan struktur ekonomi para petani lokal ini tidak terserap di sektor industri, jasa dan perdagangan yang justru banyak diisi oleh para pendatang dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Produktifitas pertanian yang rendah karena pengelolaan pertanian yang ada masih tradisional dengan lahan yang semakin sempit. Sejak berubah menjadi "Kota" dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi stagnasi pembangunan pertanian di Bekasi.

Pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani memang tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini tampak antara lain dengan dibubarkannya Dinas Pertanian pada tahun 2003, dan sebagian urusannya menjadi bagian dari Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi (Disperakop), yang mulai tahun 2009 menjadi Dinas Perekonomian Rakyat. Selain itu, juga tampak dari rencana tata ruang wilayah Kota Bekasi. Saat ini masih terdapat pemanfaatan ruang kawasan terbuka hijau untuk pertanian<sup>1</sup>. Namun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi tahun 2008 – 2028 yang masih menunggu pengesahan, tidak ada lagi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk pertanian. Bahkan empat kecamatan yang saat ini masih memiliki lahan persawahan telah ditetapkan fungsinya sebagai wilayah industri, permukiman skala besar, TPU (tempat pemakaman umum) dan TPA dengan *buffer zone* (kecamatan

---

<sup>1</sup> Perda Kota Bekasi nomor 4 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2000 – 2010 pasal 21

Bantargebang/Mustika jaya) dan sebagai wilayah permukiman, perdagangan dan jasa (Kecamatan Medan Satria/Bekasi Utara).

#### **1.1.4. Kelurahan Sumurbatu di antara lahan pertanian dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah**

Menurut data BPS tahun 2007, Kecamatan Bantargebang adalah kecamatan di Kota Bekasi yang sampai saat ini masih memiliki lahan sawah seluas 223 hektar. Dari luas tersebut 138 hektar sawah terletak di Kelurahan Sumurbatu. Bantargebang juga adalah kecamatan yang sebagian wilayahnya sejak tahun 1986 sampai saat ini menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dari Propinsi DKI Jakarta . Areal TPA - sekarang menjadi TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) - Bantargebang memiliki luas 108 hektar, mencakup 3 dari 4 kelurahan yaitu kelurahan Ciketing Udik, kelurahan Cikiwul, dan kelurahan Sumur Batu. Saat ini Propinsi DKI Jakarta memproduksi sekitar 6.500 ton sampah per hari dan sekitar 4.500 ton dibuang ke Bantargebang.

Khusus untuk wilayah Kelurahan Sumurbatu, selain menjadi lokasi pembuangan sampah dari Jakarta seluas 27 hektar, masih ditambah lagi dengan keberadaan TPA sampah Kota Bekasi seluas 10 hektar. Di sini terlihat dua potret kemiskinan secara bersamaan. Di satu sisi, sampah telah mengundang ribuan orang pemulung pendatang. Mereka umumnya berasal dari daerah yang berbasis pertanian seperti Karawang dan Indramayu akibat kegagalan sektor ini di daerah asal mereka . Contohnya ketika banjir melanda Kabupaten Karawang dan mengakibatkan gagal panen, maka dalam tempo satu bulan, 7.000 petani asal Karawang beralih profesi menjadi pemulung di Bantargebang (Seputar Indonesia, 2008). Adapula sebagian yang berasal dari Semarang dan Madura. Para pemulung ini membangun gubuk-gubuk liar dari bahan seadanya seperti kardus dan plastik , mereka juga menimbun sampah-sampah hasil pilihan mereka di sekitar gubuk yang menyebabkan kekumuhan dan bau busuk yang sangat mengganggu.

Di sisi lain adalah kemiskinan penduduk asli atau penduduk lokal Kelurahan Sumurbatu yang sebagian besar dulunya adalah petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lokasi pembuangan sampah dan lokasi perumahan telah membuat petani kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian utama

mereka. Lahan pertanian yang cukup luas di kelurahan ini, umumnya sudah dimiliki oleh orang-orang Jakarta atau pengembang perumahan yang menunggu pembangunan. Dengan demikian petani yang ada kebanyakan hanyalah penggarap dan petani berlahan sempit sehingga jika mereka tetap bekerja di sektor pertanian maka biasanya hasil yang mereka peroleh tidak untuk dijual, melainkan hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Pola pertanian subsisten ini membuat mereka terus-menerus berada dalam lingkaran kemiskinan. Sementara sebagian penduduk lokal yang merasa tidak mungkin lagi bertahan di sektor pertanian akhirnya memilih untuk menjadi pemulung.

Sejak tahun 2004 sebenarnya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan dana kompensasi sampah yang cukup besar yang disalurkan melalui Pemerintah Kota Bekasi kepada tiga kelurahan di kecamatan Bantargebang yang terkena dampak langsung TPST (Kelurahan Cikiwul, Sumurbatu, dan Ciketing Udik). Sebagai gambaran, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bekasi telah menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebesar Rp 18.852.900.000 yang dibagikan secara merata kepada 3 kelurahan tersebut masing-masing sebesar Rp 6.284.300.000.<sup>2</sup> Sementara, untuk triwulan I tahun 2009 dana kompensasi yang disalurkan senilai Rp 4,218 miliar untuk dibagikan kepada 13.605 kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan masing-masing Rp 1,356 miliar per triwulan. Per KK mendapat alokasi dana kompensasi sebesar Rp 100 ribu per bulan (MediaIndonesia.com, 2009)

Saat ini Pemerintah Kota Bekasi mengharapkan sampah dapat menjadi primadona bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi dengan telah diresmikannya Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sumur Batu. Hal tersebut diungkapkan oleh Walikota Bekasi pada saat meresmikan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan sistem pengomposan di IPST Sumur Batu. Selain sistem pengomposan, di IPST Sumur Batu juga akan dibangun bio diesel yang akan mengolah sampah lebih banyak dari kemampuan pengomposan. Sementara sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menghasilkan sampah menjadi listrik. Walikota Bekasi optimis dengan penerapan

---

<sup>2</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kota Bekasi

teknologi dan selesainya konsesi dengan mitra usaha tersebut, pendapatan pada 2009 akan melonjak hingga Rp 100 milyar. Artinya, pada tahun yang sama, sampah akan menyumbang APBD Kota Bekasi di atas 50 persen. Pada tahun 2008 saja, sampah telah menyumbang PAD Kota Bekasi sebesar Rp 30 miliar.<sup>3</sup>

Melihat besarnya sumbangan sampah bagi PAD Kota Bekasi, tidak mengherankan jika Pemerintah Kota Bekasi sampai hari ini mempertahankan keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut dan mengutamakan upaya-upaya pengembangan pengolahan sampah di Kecamatan Bantargebang. Sementara potensi pertanian dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat petani yang masih ada di Kecamatan Bantargebang cenderung diabaikan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pembangunan pesat di Kota Bekasi yang ditandai dengan perubahan struktur tata ruang, perubahan struktur administrasi dan perubahan struktur sosial ekonomi, ternyata tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian penduduknya. Terlihat dari timbulnya beragam persoalan di Kota Bekasi terutama masalah kemiskinan dan pengangguran.

Kelurahan Sumurbatu sebagai bagian dari Kota Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kelurahan lain di wilayah ini. Di sini masih terdapat lahan pertanian yang luas dengan kualitas sumber daya manusia pertanian yang rendah, layaknya sebuah desa yang berada jauh dari kota. Tetapi sebagaimana layaknya sebuah kota besar yang penuh daya tarik, kelurahan ini telah menjadi tujuan bagi ribuan pemulung pendatang dari daerah-daerah pedesaan untuk mencari nafkah. Di wilayah ini terdapat lokasi tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, sekaligus primadona sumber pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Kelurahan ini juga menerima dana pemberdayaan masyarakat sebagai kompensasi sampah dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah miliaran rupiah setiap tahunnya, tetapi jumlah rumah tangga miskin justru bertambah.

---

<sup>3</sup> Website Cipta Karya



Berdasarkan uraian di atas maka perlu suatu pendekatan yang berbeda untuk memahami kondisi kemiskinan dan mencari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sumur Batu, kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah setempat ?
- 2) Apakah penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal ?
- 3) Apakah potensi yang dimiliki daerah setempat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal ?
- 4) Skenario rencana aksi apakah yang dapat dirumuskan untuk pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya peningkatan kesejahteraan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat lokal
- 2) Memahami penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal
- 3) Mengkaji potensi daerah dan masyarakat setempat yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif
- 4) Merumuskan skenario rencana aksi pemberdayaan masyarakat lokal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan di wilayah setempat.

### **1.4. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan, awalnya dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Kemajuan suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP (*gross national product*), yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga terjadi distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata, yang dikenal sebagai prinsip “efek penetesan ke bawah” (*trickle down effect*). Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan dalam pembangunan.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di era orde baru pun dipengaruhi oleh teori-teori ekonomi pembangunan yang berkembang saat itu. Teori Rostow (1960) dengan model pembangunan tahapan pertumbuhan (*stages of growth model of development*) memperkenalkan lima tahapan pembangunan ekonomi yang akan dilalui oleh setiap negara, mulai dari tahap masyarakat tradisional (*traditional society*) yang berbasis pada pertanian hingga tahap terakhir yaitu tahap konsumsi massa yang tinggi (*high mass consumption*) dengan dominasi sektor industri dan jasa . Teori ini juga mengasumsikan terjadinya *trickle down effect*.

Penelitian empiris (*cross section study*) yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (dalam Tambunan 2001) tentang transformasi struktur ekonomi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Sehingga pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian. Dalam model pembangunan dua sektor Lewis (dalam Rahardja 2005) perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan industri, pertumbuhan sektor industri akan menarik kelebihan tenaga kerja sektor pertanian untuk pindah ke sektor industri. Akibatnya, peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri sebagai sektor unggulan.

Kenyataan yang terjadi di negara-negara berkembang sungguh menyedihkan , karena meski terjadi pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan GNP, kebijakan pembangunan yang mengutamakan industri dengan mengabaikan pembangunan pertanian dan pedesaan telah memicu munculnya persoalan lain, seperti tingginya tingkat pengangguran angkatan kerja, tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota, tingginya kesenjangan antara kota – desa, dan kemiskinan. Ini merupakan kesalahan yang dilakukan Indonesia dimana strategi industrialisasi selama pemerintahan orde baru tidak berbasis pada sektor pertanian (Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar). Dan faktor ini menjadi salah

satu penyebab krisis ekonomi yang dialami Indonesia selama periode 1997-1999 (Tambunan, 2001)

Saat ini pembangunan ekonomi telah mengalami pendefinisian ulang. Pertumbuhan tidak lagi menjadi tujuan utama. Menurut Green dan Haines (2002) pertumbuhan dan pembangunan bukanlah dua hal yang identik. Menurut Manurung (2005) selain pertumbuhan, unsur pembangunan yang lain adalah perubahan, meliputi perubahan sikap, perubahan kelembagaan dan perubahan struktural. Tujuan pembangunan telah bergeser pada penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja.

Selain pergeseran tujuan pembangunan dari mengejar pertumbuhan ke arah penghapusan tingkat kemiskinan, mulai berkembang kesadaran para ahli ekonomi tentang peranan penting daerah pedesaan umumnya dan sektor pertanian khususnya dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sudah bukan saatnya memberikan perhatian yang terlalu besar pada upaya industrialisasi secara cepat.

Kesalahan strategi industrialisasi yang terjadi di masa lalu dan inisiatif pembangunan yang bersifat *top down*, menyebabkan masyarakat seringkali hanya menjadi obyek pembangunan dan tidak dapat ikut serta dalam pembangunan, bahkan menjadi termarginalisasi. Gejala marginalisasi itu akan lebih tampak pada suatu daerah yang terbelakang tapi tiba-tiba menjadi lokasi pembangunan atau penggalian sumber-sumber alam (Raharjo : 1987). Gejala marginalisasi penduduk lokal inilah yang terjadi di Kelurahan Sumurbatu, dimana kelurahan yang dulunya merupakan daerah pertanian, sekarang menjadi lokasi TPA sampah dan pengembangan perumahan atau permukiman dari warga Kota Bekasi. Masyarakat lokal tidak berdaya menghadapi perubahan yang begitu cepat sehingga akhirnya terjebak dalam kemiskinan.

Secara konseptual, menurut Suharto (2009) kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural. Faktor struktural menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil,

tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Atau dengan kata lain masyarakat menjadi miskin karena mereka dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak memihak kepada kaum miskin. Demikian pula menurut Yunus (2008) bahwa kemiskinan tak dibentuk oleh orang miskin. Kemiskinan dibentuk dan dilestarikan oleh sistem ekonomi dan sosial yang kita rancang sendiri, institusi dan konsep yang membuat sistem itu dan berbagai kebijakan yang kita terapkan.

Turut memperparah masalah ketidakberdayaan dan kemiskinan penduduk lokal menurut Adi (2008) adalah berkembangnya mentalitas yang materialistik dan ingin serba cepat (*instant*), rendahnya etos kerja serta melemahnya moral dan etika di dalam masyarakat. Yang pada gilirannya mengakibatkan kemiskinan yang melanda kaum marginal ini menjadi sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi budaya kemiskinan.

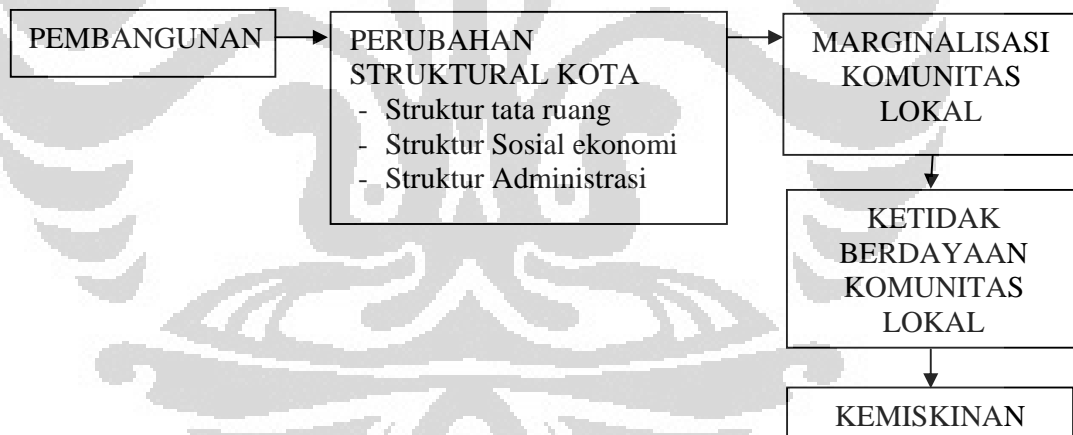
Melihat kompleksnya permasalahan yang timbul dalam pembangunan, dewasa ini, selain pendekatan ekonomi, pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan sosial, yaitu pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial, seperti dua sisi koin yang saling melengkapi satu sama lain. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna (*meaningless*) kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Demikian diungkapkan Midgley dalam Adi (2008)

Kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan seringkali masih bersifat *top down* dan seringkali pula mengalami kegagalan. Hal ini memunculkan konsep melibatkan partisipasi masyarakat seperti diungkapkan Hikmat (2004) bahwa reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat adalah keniscayaan, dengan mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat, menurut Adi (2008) dapat bervariasi, dimana berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi,

kesehatan, hukum, lingkungan, sosial budaya, politik hingga pemberdayaan spiritual.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (*community development*), menurut Green dan Haines (2002) diperlukan suatu modal masyarakat (*community capital*) yang setidaknya terbangun atas lima modal, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal keuangan dan modal lingkungan. Modal-modal tersebut merupakan aset yang melekat dalam setiap masyarakat, yang kadangkala dapat menjadi kelebihan atau sebaliknya dapat merupakan kekurangan suatu masyarakat yang harus diperbaiki. Pengenalan dan adaptasi terhadap modal sosial yang ada akan mempermudah pelaku pemberdayaan masyarakat untuk dapat diterima dan melakukan perubahan di tengah masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan modal sosial menjadi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial melalui gambaran yang utuh (*holistic*) dan mendalam. Penelitian ini bersifat induktif dimana pemahaman terhadap masyarakat dibangun berdasarkan perspektif nyata dari masyarakat yang diteliti. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat lokal dan sempit, namun membutuhkan kedalaman dalam pemahamannya, sehingga memerlukan pendekatan yang

mampu memahami situasi secara khusus terkait dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data (*grounded theory*). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak ada teori a priori yang dapat mencakup kenyataan-kenyataan jamak yang mungkin dihadapi. Kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga berusaha untuk netral. Ketiga, teori dari dasar lebih responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.

Dengan menggunakan analisis induktif, berarti bahwa upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Namun penelitian ini tetap menggunakan data kuantitatif untuk memberikan gambaran umum daerah penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *PRA (Participatory Rural Appraisal)* merupakan salah satu cara yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pengumpulan data tentang masyarakat yang bersangkutan. Menurut Chambers dalam Acuan Penerapan *PRA* (1996) *PRA* adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat perdesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Manfaat *PRA* bagi masyarakat adalah menimbulkan proses belajar dan kesadaran tentang berbagai keadaan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi sehingga dapat mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan yang mengganggu.

Beberapa prinsip *PRA* adalah mengutamakan yang terabaikan, pemberdayaan, saling belajar dan menghargai perbedaan, triangulasi, santai dan informal, mengoptimalkan hasil bagi masyarakat, keberlanjutan, orientasi praktis dan terbuka.

## 1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Sumurbatu yang tercatat secara administratif di Kantor Lurah Sumurbatu baik warga asli maupun warga pendatang. Istilah masyarakat lokal mengacu pada warga asli Sumurbatu yang telah lahir dan tinggal di wilayah ini secara turun temurun.

Warga pendatang musiman yang bermata pencaharian sebagai pemulung dan tidak tercatat secara administratif di Kantor Lurah Sumurbatu tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini. Alasan penulis adalah akar masalah kemiskinan dari para pemulung pendatang sebenarnya berada di daerah asalnya. Selain itu, skenario rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan dihasilkan dari penelitian ini lebih realistis jika diterapkan kepada masyarakat lokal yang status kependudukannya tercatat secara legal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dan diskusi dengan masyarakat kelurahan Sumur Batu , tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan terkait terutama untuk mendapatkan data kualitatif seperti akar permasalahan kemiskinan di lokasi penelitian dan potensi yang dimiliki . Data sekunder seperti kondisi wilayah, kondisi perekonomian wilayah, potensi desa, sosial ekonomi, kelembagaan desa dan data-data lain yang terkait yang diperoleh dari data terakhir yang tersedia baik di BPS , Pemerintah Kota Bekasi, Kantor Lurah Sumur Batu dan unit kerja lain yang terkait.

## 1.7. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi masyarakat dan para *stakeholder* setempat dalam menjalankan kehidupan masyarakat ke depan. Serta menjadi proses pembelajaran baik bagi penulis maupun bagi kelompok masyarakat di Kelurahan Sumurbatu yang menjadi mitra dalam penelitian ini untuk mengenali permasalahan yang mereka hadapi sekaligus menggali alternatif pemecahan atas masalah-masalah yang diidentifikasi.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi data dasar bagi pengembangan dan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 6 bab sebagai berikut :

- **Bab 1. Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- **Bab 2. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang kajian literatur yang berhubungan dengan teori-teori pembangunan, kemiskinan, dan konsep pemberdayaan masyarakat serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- **Bab 3. Sasaran dan Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan mengenai sasaran dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini secara terperinci. Dalam metode penelitian, penulis menguraikan secara jelas mengenai upaya pendekatan kualitatif yang digunakan juga mengenai metode *Participatory Rural Appraisal* yang digunakan oleh penulis. Penulis juga menguraikan tahapan analisis data yang dilakukan, serta lokasi dan jadwal penelitian.

- **Bab 4. Hasil Penelitian**

Pada bab ini diuraikan secara mendalam hasil penelitian berupa gambaran daerah penelitian serta dinamika yang berkembang . Selain gambaran umum mengenai kondisi wilayah, infrastruktur maupun demografis, penulis juga memberikan gambaran mengenai sejarah desa. Dalam dinamika kehidupan masyarakat saat ini, diuraikan mengenai berbagai kondisi aktual yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian digambarkan pula kondisi kelembagaan yang ada di masyarakat , peran lembaga dan modal sosial yang ada di masyarakat.

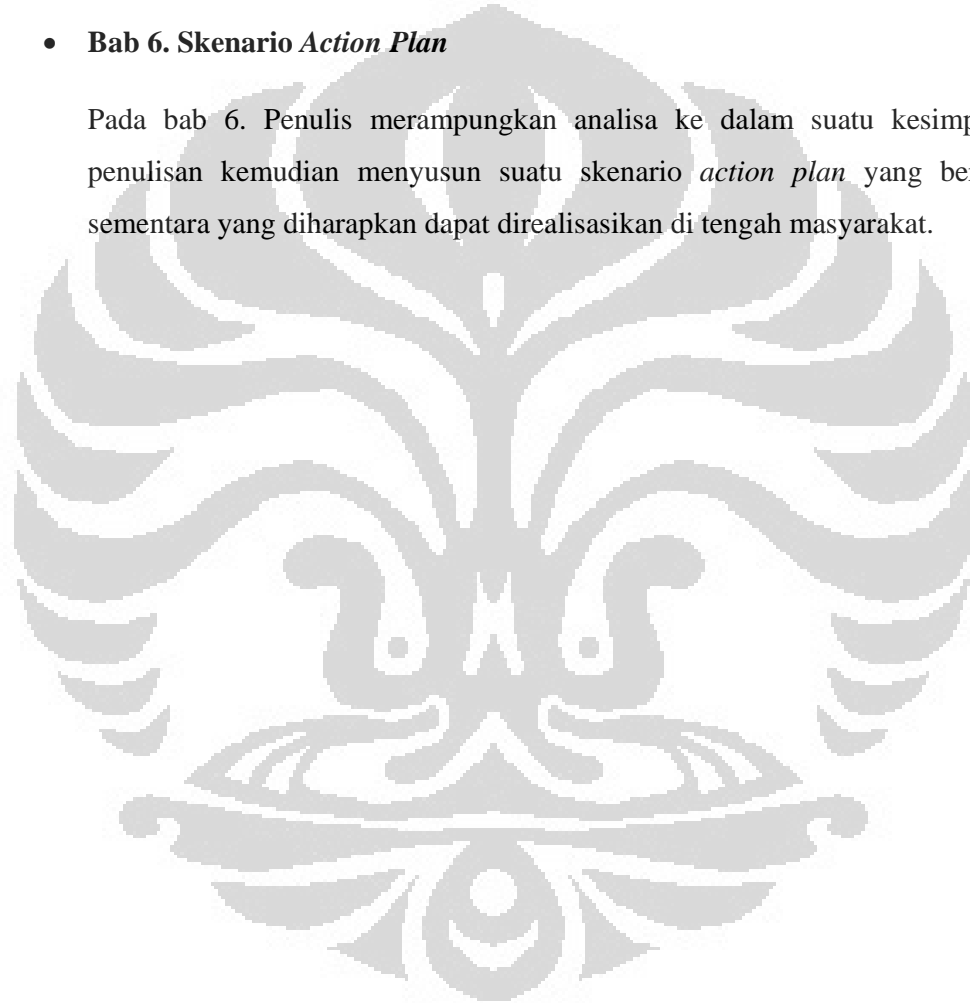


- **Bab 5. Identifikasi Permasalahan dan Analisa SWOT**

Pada awal bab ini penulis mengidentifikasi permasalahan umum. Setelah itu permasalahan dianalisa melalui analisa *SWOT* (*strength, weakness, opportunity, threat*). Diagram tulang ikan digunakan untuk mencari akar masalah yang terjadi. Lalu ditentukan prioritas masalah dengan kembali melakukan analisa *SWOT* terkait dengan akar masalah yang ada.

- **Bab 6. Skenario *Action Plan***

Pada bab 6. Penulis merampungkan analisa ke dalam suatu kesimpulan penulisan kemudian menyusun suatu skenario *action plan* yang bersifat sementara yang diharapkan dapat direalisasikan di tengah masyarakat.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Definisi dan Tujuan Pembangunan

Menurut Todaro (2003) secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP (*gross national product*), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata, yang dikenal sebagai prinsip “efek penetes ke bawah” (*trickle down effect*). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti soal kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan acapkali dinomorduakan.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat yang telah melakukan industrialisasi mendorong para ahli ekonomi untuk menganjurkan ditempuhnya strategi industrialisasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat bagi negara-negara agraris yang padat penduduk di dunia ketiga termasuk di Indonesia .

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di era orde baru pun dipengaruhi oleh teori-teori ekonomi pembangunan yang berkembang pada saat itu. Antara lain adalah teori dari Walt W. Rostow (1960) dengan model pembangunan tahapan pertumbuhan (*stages of growth model of development*) sebagaimana dikutip oleh Adi (2008) memperkenalkan lima tahapan pembangunan ekonomi yang akan dilalui oleh setiap negara, yaitu :

1. Tahap masyarakat tradisional (*traditional society*) dimana ekonomi didominasi oleh berbagai kegiatan subsisten, output lebih banyak dikonsumsi oleh produsen daripada diperdagangkan. Perdagangan lebih banyak

menggunakan sistem barter. Sektor pertanian menjadi industri yang paling penting, serta melibatkan banyak tenaga kerja (*labor intensive*) dengan modal uang yang relatif kecil.

2. Tahap transisi (*transitional stage*) atau tahap prekondisi untuk tinggal landas (*the preconditions for takeoff*). Pada tahap ini mulai terjadi peningkatan spesialisasi yang kemudian memunculkan surplus perdagangan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu dikembangkan infrastruktur transportasi guna mendukung dan meningkatkan transaksi perdagangan. Pada tahap ini terjadi perdagangan eksternal, antarnegara, terutama yang berkaitan dengan produk-produk primer.
3. Tahap tinggal landas (*take off*), pada tahap ini industrialisasi meningkat hingga terjadi peralihan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Pertumbuhan terjadi pada berbagai area tertentu dari suatu negara, dengan memfokuskan pada industri manufaktur tertentu. Tingkat investasi pada masa ini sudah mencapai lebih dari 10 % dari GNP. Transisi ekonomi ini akan diikuti oleh evolusi dari institusi sosial dan politik searah dengan perubahan yang ada. Pertumbuhan ini menjadi 'mandiri' karena investasi yang masuk berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat serta negara dan juga akan meningkatkan tabungan masyarakat dan negara. Hal ini juga pada akhirnya akan menarik investasi yang lebih besar di masa mendatang.
4. Tahap menuju kematangan (*drive to maturity*), pada tahap ini kehidupan ekonomi mencapai keragaman ke berbagai area sehingga mendorong munculnya inovasi teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan keragaman kesempatan untuk berinvestasi. Sektor ekonomi akan menghasilkan berbagai macam produk barang dan jasa yang akhirnya akan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
5. Tahap konsumsi massa yang tinggi (*high mass consumption*), pada tahap ini kehidupan ekonomi sudah meningkat pada konsumsi massa, dimana jumlah konsumen meningkat dan jumlah keragaman industri juga meningkat. Oleh karena itu, sektor jasa menjadi semakin dominan peranannya.

Untuk menjalankan strategi industrialisasi itu diperlukan modal investasi dalam jumlah besar yang tentunya tidak dimiliki oleh negara-negara dunia ketiga,

dan sebagai jalan pintas dibukalah pintu lebar-lebar untuk investasi modal asing beserta teknologinya.

Teori Rostow juga mengasumsikan akan terjadi *trickle down effect*. Namun, kenyataan yang terjadi sungguh menyedihkan, karena meski terjadi peningkatan GNP secara bertahap pada beberapa negara berkembang tetapi kebijakan investasi modal intensif telah memicu munculnya persoalan lain, seperti tingginya tingkat pengangguran angkatan kerja, tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota, dan tingginya kesenjangan antara kota – desa, yang pada gilirannya menyebabkan tingginya angka kemiskinan di negara berkembang, terutama di daerah pedesaan.

Penelitian empiris (*cross section study*) yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (dalam Tambunan 2001) tentang transformasi struktur ekonomi juga menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian (atau sektor pertambangan) menuju ke sektor industri. Sehingga pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian. Akibatnya, peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri sebagai sektor unggulan.

Sejalan dengan itu adalah model pembangunan dua sektor Lewis (dalam Rahardja 2005) dimana perekonomian dibagi menjadi dua sektor, yaitu pertanian dan industri. Kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian menyebabkan produktifitas tenaga kerja sama dengan nol. Sementara pertumbuhan sektor industri akan menarik sebagian pekerja sektor pertanian pindah ke sektor industri. Perpindahan ini tidak akan menurunkan *output* sektor pertanian, sebab pekerja di sektor pertanian sangat melimpah. Meski model ini dapat menggambarkan pengalaman sejarah pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat, namun ternyata tidak cocok dengan kenyataan di sebagian besar negara-negara berkembang karena tidak berlakunya asumsi-asumsi dari model ini.

Setelah melewati dekade 1970-an pembangunan ekonomi mengalami pendefinisian ulang. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya. Menurut *Green-Haines* (2000) pertumbuhan dan pembangunan bukanlah dua hal yang identik. Pertumbuhan (*growth*) biasanya mengacu pada peningkatan secara kuantitatif pada beberapa fenomena seperti lapangan pekerjaan, populasi dan pendapatan. Sementara pembangunan (*development*) melibatkan perubahan struktural di masyarakat, terutama dalam penggunaan sumber-sumber daya, fungsi dari lembaga-lembaga dan distribusi sumber daya yang ada di masyarakat.

Demikian pula yang dikemukakan Manurung (2005) bahwa pembangunan ekonomi lebih luas maknanya dari pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu unsur dari pembangunan ekonomi. Unsur lainnya adalah perubahan yang meliputi perubahan sikap, perubahan kelembagaan dan perubahan struktural. Perubahan struktural yang utama adalah struktur produksi dan pengeluaran. Jika perekonomian makin modern, maka sumbangan output sektor industri dan jasa makin meningkat, sedangkan sumbangan output sektor pertanian menurun.

Tujuan pembangunan ekonomi dewasa ini telah bergeser pada penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Menurut Bank Dunia (1991) tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, terutama di negara-negara paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun, yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya. Senada dengan yang disampaikan Yunus (2008) bahwa inti pembangunan ialah mengubah kualitas hidup setengah penduduk yang ada di lapisan bawah.

Pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia secara umum telah membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional yang agraris menuju ke arah ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa. Hal ini yang biasa disebut transformasi struktural. Namun demikian, menurut Tambunan (2001) terdapat kesalahan dalam strategi industrialisasi selama pemerintahan orde baru yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab krisis ekonomi yang dialami Indonesia selama periode 1997-1999 yaitu industrialisasi yang tidak berbasis pada sektor dimana Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar, yaitu pertanian. Terbukti selama krisis ekonomi, sektor pertanian masih mampu memiliki laju pertumbuhan yang positif, walaupun dalam persentase yang kecil. Sedangkan sektor industri manufaktur mengalami laju pertumbuhan yang negatif di atas satu digit. Namun, kesalahan strategi industrialisasi yang mengabaikan potensi pertanian juga terjadi di daerah.

Ikhsan (2008) menyebutkan, sektor pertanian khususnya pertanian pangan merupakan sektor yang integral untuk mengurangi kemiskinan, karena tidak kurang dari 60 % orang miskin Indonesia bergantung pada sektor ini. Demikian pula Bank Dunia dalam *World Development Report 2008* dengan topik utama *Agriculture for Development* mengungkapkan bahwa pertanian sebenarnya merupakan dasar bagi pertumbuhan (*growth*) dan penurunan angka kemiskinan di banyak negara. Lebih banyak negara dapat memperoleh manfaat jika saja pemerintah dan negara donor mau memperbaiki kesalahan dalam membuat kebijakan yang mengabaikan pertanian selama bertahun-tahun dan juga mau meningkatkan investasinya di sektor pertanian.

Selain kesadaran akan pentingnya peran sektor pertanian, pembangunan dewasa ini juga dilakukan dengan pendekatan sosial, selain pendekatan ekonomi. Menurut Midgley dalam Adi (2008) pembangunan sosial adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial, seperti dua sisi koin yang saling melengkapi satu sama lain. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah

bermakna (*meaningless*) kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan.

Adapun indikator kesejahteraan sosial menurut Spicker dalam Adi (2008) dapat dilihat dari minimal 5 aspek yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Sedangkan Zastrow dalam Adi (2008) menambahkan 4 aspek lagi yaitu aspek fisik, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat dan aspek rekreasional.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan di masa lalu identik dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak pada sektor industri dan mengabaikan sektor pertanian sehingga memunculkan beragam masalah yang sulit untuk dipecahkan seperti kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Maka, belajar dari pengalaman itu sudah saatnya mendudukkan sektor pertanian sebagai dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional meliputi perubahan sikap, perubahan kelembagaan dan perubahan struktural, juga proses peningkatan kualitas hidup dari aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, lingkungan bahkan spiritual, terutama bagi penduduk yang berada di lapisan paling bawah atau miskin. Tanpa itu semua, sebuah proses pembangunan tidak dapat dikatakan berhasil.

## **2.2. Perubahan Struktural Kota dan Marginalisasi Penduduk lokal**

Pembangunan perkotaan yang pesat, dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah memaksa perluasan kota ke daerah-daerah pinggiran. Sehingga memunculkan daerah-daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang didefinisikan oleh Giyarsih (2001) sebagai daerah yang berada dalam proses transisi dari daerah perdesaan menjadi perkotaan. Sebagai daerah transisi, daerah ini berada dalam tekanan kegiatan-kegiatan perkotaan yang meningkat yang berdampak pada perubahan fisik termasuk konversi lahan pertanian dan non pertanian dengan berbagai dampaknya. Pokok persoalan yang terdapat di daerah *urban fringe* pada dasarnya dipicu oleh proses transformasi spasial (tata ruang) dan sosial akibat perkembangan daerah urban yang sangat intensif. Dari kecenderungan di atas

maka salah satu arah perkembangan kota yang perlu dicermati adalah perkembangan spasial yang berdampak pada perkembangan sosial ekonomi penduduk pinggiran kota.

Untuk kasus Kota Bekasi, menurut Hikmat (2007) transformasi spasial ditunjukkan dengan perubahan fungsi kota menjadi kota pemukiman penduduk Jakarta, padatnya kompleks perumahan, meluasnya sentra ekonomi, perubahan modus transportasi, perubahan fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan perubahan fungsi sebagai kawasan penyeimbang menjadi *buffer zones* bagi DKI Jakarta. Bersamaan dengan proses transformasi spasial tersebut, muncul wilayah *centre* (pusat) dan *periphery* (pinggiran), yang secara makro direfleksikan dengan pesatnya perkembangan wilayah DKI Jakarta sebagai wilayah pusat dan kota sekitarnya (Bogor, Bekasi dan Tangerang) sebagai wilayah pinggiran, dan secara mikro direfleksikan dengan pesatnya perkembangan pemukiman penduduk Jakarta di Bekasi dan tergesernya pemukiman penduduk asli Bekasi ke desa pinggiran.

Bukan hanya transformasi spasial, Hikmat (2007) membagi unsur-unsur perubahan struktural kota menjadi 3 yaitu :

1. Perubahan struktur tata ruang (spasial) meliputi struktur tata guna tanah, fasilitas pelayanan sosial dan jaringan transportasi
2. Perubahan struktur sosial ekonomi meliputi pola ekonomi masyarakat, organisasi produksi dan struktur kekuasaan ekonomi
3. Perubahan struktur administrasi dan pengelolaan pembangunan

Perluasan kota akibat perubahan struktur tata ruang yang cepat mengakibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat lokal di daerah pinggiran kota seringkali mengalami marginalisasi. Menurut Raharjo (1987) bentuk lain dari marginalisasi adalah tidak bisa ikutnya suatu kelompok dalam suatu kegiatan pembangunan, atau akibat suatu proyek pembangunan dan investasi usaha baru, peranan mereka tersisihkan dan diganti oleh teknologi dan orang dari daerah lain. Gejala marginalisasi itu akan lebih tampak pada suatu daerah yang terbelakang tapi tiba-tiba menjadi lokasi pembangunan atau penggalan sumber-sumber alam.



Marginalisasi yang dialami oleh penduduk lokal pada akhirnya mengakibatkan ketidakberdayaan dalam beradaptasi terhadap perubahan struktural kota. Menurut penelitian Hikmat (2007), ketidakberdayaan komunitas lokal dalam beradaptasi terhadap perubahan struktural kota dapat dilihat dari ciri-ciri: (1) tidak adanya alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, karena mereka kehilangan peluang untuk akses terhadap sistem pelayanan sosial dasar (termasuk sulit akses terhadap program 'pemberdayaan'); (2) terbatasnya produktivitas kerja dan ekonomi yang membuat mereka berada dalam keadaan *subsistence level*; (3) tujuan-tujuan kolektif tidak dapat lagi dibentuk dan dicapai, walaupun mereka masih dalam bentuk komunal; dan (4) semakin lama cenderung fatalistik terhadap perubahan dan kemajuan di lingkungan sekitarnya. Sementara Usman (2008) menengarai faktor penting yang membuat desa menjadi tidak berdaya adalah produktivitas yang rendah dan sumber daya manusia yang lemah.

Marzali (2005) menyebutkan kualitas sumber daya manusia sebagai sebuah faktor produksi tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisiknya, tingkat pendidikannya dan keterampilan yang dimilikinya. Tetapi ada satu lagi faktor penentu kualitas sumber daya manusia yaitu mentalitas manusia atau faktor psikokultural. Lewis dalam Marzali (2005) menghubungkan faktor-faktor psikokultural yang mendorong kemunculan para wirausaha (*entrepreneur*) dengan masalah lingkungan sosial dan politik yang subur bagi pertumbuhan ekonomi. Masih menurut Lewis, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sikap terhadap kerja, terhadap jumlah dan pemilikan anak, terhadap penemuan baru, terhadap orang asing, terhadap pencarian pengalaman hidup. Menurut Myrdal dalam Marzali (2005) pola-pola ideal dalam proses menuju ke masyarakat modern, seperti sikap rasionalitas, persamaan sosial dan ekonomi, dan demokrasi politik merupakan hal yang asing dalam kebanyakan masyarakat negara terbelakang.

Koentjaraningrat dalam Marzali (2005) berkomentar tentang sikap mental orang Indonesia yang belum siap untuk pembangunan, salah satunya adalah (pada awal tahun 1970-an) 84 persen penduduk Indonesia adalah orang desa, yang bermentalitas petani. Sedangkan sisanya sebanyak 16 persen adalah orang kota

bermentalitas pegawai (priyayi). Sikap mental petani yang utama adalah sikap subsisten. Artinya, bagi petani itu, orang bekerja adalah untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup sudah terpenuhi maka orang tidak perlu kerja keras lagi. Sementara itu, mereka yang bermentalitas priyayi menganggap bahwa tujuan bekerja adalah kebahagiaan dalam wujud kedudukan yang tinggi, kekuasaan, dan pemilikan lambang-lambang kekayaan, seperti rumah megah, pakaian dan mobil mewah, dan seterusnya. Kedua bentuk sikap mental ini tidak mendorong pembangunan.

Pada level mikro (individu, keluarga dan kelompok kecil) yang menjadi salah satu akar masalah dalam pembangunan dewasa ini menurut Adi (2008) adalah berkembangnya mentalitas yang materialistik dan mentalitas ingin serba cepat (*instant*), rendahnya etos kerja serta melemahnya moral dan etika dalam masyarakat. Jika dihubungkan dengan pendapat Koentjaraningrat di atas, tampaknya sikap mental seperti ini adalah kombinasi dari mental petani yang subsisten dengan mental priyayi yang menginginkan kekuasaan dan kekayaan. Yang pada gilirannya akan mengakibatkan kemiskinan yang melanda kaum marginal ini menjadi sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi budaya kemiskinan.

Sehubungan dengan masalah mentalitas atau psikokultural, Marzali (2005) menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengubah kondisi psikokultural suatu masyarakat dalam rangka memacu pembangunan ekonomi masyarakat tersebut. Beberapa institusi sosiokultural yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki daya psikokultural masyarakat adalah kepemimpinan, penafsiran baru terhadap ajaran agama, pendidikan dan pelatihan, peran media massa, pembangunan organisasi dan norma, perilaku manajemen dan pola-pola pengasuhan anak.

Dari berbagai teori di atas penulis melihat bahwa perubahan struktural kota yang sangat pesat meliputi perubahan struktur tata ruang, perubahan struktur sosial ekonomi dan perubahan struktur administrasi pemerintahan telah memunculkan marginalisasi terhadap penduduk lokal di pinggiran kota yang sejak awal tidak pernah dipersiapkan baik secara ekonomi maupun secara psikokultural

(mental) untuk menghadapi perubahan struktural yang terjadi. Akibatnya, penduduk lokal yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan proses transformasi struktural tadi mengalami ketidakberdayaan dalam berbagai segi kehidupannya, tidak berdaya secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan bahkan secara spiritual. Ketidakberdayaan inilah yang akhirnya membuat masyarakat lokal seringkali terjebak dalam kemiskinan.

### **2.3. Kemiskinan dan Hubungannya dengan Marginalisasi Penduduk Lokal**

Menurut Kuncoro (2006) kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : pertama kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Usman (2008) menambahkan satu konsep lagi selain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal ukuran yang konkret dan tidak memperhitungkan standar relatif. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin dan demikian pula sebaliknya. Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, konsep kemiskinan semacam ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi penanggulangannya.

Indikator kemiskinan absolut yang ditunjukkan oleh batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup di masing-masing negara. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan

meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pada bulan Maret 2007 batas garis kemiskinan di Indonesia adalah Rp 166.667 per kapita per bulan.

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki kriteria yang berbeda dengan BPS untuk menilai apakah suatu keluarga miskin atau tidak. Keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera I dan keluarga sejahtera tahap I yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi : paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur, setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni. Sementara keluarga miskin sekali adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera Tahap I yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator : seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah , bekerja/sekolah dan bepergian, serta bagian lantai yang terluas bukan dari tanah. Sementara yang dimaksud dengan keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar (pengajaran agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan) dan keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Sementara berdasarkan studi SMERU dalam Suharto (2009) indikator kemiskinan bukan hanya sebatas garis kemiskinan tertentu, melainkan ada sembilan kriteria yang menandai kemiskinan yaitu (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan), (2) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, (3) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil), (4) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air), (5) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum), (6) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan

berkesinambungan, (7) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), (8) ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat), dan (9) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Mengenai penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:

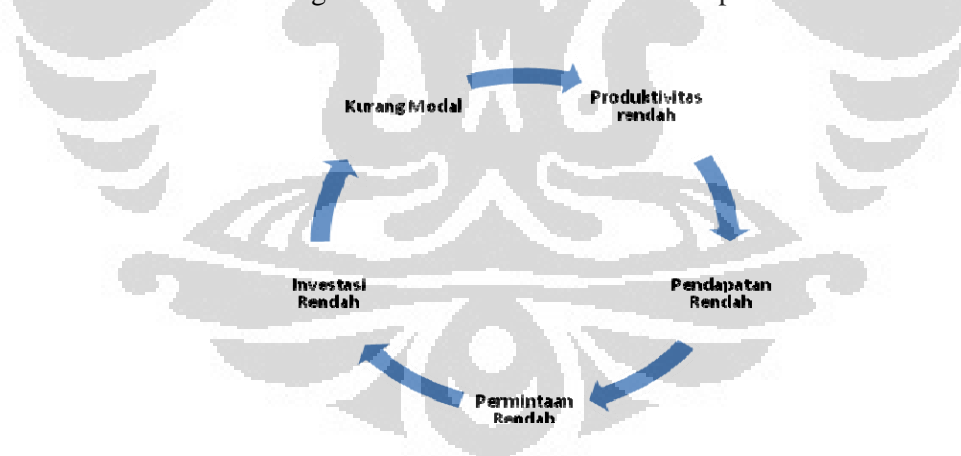
1. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
3. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin.
4. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Atau dengan kata lain masyarakat menjadi miskin karena mereka dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak memihak kepada kaum miskin.

Penyebab kemiskinan karena faktor struktural juga diungkapkan oleh Yunus (2008) bahwa kemiskinan tak dibentuk oleh orang miskin. Kemiskinan dibentuk dan dilestarikan oleh sistem ekonomi dan sosial yang kita rancang sendiri;

institusi dan konsep yang membuat sistem itu dan berbagai kebijakan yang kita terapkan. Kemiskinan tercipta karena kita menyusun kerangka teoritis berdasarkan asumsi yang meremehkan manusia, dengan merancang konsep yang sangat sempit (seperti konsep bisnis, kelayakan untuk mendapatkan pinjaman, kewirausahaan, dan konsep mengenai lapangan kerja) atau membentuk lembaga yang baru separo jadi (seperti lembaga financial, tempat orang miskin diabaikan). Kemiskinan disebabkan kegagalan tingkat konseptual, bukan ketidakmampuan pihak manusia... yang diperlukan orang miskin agar dapat keluar dari kemiskinan ialah menyediakan lingkungan yang mendukung mereka. Begitu orang miskin sudah dapat mencurahkan energi dan kreativitas, kemiskinan akan segera lenyap.

Sementara Ragnar Nurkse, dalam M.L. Jhingan (2008) menjelaskan kemiskinan dalam bentuk lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan dapat dilihat dari sudut permintaan yaitu tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan tingkat permintaan rendah, sehingga tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah menyebabkan modal kurang dan produktifitas rendah sebagaimana ditunjukkan gambar 2.1.

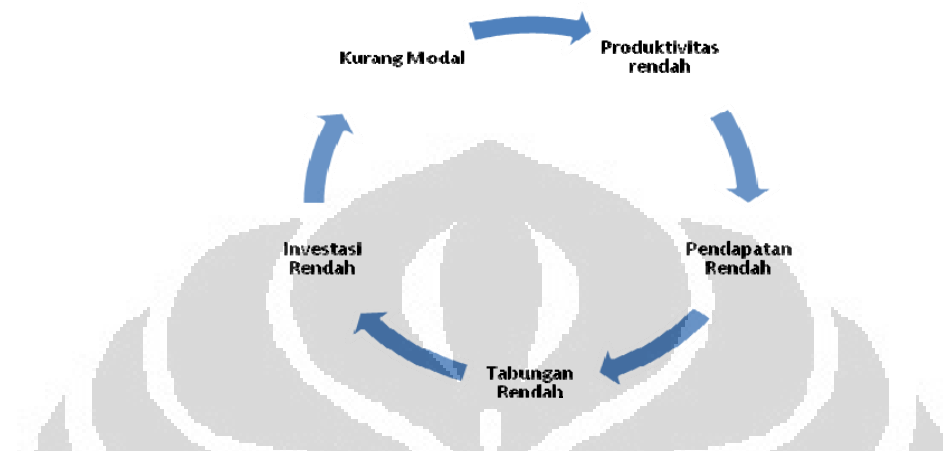
Gambar 2.1. lingkaran setan kemiskinan dari sisi permintaan



Dari sisi penawaran , produktifitas rendah tercermin di dalam pendapatan yang rendah yang berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktifitas yang rendah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.2. Tingkat pendapatan rendah, yang mencerminkan

rendahnya investasi dan kurangnya modal merupakan ciri umum kedua lingkaran setan tersebut.

Gambar 2.2. Lingkaran Kemiskinan dari sisi penawaran

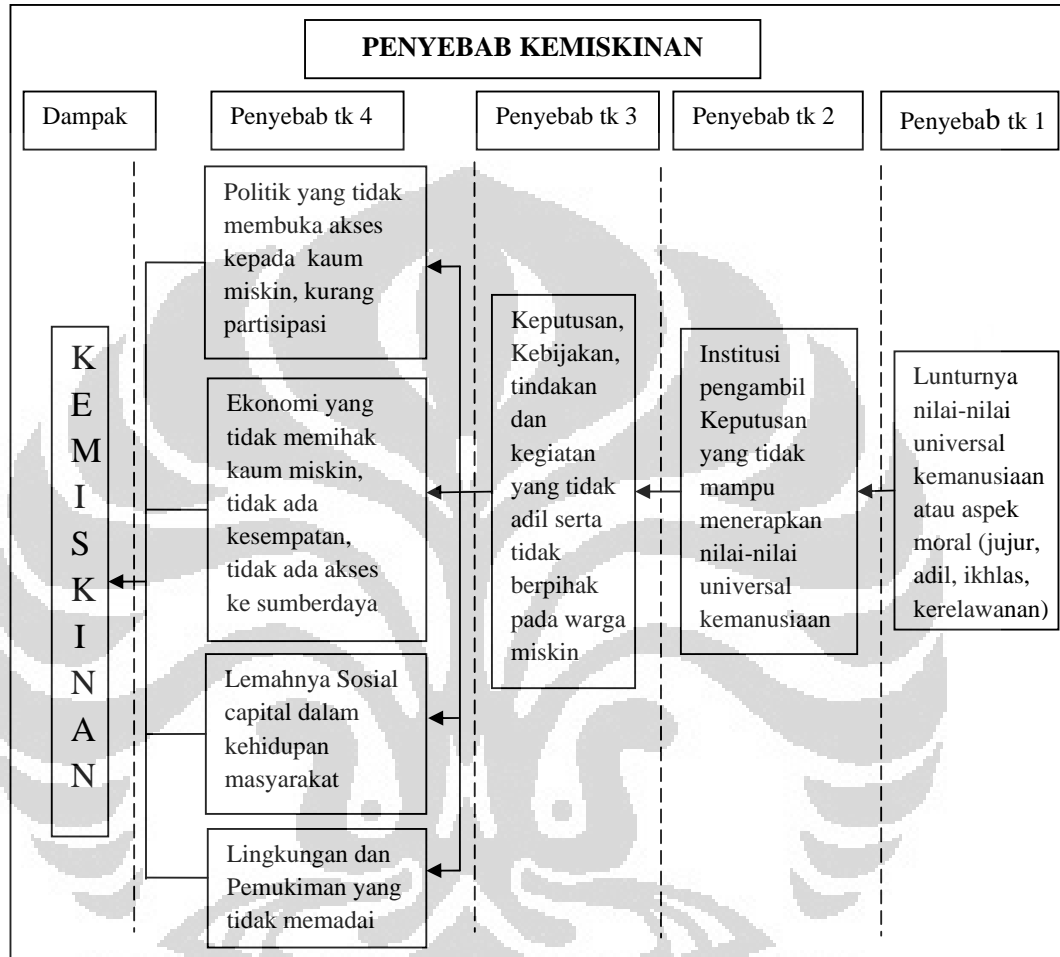


Sementara Todaro (2003) menyatakan rendahnya produktivitas dan standar hidup di negara-negara dunia ketiga merupakan penyebab sekaligus akibat dari keterbelakangan. Rendahnya produktivitas bersumber dari lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik para pekerja yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan, dan rendahnya pendapatan menyebabkan ketidakmampuan dalam penyediaan makanan bergizi. Kekurangan gizi tersebut mengakibatkan rendahnya kapasitas untuk bekerja sehingga produktivitas menjadi semakin rendah. Demikian seterusnya sehingga membentuk suatu lingkaran kemiskinan.

Refleksi kemiskinan dalam Pedoman Teknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (2005) menemukan bahwa akar permasalahan kemiskinan terletak pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan sehingga sebagai manusia kita tidak berdaya untuk menjadi pelaku moral. Lunturnya nilai-nilai kemanusiaanlah yang dapat menghancurkan prinsip-prinsip partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat hanya menjadi korban yang menyebabkan mereka tidak pernah mampu untuk menanggulangi secara mandiri persoalannya. Sementara hal-hal lain yang sering disebut sebagai penyebab kemiskinan seperti kurangnya pendidikan, tidak punya penghasilan tetap, pengangguran dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan

masyarakat , masalah ketidakadilan dan sebagainya hanyalah gejala saja, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Gambar 2.3. Akar Penyebab Kemiskinan menurut P2KP



Menurut Tambunan (2007) kemiskinan adalah suatu masalah yang multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Namun, di Indonesia kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. fenomena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami fenomena kemiskinan di perdesaan atau di sektor pertanian.

Masih menurut Tambunan (2007), pernyataan ini didukung oleh banyak fakta. Fakta pertama adalah bahwa sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia selama ini adalah pertanian. Walaupun tren perkembangan jangka



panjangnya menurun, pertanian tetap paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada awal dekade 70-an, sekitar 67 persen dari jumlah angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor ini, dan pada tahun 2003 menurun menjadi sekitar 46,3 persen. Fakta berikutnya adalah sebagian besar dari penduduk miskin di Indonesia bekerja di pertanian, pada tahun 1996, tercatat hampir 69 persen dari jumlah keluarga miskin di Indonesia memiliki sumber pendapatan di pertanian (data Susenas) , baik sebagai petani (dengan lahan atau tanpa lahan sendiri) maupun buruh (lepas atau kontrak). Bahkan, satu hal yang menarik , bahwa kegiatan pertanian mempunyai suatu peran yang dominan sebagai sumber pendapatan bagi banyak keluarga miskin di daerah perkotaan. Bisa dilihat di pinggiran kota Jakarta, Bekasi dan Tangerang banyak keluarga miskin menanam berbagai jenis komoditas pertanian di lahan yang sempit dipinggir sungai dan menjualnya setiap hari ke pasar-pasar terdekat, yang merupakan sumber pendapatan mereka satu-satunya.

Menurut penulis, kemiskinan merupakan akibat dari banyak faktor penyebab sekaligus sebagaimana menurut Suharto (2009) bahwa kemiskinan disebabkan faktor individu, sosial, kultural dan struktural . Untuk kasus Indonesia umumnya dan Kota Bekasi yang menjadi obyek penelitian ini, khususnya, penyebab kemiskinan lebih dominan berasal dari faktor struktural karena melibatkan berbagai kebijakan pemerintah yang justru menimbulkan konsekuensi yang memiskinkan masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah di masa lalu yang mengutamakan industrialisasi kota dan menganaktirikan pertanian yang justru menjadi keunggulan bangsa ini, akhirnya menyisakan masalah kemiskinan terutama di sektor pertanian dan di wilayah pedesaan. Adapun akar permasalahan yang hakiki dari kemiskinan terletak pada masalah rendahnya moral, baik dari individu-individu pembuat kebijakan maupun moral dari individu dalam masyarakat yang kian melestarikan kemiskinan itu sendiri.

Ketika pembangunan perkotaan secara fisik infrastruktur melebar ke desa-desa yang ada di sekitarnya tanpa dibarengi dengan pembangunan sektor pertanian dan sumber dayanya , pembangunan tersebut hanya akan memunculkan kaum miskin baru yang disebut dengan kaum marginal. Menurut Hikmat (2007) marginalisasi komunitas lokal merefleksikan pemiskinan secara sistematis dan

*mode of orientation* aktor pembangunan yang lebih bertumpu pada kepentingan ekonomi dan politik daripada kepentingan sosial budaya. Selain itu, marginalisasi bersama-sama dengan strategi institusi sosial yang mengabaikan hakekat pemberdayaan masyarakat, cenderung mengakibatkan keadaan komunitas lokal menjadi semakin tidak berdaya dalam beradaptasi terhadap perubahan struktural kota.

Ketidak berdayaan yang menyebabkan komunitas lokal terjebak dalam lingkaran kemiskinan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurkse dalam Jhingan (2008) karena produktivitasnya yang rendah akibat tingkat modal yang juga rendah. Sependapat dengan Yunus (2008) maupun Hikmat (2004), bahwa orang miskin dapat diberdayakan sesuai dengan potensi diri dan sosial yang dimilikinya, dengan dukungan orientasi kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan sosial budaya. Proses pemberdayaan masyarakat yang memberikan lingkungan yang mendukung sehingga orang miskin dapat menemukan kekuatan dirinya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

#### **2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Modal Sosial Masyarakat**

Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan menurut SNPK (2005) adalah lemahnya partisipasi masyarakat miskin, atau partisipasi LSM untuk dapat menyampaikan suara si miskin dalam tahap perumusan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Selama ini, program pembangunan masyarakat lebih banyak direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran. Program demikian bersifat diturunkan dari atas ke bawah (*top-down*) artinya diturunkan dari pemimpin lembaga kepada pelaksana dan masyarakat. Walaupun program semacam ini didasarkan pada proses penjajagan kebutuhan (*need assesment*) masyarakat, namun hal ini dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti. Berbagai kritik yang

dilontarkan terhadap pola pengembangan program yang masih “*top-down*” itu antara lain diungkapkan dalam Acuan Penerapan *PRA* (1996) :

- Sering terjadi ketidakcocokan antara para peneliti/para pemrakarsa dengan para pelaksana program. Penelitian yang terlalu akademis dipengaruhi oleh wawasan, pikiran dan pandangan penelitiannya sendiri, sehingga nilai terapannya kurang. Dengan sendirinya program yang disusun berdasarkan penelitian itu tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan praktis yang sesungguhnya dirasakan masyarakat.
- Keterlibatan masyarakat dalam program yang diturunkan berupa paket hanyalah sekedar sebagai pelaksana; masyarakat tidak merasa sebagai pemilik program karena mereka seringkali tidak melihat hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan program yang akhirnya diturunkan. Dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program seperti itu akan sangat pura-pura, demikian pula partisipasi mereka
- Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja kurang mendidik dan kurang menjamin keberlanjutan program karena prakarsa selalu datang dari luar dan ketrampilan pengkajian, perencanaan dan pengorganisasian, tetap dimiliki orang luar.

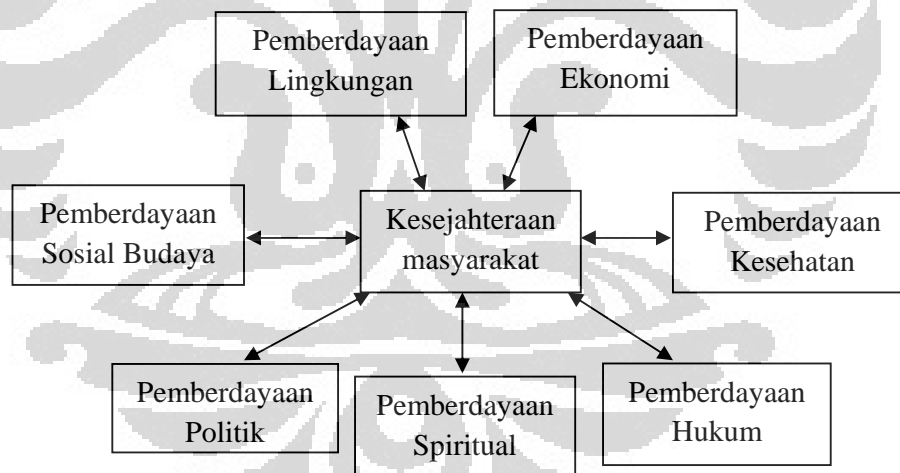
Kritik dan alasan-alasan tersebut melahirkan pemikiran tentang pendekatan pembangunan atau pengembangan program yang lebih partisipatif, melibatkan masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan. Demikian pula menurut Hikmat (2004) reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat adalah keniscayaan, dengan mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (P2MPD) sebenarnya telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Namun dalam pelaksanaan, ruang partisipasi tersebut sering berbenturan dengan kepentingan administrasi dan waktu proyek yang terbatas. Sehingga partisipasi masyarakat yang diharapkan, hingga saat ini masih dalam bentuk formalitas saja.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Hikmat mengenai ” Marginalisasi Komunitas Lokal dalam Perspektif Kontingensi Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kota Bekasi)” berkesimpulan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya bertumpu pada pendekatan partisipatif pada semua pihak, penguatan kemampuan dan pendelegasian wewenang kepada masyarakat, aktualisasi institusi tradisi dalam pendayagunaan potensi diri dan sosial yang dimilikinya. Pilihan strategi pemberdayaan pada masyarakat secara transformatif di tingkat meso mendorong pencapaian keberdayaan komunitas yang dapat dilihat dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi komunitas dalam menangani masalah sosial dan kemiskinan di lingkungannya.

Menurut Adi (2008) bentuk pemberdayaan masyarakat dapat bervariasi, dimana berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 2.4. Relasi antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat



Menurut Green dan Haines (2002) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (*community development*) diperlukan suatu modal masyarakat (*community capital*) yang setidaknya terbangun atas lima modal, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal keuangan dan modal lingkungan. Adi (2008) menambahkan dua modal lagi yaitu modal teknologi dan modal spiritual.

Modal-modal tersebut merupakan aset yang melekat dalam setiap masyarakat, yang kadangkala dapat menjadi kelebihan atau sebaliknya dapat

merupakan kekurangan suatu masyarakat yang harus diperbaiki. Pengenalan dan adaptasi terhadap modal sosial yang ada akan mempermudah pelaku pemberdayaan masyarakat untuk dapat diterima dan melakukan perubahan di tengah masyarakat setempat. Hal inilah yang menyebabkan modal sosial menjadi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Terkait perilaku warga masyarakat di dalam dan antar kelompok, menurut J. Hasbullah (2006) terdapat dua pola hubungan yaitu *bonding* (mengikat) dan *bridging* (menjembatani). Sementara Aiyar dalam Adi (2008) mengemukakan tiga macam bentuk modal sosial, yaitu :

1. *Bonding capital* yang merupakan modal sosial yang mengikat anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu.
2. *Bridging capital* yang merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda; dan
3. *Linking capital* yang merupakan suatu ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya, dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya (*powerful people*), misalnya bank, polisi, dinas pertanian, dan sebagainya.

Aiyar dalam Adi (2008) mencoba menjembatani keterbatasan *bonding capital* dan *bridging capital* dengan konsep *linking capital*. Misalnya ketika pemerintah daerah menetapkan suatu retribusi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan argumen meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain masyarakat mendengar akan adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan pemerintah. Di sini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diuji, sebaliknya pemerintah diuji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ujian-ujian yang terjadi akibat adanya *linking capital* inilah yang dapat menentukan apakah *trust* yang ada dapat berkembang dengan baik, atau justru melemah. Di sinilah peran aturan dan norma dalam masyarakat menjadi modal dalam mempersatukan suatu komunitas.

Menurut Adi (2008), modal sosial bukan saja dapat mendukung proses pembangunan yang sedang berlangsung tetapi juga dapat melemahkan proses pembangunan yang ada. Sehubungan dengan *linking capital*, dalam contoh sehari-hari masyarakat masih sering mendengar adanya oknum yang melakukan penyimpangan, bahkan dalam sebuah program pengentasan kemiskinan. Hal seperti ini pada titik tertentu dapat menimbulkan antipati pada warga miskin sehingga mereka membuat norma tandingan dalam menyikapi program pemerintah. Misalnya, dengan anggapan bahwa uang pinjaman modal usaha dari pemerintah tidak perlu dikembalikan dan memanfaatkan pinjaman tidak sesuai peruntukannya. Rasa tidak percaya dari warga miskin ini akhirnya justru telah mengakibatkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik.

Pengenalan terhadap modal sosial akan mempermudah pelaku perubahan untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, pelaku perubahan juga dituntut untuk dapat mengadaptasi modal sosial yang ada sehingga ia dapat diterima oleh warga masyarakat dimana akan dilakukan proses pemberdayaan.

Dalam penelitian ini penulis melihat perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi masyarakat mengingat banyaknya program yang bersifat *top down* tidak kunjung mampu menyelesaikan masalah penanggulangan kemiskinan. Dan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan tersebut harus mempertimbangkan modal sosial yang ada di dalam diri masyarakat. Tidak hanya modal sosial dalam *bonding* dan *bridging* tetapi juga *linking capital* yang sangat menentukan akan adanya *mutual trust* atau rasa saling percaya antara masyarakat dengan penguasa. Konsep ini penting, mengingat saat ini telah berkembang luas ketidakpercayaan masyarakat pada penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah, yang berujung pada kegagalan program-program pemerintah di tahap pelaksanaan.

## **BAB 3**

### **SASARAN DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Sasaran Penelitian**

Sasaran utama penelitian adalah masyarakat lokal Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Yang dimaksudkan dengan masyarakat lokal disini adalah warga asli Sumurbatu yang telah lahir dan tinggal di wilayah ini secara turun temurun. Walaupun sasaran utama penelitian ini adalah masyarakat lokal, pengumpulan data dan informasi juga telah dilakukan terhadap komponen-komponen masyarakat yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari di wilayah kelurahan tersebut baik sebagai pengambil keputusan maupun dalam berbagai kepentingan lainnya. Demikian juga dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pilihan penelitian atas Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi ini, selain karena persyaratan akademis yang harus dipenuhi dan pertimbangan kepraktisan, terutama karena karakteristik masyarakat kelurahan ini yang spesifik jika dibandingkan daerah lain yang ada di Kota Bekasi. Kelurahan ini merupakan daerah pinggiran kota atau daerah transisi yang sedikit banyak gaya hidup masyarakatnya telah terpengaruh dengan gaya hidup perkotaan, namun demikian dipandang dari kualitas sumber daya manusia yang ada masih cenderung pada masyarakat pedesaan .

Terkumpulnya informasi tentang kondisi masyarakat lokal, tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendiskreditkan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Obyektifitas dalam penelitian ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial melalui gambaran yang utuh (*holistic*) dan mendalam. Prosedurnya sedikit subyektif dimana instrumen utama metode ini adalah diri peneliti sendiri. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat lokal dan

sempit, namun membutuhkan kedalaman dalam pemahamannya, sehingga memerlukan pendekatan yang mampu memahami situasi secara khusus terkait dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian.

### **3.2.1. Pendekatan Kualitatif**

*Bogdan dan Taylor* dalam Moleong (2007) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari *data (grounded theory)*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak ada teori a priori yang dapat mencakup kenyataan-kenyataan jamak yang mungkin dihadapi. Kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga berusaha untuk netral. Ketiga, teori dari dasar lebih responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.

Dengan menggunakan analisis induktif, berarti bahwa upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Namun penelitian ini tetap menggunakan data kuantitatif untuk memberikan gambaran umum daerah penelitian.

#### **3.2.1.1. Kegiatan Pra Survey**

Sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, telah dilakukan beberapa kegiatan persiapan, antara lain :

- Penyusunan proposal penelitian
- Studi literatur untuk memperdalam tujuan penelitian dan memfokuskan penelitian yang akan dilakukan



- Studi literatur yang terkait dengan lokasi penelitian
- Mengurus surat perijinan pada aparat pemerintahan setempat sebagai dasar melakukan penelitian lapangan di lokasi
- Penyusunan pedoman wawancara

### 3.2.1.2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) merupakan wawancara tak terstruktur yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi selengkap dan semendalam mungkin, dimana peneliti memerankan diri sebagai instrumen utama.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan pengambilan keputusan di wilayah setempat, masyarakat lokal yang tidak terkait pengambilan keputusan, para tokoh masyarakat, para pendatang yang telah lama menetap dan beberapa pihak lainnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat setempat, yaitu lurah dan staf kelurahan, tokoh masyarakat dari kalangan pendidik, petani, ketua LPM, ketua BKM, kader PKK dan posyandu, PPL, beberapa Ketua RT dan RW, pihak LSM yang telah lama melakukan pemberdayaan di wilayah setempat, kelompok pemuda, warga pemulung lokal, beberapa keluarga miskin penerima raskin dan BLT, beberapa keluarga petani, anggota kelompok petani, warga pendatang yang telah lama menetap. Juga beberapa informan dari luar wilayah ini tetapi berkaitan dengan tema yang diteliti.

### 3.2.2. *Participatory Rural Appraisal*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *PRA (Participatory Rural Appraisal)* karena metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi komunitas. *PRA* adalah suatu proses dimana komunitas akan menganalisis situasi yang mereka hadapi dan mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Menurut Chambers dalam Acuan Penerapan *PRA (1996)* *PRA* adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan

untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Dengan kata lain PRA merupakan salah satu cara yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pengumpulan data tentang masyarakat yang bersangkutan. Manfaatnya bagi masyarakat adalah menimbulkan proses belajar dan kesadaran tentang berbagai keadaan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi sehingga dapat mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan yang mengganggu.

Istilah PRA (*Participatory Rural Appraisal*) secara harfiah adalah “Penilaian / pengkajian / penelitian keadaan desa secara partisipatif”. Pengertian desa (*rural*) disini bukan berarti metode dan teknik-teknik PRA hanya sesuai untuk diterapkan di daerah *rural* / desa, tetapi juga di daerah kota atau daerah pertemuan antara desa dan kota. Dengan demikian akan lebih tepat bila PRA diartikan sebagai ”kajian masyarakat” daripada “kajian desa”.

Meskipun lokasi penelitian ini terletak di wilayah Kota Bekasi, penulis memilih metode ini dengan pemikiran bahwa istilah desa dan kota bukan sekedar menggambarkan lokasi berdasarkan struktur pemerintahan daerah atau sebagai satuan daerah administratif saja tetapi juga merujuk pada kondisi daerah serta gaya hidup masyarakat yang ada di daerah tersebut. Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu dapat dikatakan masih berkarakter masyarakat pedesaan yang sebagian besar masih bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan formal dan ketrampilan yang rendah

Karena PRA merupakan metode *assessment* yang berupaya mengoptimisasi aspirasi masyarakat, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ketika melakukan PRA, antara lain :

1. Prinsip mengutamakan mereka yang kurang beruntung atau terabaikan. Dari prinsip ini diharapkan pelaku akan dapat mengetahui cara pandang dan kondisi sebenarnya dari mereka yang berada pada kondisi yang kurang diuntungkan.

2. Prinsip pemberdayaan masyarakat (penguatan dan pembelajaran). Prinsip ini menekankan proses *assessment*, dan perencanaan program yang dilakukan dengan PRA ini merupakan suatu proses pemberdayaan yang intinya terjadi melalui proses pembelajaran orang dewasa.
3. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Pelaku harus mendorong terwujudnya perasaan saling menghargai perbedaan yang ada pada berbagai kelompok masyarakat dalam suatu komunitas.
4. Prinsip triangulasi, dalam proses PRA akan terjadi proses pengecekan ulang atas berbagai masukan yang ada guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang terjadi atau bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, dan bukan hanya berdasarkan masukan yang bersumber dari suatu kelompok tertentu.
5. Prinsip santai dan informal, saat menggali data dari masyarakat harus dengan santai sehingga suasana wawancara tidak menjadi formal dan menegangkan
6. Prinsip upaya mengoptimalkan hasil bagi masyarakat. Prinsip ini merupakan suatu yang harus sangat diperhatikan dalam suatu proses *assessment* yang partisipatif karena mereka membuat perencanaan pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
7. Prinsip keberlanjutan, *PRA* mengharapkan masyarakat akan belajar dan dapat melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan-kebutuhan mereka di masa yang akan datang secara berkelanjutan.
8. Prinsip orientasi praktis, *PRA* dilakukan bukan sekedar untuk mengumpulkan data dari masyarakat tetapi akan berlanjut dengan pengembangan upaya membantu masyarakat dalam mengatasi masalah.
9. Prinsip terbuka, artinya *PRA* sebagai metode dan perangkat teknik yang belum selesai, sempurna dan pasti benar. Diharapkan teknik-teknik yang ada senantiasa dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

Ada beberapa teknik dalam *PRA* sebagai metode Pengidentifikasian masalah dan potensi masyarakat secara kualitatif. Teknik-teknik *PRA* yang akan dilakukan adalah:

Tabel 3.1. Teknik-Teknik PRA

No.	Nama teknik	Penjelasan	Jenis informasi yang dikaji	Target Penelitian
1.	Teknik penelusuran sejarah desa	Mengkaji suatu keadaan dari waktu ke waktu (waktu tidak dibatasi)	Informasi umum, asal usul desa/penduduk yang merintis, perkembangan masyarakat dan tanggapan masyarakat atas berbagai masukan dan kegiatan pembinaan yang telah diterima serta masalah yang dihadapi serta berbagai alternatif pemecahan permasalahannya	Wawancara dengan tokoh masyarakat, <i>FGD (Focus Group Discussion)</i>
2.	Teknik pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan	Sama seperti no. 1 tetapi ada patokan waktu misal 5 tahun, 10 tahunan, dan sebagainya	Perubahan-perubahan keadaan di desa yang paling menonjol.	Wawancara tokoh masyarakat, <i>FGD</i>
3.	Teknik penyusunan kalender musim	Sama dengan no. 1 tetapi jarak dan waktu biasanya hanya satu tahun musim	Pola kegiatan masyarakat terutama pada kegiatan pertanian, juga pada kegiatan mata pencaharian yang lain	<i>FGD</i> , Wawancara dengan warga pemulung
4.	Teknik pembuatan bagan arus masukan dan keluaran	Dilakukan dengan mengamati langsung ke lokasi	Sumber daya alam yang terdapat di desa dan pemasaran hasil hasil pertanian	Wawancara dengan keluarga petani
5.	Diagram Venn (hubungan kelembagaan)	Untuk mengkaji sistem organisasi desa, bagaimana lembaga desa mengatur kehidupan masyarakat.	Memperlihatkan keberadaan lembaga-lembaga di desa, dan di luar desa yang hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat, fungsi, kegiatan-kegiatan, dan manfaat lembaga desa dalam kehidupan masyarakat, permasalahan dalam hubungan masyarakat dengan lembaga tersebut, serta mengkaji harapan-harapan mereka mengenai kegiatan lembaga dan bentuk hubungan yang sesuai dengan harapan. Melihat peran lembaga yang ada terhadap penurunan tingkat kemiskinan	<i>FGD</i> , wawancara dengan tokoh masyarakat, Ketua LPM, Ketua BKM, aparat kelurahan, Karang Taruna dan pengurus PKK
6.	Teknik kajian mata pencaharian/ nafkah	Biasanya mata pencaharian desa diurutkan berdasarkan yang paling banyak dilakukan masyarakat.	Mata pencaharian utama masyarakat, dan potensi pengembangan usahanya	Wawancara informan kunci, <i>FGD</i>
7.	Teknik pembuatan peta desa/pemetaan sosial	Mengkaji keadaan suatu ruang wilayah, biasanya wilayah desa atau per dusun	Melukiskan keadaan desa dan potensi yang dimiliki serta gambaran untuk situasi desa tentang peta umum wilayah, peta khusus seperti kepemilikan lahan, stratifikasi sosial/harta kekayaan, sumber daya alam.	<i>FGD</i>

### 3.2.3. Analisis Data

Pada proses analisis data, peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal*. Data yang terkumpul dari lapangan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, catatan hasil wawancara mendalam, peta desa, diagram venn kelembagaan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, artikel, data-data statistik dan sebagainya.

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorisasikan data-data yang terkumpul. Pegorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema spesifik yang akan dikembangkan sebagai fokus penelitian. Setelah diperoleh hasil identifikasi permasalahan dan potensi, peneliti melakukan analisa SWOT untuk memperoleh gambaran strategi yang tepat untuk kemudian dituangkan dalam suatu skenario *action plan*.

### 3.2.4. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang diperlukan dalam menilai suatu metode kualitatif. Dalam hal ini perlu diperhatikan antara lain : dalam analisis tergambaran pendekatan dan prosedur analisis data yang digunakan, peneliti memberikan alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian, peneliti juga harus menunjukkan suatu proses penyusunan tema, konsep dan teori dari pengolahan data. Peneliti juga diharapkan mampu menunjukkan fakta-fakta termasuk dari penelitian kualitatif dan kuantitatif sebelumnya.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan . Yang dilakukan adalah :

1. Perpanjangan keikutsertaan, karena peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, maka keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan itu tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian untuk menyediakan lingkup penelitian.

2. Konsisten dalam pengamatan, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
3. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu antara lain dengan jalan :
  - mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
  - mengeceknya dengan berbagai sumber data
  - memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan
4. Pemeriksaan silang antar informan mengenai permasalahan yang sama.
5. Klarifikasi prasangka peneliti
6. Mempertimbangkan berbagai masalah dari masukan informan
7. Menjelaskan bagaimana masukan informan telah digunakan dalam analisis dan interpretasi data.

### **3.3. Lokasi dan jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan hasil penelitian . Tahap persiapan dimulai bulan Maret 2009 , pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan April hingga Juli 2009, sementara penulisan laporan dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan akhir tahun 2009.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

##### **4.1.1. Administrasi Wilayah**

Kelurahan Sumurbatu memiliki wilayah seluas 568,9 hektar merupakan satu dari empat kelurahan di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi , Propinsi Jawa Barat. Kecamatan Bantargebang terletak di sebelah selatan Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Letaknya sangat strategis sebagai daerah lintas kabupaten maupun propinsi sehingga akses transportasi relatif mudah.

Kelurahan Sumurbatu berada di sebelah tenggara pusat pemerintahan kecamatan Bantargebang dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya, Bantargebang. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul ,Kecamatan Bantargebang. Jarak dari pusat pemerintahan kelurahan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Bantargebang adalah 3,5 kilometer. Sementara jarak ke pusat pemerintahan Kota Bekasi adalah 13 kilometer.

##### **4.1.2. Struktur Pemerintahan**

Struktur pemerintahan Kelurahan Sumurbatu sejak berubah dari desa menjadi kelurahan pada tanggal 19 April 2002, dipimpin oleh lurah dan dibantu staf kelurahan yang merupakan pegawai negeri sipil yang ditempatkan, bukan lagi oleh kepala desa yang dipilih oleh warga. Lurah dibantu oleh seorang Sekretaris Kelurahan dan empat kepala seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, terakhir adalah Seksi Kesejahteraan Sosial. Sekretaris kelurahan dan para kepala seksi masing-masing dibantu oleh beberapa staf pelaksana. Sebagian besar pegawai kelurahan ini bukanlah warga yang berdomisili di Kelurahan Sumurbatu. Sejak tahun 2002

hingga saat penelitian, Kelurahan Sumurbatu telah mengalami pergantian lurah sebanyak 4 kali, masing-masing lurah menjabat selama 2 tahun untuk kemudian dimutasi.

Berbeda dengan desa sebagai suatu wilayah administrasi yang memiliki otonomi, kelurahan adalah bawahan kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki otonomi. Kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Lurah selain dibantu oleh staf kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan seperti pengurus RW (rukun warga), pengurus RT (rukun tetangga) dan pengurus LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) yang dipilih langsung oleh warga. Ketiga lembaga ini dibentuk berdasar peraturan daerah Kota Bekasi nomor 4 tahun 2005.

Di wilayah kelurahan Sumurbatu terdapat 1 LPM dan 7 RW yang terdiri dari 42 RT dengan rincian sebagai berikut :

- RW 01 terdiri dari 5 RT
- RW 02 terdiri dari 4 RT
- RW 03 terdiri dari 4 RT
- RW 04 terdiri dari 3 RT
- RW 05 terdiri dari 3 RT
- RW 06 terdiri dari 12 RT
- RW 07 terdiri dari 11 RT

#### **4.1.3. Kondisi Geografis Wilayah**

Secara geografis Kecamatan Bantargebang dimana Kelurahan Sumurbatu termasuk di dalamnya, merupakan wilayah dataran yang berada pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Wilayah kecamatan Bantargebang terletak di sebelah selatan Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Bogor. Letaknya sangat strategis sebagai daerah lintas kabupaten maupun provinsi sehingga akses transportasi relatif mudah. Menurut data BPS

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan



Kota Bekasi tahun 2008 sebagian pabrik atau industri di Kota Bekasi berada di wilayah kecamatan Bantargebang namun tidak terpusat dalam satu kawasan Industrial seperti di kawasan Jababeka Cikarang.

#### **4.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Kelurahan Sumurbatu telah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai, jalan-jalan menuju rumah warga bahkan sudah banyak yang berlapis beton, sarana transportasi berupa mobil angkutan umum dan ojek motor cukup mudah didapat. Selain itu sebagian warga juga sudah memiliki kendaraan pribadi berupa sepeda motor.

Sarana pendidikan dasar sudah cukup memadai. Ada 3 Sekolah Dasar negeri yang terletak di wilayah kelurahan ini dan juga beberapa SDN lain di kelurahan tetangga yang jaraknya relatif dekat dan dilalui angkutan umum yang sama, adapula Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, sudah ada satu sekolah menengah pertama negeri di wilayah ini yaitu SMPN 27.

Air bersih cukup mudah didapat, hampir setiap rumah- bahkan rumah warga miskin penerima BLT sekalipun- memiliki pompa mesin dengan sumber air tanah, meskipun masih ada juga yang menggunakan sumur terbuka. Khusus untuk warga yang lokasi rumahnya kurang dari 200 meter dari TPA (tempat pembuangan akhir) sampah, air tanahnya sudah tercemar dan tidak lagi dapat diminum. Di lokasi yang air tanahnya tercemar, warga memilih untuk menggunakan air mineral atau air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air minum. Terdapat pula 2 sumur artesis yang dibuat oleh LPM dan dialirkan ke rumah-rumah warga, 1 unit terletak di RW 03 untuk warga RW 01, 02 dan 03, 1 unit lagi terletak di RW 04 untuk warga RW 04 dan 05. Sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sudah cukup memadai, hampir setiap rumah memiliki fasilitas MCK sendiri. Hal ini antara lain juga berkat adanya proyek fisik P2KP. Beberapa warga yang tidak memiliki jamban dengan *septik tank*, membuat jamban sederhana di atas kolam ikan.

Hampir seluruh warga di kelurahan ini juga sudah menikmati listrik. Fasilitas telekomunikasi seperti televisi dan telepon genggam juga bukan barang yang asing bagi warga Kelurahan Sumurbatu.

Prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Sumurbatu berupa puskesmas pembantu dan poliklinik swasta sudah cukup memadai. Selain itu, terdapat 1 Puskesmas tingkat Kecamatan di Bantargebang dengan fasilitas rawat inap yang hanya berjarak 3,5 kilometer dari wilayah Sumurbatu. Puskesmas kecamatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh warga resmi Kelurahan Sumurbatu sebagai bentuk kompensasi atas keberadaan TPST Bantargebang di wilayahnya. Cukup dengan menunjukkan KTP Sumurbatu warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis.

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumurbatu

Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
Jalan beton / aspal	16,9 Km	
TK	2 unit	
SD	3 unit	Negeri
SMP	1 unit	Negeri
SMA	1 unit	SMK milik swasta
Madrasah Ibtidaiyah	2 unit	Swasta
Masjid	5 unit	
Musholla	21 unit	
Majelis Ta'lim	25 kelompok	
Puskesmas Pembantu	1 unit	
Poliklinik	4 unit	Swasta
Apotik	1 unit	Swasta
Rumah bersalin	2 unit	Swasta
Sumur artesis	2 unit	Milik warga dari dana kompensasi

Sumber : Laporan Kelurahan Sumurbatu

Sarana prasarana ibadah adalah berupa masjid dan musholla. Tidak ada gereja, wihara maupun pura di wilayah ini mengingat mayoritas penduduknya memang beragama Islam.

#### 4.1.5. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Sumurbatu menurut catatan terakhir tahun 2009 di kantor lurah Sumurbatu sebanyak 9.636 jiwa.<sup>2</sup> Dengan kepadatan penduduk sekitar 1.382 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan Sumurbatu merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah di kecamatan Bantargebang, bahkan lebih rendah dari angka rata-rata di kecamatan Bantargebang yaitu sebesar 3.367 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per Kelurahan di kecamatan Bantargebang tahun 2007.

No	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		Kepadatan (jiwa/ km <sup>2</sup> )
			(jiwa)	(%)	
1.	Ciketing Udik	4.853	16.668	24,77	3.434
2.	Sumurbatu	5.689	7.863	11,69	1.382
3.	Cikiwul	5.253	17.524	26,04	3.335
4.	Bantargebang	4.185	25.230	37,50	6.029
	Jumlah		67.285	100,00	3.367

Sumber: BPS Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang dalam Angka, tahun 2007

Sedangkan menurut kelompok umur, komposisi penduduk Kecamatan Bantargebang terbanyak adalah penduduk berusia muda (usia produktif) yaitu berasal dari kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 11.336 orang, disusul kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 9.896 orang. Sementara penduduk yang berusia 55 tahun ke atas hanya berjumlah 2.800 orang. Dari komposisi tersebut tampak bahwa penduduk Kecamatan Bantargebang didominasi oleh penduduk usia muda. Rincian selengkapnya lihat lampiran 4.

Sebagai daerah pinggiran atau desa transisi, penduduk di Kelurahan Sumurbatu terdiri dari dua kelompok yaitu masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang dapat dibedakan lagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah pendatang yang tinggal di kompleks-komplek

<sup>2</sup> Terdapat perbedaan jumlah penduduk dengan data BPS karena data terakhir yang tersedia di BPS adalah untuk tahun 2007

perumahan dan secara administratif tercatat di kantor lurah, umumnya bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta . Kelompok kedua adalah pendatang yang bekerja sebagai pemulung di TPA , umumnya tinggal di gubuk-gubuk liar yang kumuh di dalam lokasi TPA atau di luar lokasi tetapi masih berbatasan. Kelompok ini merupakan penduduk musiman dan secara administratif tidak tercatat di kantor Lurah. Jumlah pemulung pendatang ini mencapai kurang lebih 6.000 orang.

Masyarakat lokal pada umumnya adalah campuran antara suku Sunda dan Betawi yang cenderung menetap , tidak mau pindah atau merantau dari wilayah ini, bagaimanapun sulitnya kondisi ekonomi di wilayah setempat.

#### **4.1.5.1. Kemasyarakatan**

Di Kelurahan Sumurbatu tidak terdapat lembaga yang memiliki peran adat secara khusus. Kelompok yang berkembang dimasyarakat biasanya berkaitan dengan organisasi masyarakat atau kegiatan keagamaan seperti kelompok-kelompok pengajian atau majelis ta'lim ada yang khusus untuk kaum laki-laki dan ada untuk kaum wanita.

Hubungan antara masyarakat lokal dengan pendatang cukup harmonis. Meskipun diakui bahwa warga pendatang di komplek perumahan cenderung membentuk suatu komunitas dengan permasalahannya sendiri, tetapi selama ini tidak pernah terjadi konflik antara keduanya. Secara individual ada sebagian yang berbaur dan berinteraksi aktif dengan masyarakat lokal. Sementara warga pemulung pendatang yang tinggal di dalam lokasi TPA cenderung memisahkan diri dan tidak berbaur dengan masyarakat lokal. Seperti halnya warga komplek, pemulung juga memiliki komunitas tersendiri sesuai dengan daerah asal pemulung, namun saat ini tidak ada konflik antara pemulung dengan masyarakat lokal.

Meski tidak ada konflik dengan pendatang, satu hal yang muncul dari diskusi kelompok adalah menurunnya rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Menurut bahasa mereka saat ini “ *masyarakat menjalani hidupnya masing-masing, di saat susah berteman, di saat senang masing-masing* “. Artinya, ketika susah berbagi penderitaan dengan orang lain, tetapi ketika mendapat kesenangan

hanya dinikmati sendiri. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dana kompensasi sampah dimana hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana tersebut. Timbul kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan juga sikap apatis terhadap peran LPM selaku pengelola dana kompensasi akibat banyaknya penyimpangan yang terjadi di masa lalu.

#### 4.1.5.2. Agama

Mayoritas penduduk di kelurahan ini adalah pemeluk agama Islam. Data Kelurahan Sumurbatu tahun 2006 menyebutkan 99,3 persen penduduk Kelurahan Sumurbatu beragama Islam dan sisanya beragama Kristen ( $\pm$  52 jiwa). Tidak ada penduduk yang beragama Hindu dan Budha.

Kegiatan agama berupa pengajian sangat marak di sini. Ada pengajian setiap malam jumat berupa tahlilan, lalu kajian untuk bapak-bapak dua kali dalam seminggu, juga ada pengajian khusus untuk ibu-ibu yang sudah terjadwal secara rutin. Namun bagi kebanyakan warga, agama masih sebatas formalitas dan belum menyentuh pada pemahaman, apalagi pengamalan nilai-nilai Islam. Contohnya saat wawancara dengan warga penerima BLT juga terungkap bahwa sang ibu buta huruf latin maupun Al-Qur'an, padahal yang bersangkutan rajin mengikuti "pengajian".

Contoh formalitas agama yang lain pelaksanaan kewajiban ibadah haji pun seringkali tidak menunjukkan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama namun hanya demi *prestise*, karena seorang yang berpredikat "haji" akan mendapatkan penghormatan dan disegani di tengah masyarakat. Akibatnya, tidak jarang pula terjadi pelanggaran nilai-nilai agama yang dilakukan oleh orang yang berpredikat "haji" tersebut. Hal ini berpengaruh kepada masyarakat umumnya karena kehilangan figur tokoh agama yang dapat menjadi panutan.

Sejak lama, di kelurahan ini ada seorang tokoh agama yang cukup berpengaruh dan memiliki sekolah informal berbentuk madrasah, namun dalam penyampaian ajaran agama sangat tradisional dan cenderung eksklusif. Saat ini, pengaruhnya masih ada dan tersebar di beberapa RW. Sebagian masyarakat yang merasa tidak sepaham dengan tokoh agama ini dan tidak mengikuti ajarannya, tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang dipimpin oleh tokoh

tersebut. Misalnya, laki-laki yang tidak memakai sarung tidak boleh ikut sholat di mesjid yang ia pimpin. Pemahaman agama yang cenderung formalitas dan tradisional ini tidak mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apalagi dari wawancara diketahui bahwa dalam pengajian-pengajian tidak pernah dibahas mengenai masalah ekonomi karena pemahaman yang ada bahwa memikirkan harta berarti cinta dunia (*hubbud-dunya*), sesuatu yang – menurut tokoh agama tadi - dilarang dalam agama Islam.

Saat ini, sebenarnya sudah mulai muncul beberapa tokoh agama (ustad) dari generasi yang lebih muda dengan pemikiran-pemikiran yang sudah lebih maju. Selain itu, tokoh-tokoh agama tadi juga mampu berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini adalah Lurah dan aparatnya.

#### 4.1.5.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat lokal di wilayah ini tergolong rendah. Di masa lalu masyarakat petani menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Anak-anak petani sudah meninggalkan sekolah sebelum tamat sekolah dasar karena tenaganya dibutuhkan untuk membantu pekerjaan orang tuanya di sawah dan ladang. Di samping itu, lokasi sekolah yang jauh ditambah kondisi jalan menuju ke sekolah yang tidak memadai membuat minat masyarakat saat itu untuk menyekolahkan anaknya semakin rendah.

Tingkat pendidikan masyarakat setempat tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sumurbatu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak tamat SD	615
2	Sedang sekolah di SD	822
3	Tamat SD / sederajat	3.800
4	Tamat SLTP / sederajat	1.102
5	Tamat SLTA / sederajat	1.733
6	Akademi D1 – D2	25
7	Universitas	71
	Jumlah	8.168

Sumber : Laporan Kelurahan Sumurbatu Tahun 2008

Saat ini pendidikan dasar meliputi SD dan SMP di Kota Bekasi sudah gratis. Tingkat partisipasi sekolah anak pun sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian orang tua mulai menganggap pendidikan itu penting, meski baru sebatas agar anak-anaknya kelak dapat diterima bekerja di PT atau perusahaan atau jika lebih beruntung dapat menjadi pegawai negeri. Pendidikan belum dipandang sebagai suatu proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, dukungan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya masih sangat rendah, bisa jadi karena tingkat pendidikan para orang tua yang juga rendah. Tanggung jawab pendidikan sepenuhnya masih diserahkan pada pihak sekolah.

#### **4.1.5.4. Kesehatan**

Masyarakat Kelurahan Sumurbatu sebagaimana di dua Kelurahan lain di Kecamatan Bantargebang yaitu Cikiwul dan Ciketing Udik yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi TPST, rawan terhadap penyakit *tuberculosis* (TBC) (Koran tempo, 2004). Namun, masyarakat cukup terbantu dengan adanya fasilitas kesehatan gratis mulai dari puskesmas pembantu, puskesmas kecamatan dan rawat inap di rumah sakit umum daerah sebagai kompensasi sampah.

Mengenai kesehatan lingkungan masyarakat lokal, keadaan warga petani sangat berbeda dengan keadaan warga pemulung atau pengepul. Pada warga petani, kesehatan lingkungan relatif baik, terdapat sarana sanitasi seperti MCK baik dengan *septic tank* maupun jamban di atas kolam ikan, sumber air bersih dari air tanah baik berupa sumur terbuka ataupun sumur tertutup dengan mesin, lingkungan rumah pun bersih dari sampah, udara masih segar karena banyak tanah kebun yang ditanami berbagai macam pohon-pohonan terutama pohon rambutan dan pohon melinjo. Beberapa petani yang memelihara bebek ataupun memelihara hewan ternak seperti kambing dan sapi sudah memisahkan antara kandang dengan rumah.

Tetapi pada warga pemulung dan pengepul, kesehatan lingkungan dapat dikatakan sangat buruk. Lingkungan rumah hampir tidak dapat dibedakan dengan

tempat sampah karena banyaknya sampah hasil “ngorek”<sup>3</sup> yang ditumpuk di halaman rumah atau di dapur yang berlantai tanah. Alasan mereka, sampah tersebut adalah barang berharga karena memiliki nilai uang sehingga harus disimpan di tempat yang bisa diawasi agar tidak hilang. Rata-rata hasil ngorek baru disetor ke pengepul seminggu sekali.

Warga yang sudah berada di tingkat ekonomi lebih tinggi sebagai pengepul kondisinya juga tidak jauh berbeda. Justru di rumah pengepul lebih banyak lagi tumpukan sampah yang siap disetor ke bos besar untuk kemudian dibawa ke pabrik. Namun demikian, tumpukan sampah, bau sampah dan kerumunan alat tampaknya sudah menjadi bagian dari diri mereka. Mereka bahkan tidak segan tidur di atas tumpukan sampah yang siap kirim. Demikian pula ketika wawancara dengan seorang pengepul dan beberapa anggota keluarganya, mereka tetap bisa menikmati makanan dan minuman sementara alat yang hinggap di piring dan gelas tidak terhitung banyaknya. Meskipun demikian mereka mengaku jarang menderita sakit.

#### **4.1.5.5. Mata Pencaharian Masyarakat**

Mata pencaharian masyarakat sudah heterogen sesuai dengan kondisi demografis. Masyarakat lokal terutama di RW 02, RW 04, dan RW 05 masih banyak yang bekerja di sektor pertanian, namun masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi yang berbatasan dengan lokasi TPA sampah di wilayah RW 01 dan RW 03 sudah banyak yang beralih dari pertanian ke usaha pengolahan sampah, baik sebagai pemulung/pengorek, penyobek, maupun pengepul.<sup>4</sup> Hal ini tidak terlepas dari hilangnya lahan pertanian di wilayah mereka. Sementara masyarakat pendatang yang tinggal di komplek-komplek perumahan di RW 06 dan RW 07 umumnya bekerja sebagai pegawai atau karyawan baik di pemerintahan maupun swasta dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dilihat dari aspek ekonomi maupun non ekonomi.

<sup>3</sup> Ngorek adalah sebutan untuk pekerjaan mengais sampah langsung di lokasi TPA

<sup>4</sup> Penyobek = sebutan untuk orang yang bekerja menyobek sampah-sampah plastik yang sudah terkumpul di pengepul, lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita. Pengepul = sebutan untuk orang yang membeli sampah dari pengorek, merupakan perantara dengan bos / tengkulak yang akan menjualnya kepada pabrikan



Berdasarkan data dari kelurahan, mata pencaharian atau lapangan pekerjaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Lapangan pekerjaan penduduk Kelurahan Sumurbatu

No.	Mata pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase
1.	PNS	381 orang	9,26
2.	Karyawan swasta	674 orang	16,38
3.	Petani	1.223 orang	29,72
4.	Pertukangan	203 orang	4,93
5.	Pemulung	415 orang	10,08
6.	Buruh tidak tetap	574 orang	13,95
7.	TNI/POLRI	27 orang	0,66
8.	Pensiunan ABRI/sipil	62 orang	1,51
9.	Pedagang	317 orang	7,70
10.	Jasa angkutan	239 orang	5,81
	Jumlah	4.115 orang	100,00

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Sumurbatu tahun 2008

Mata pencaharian masyarakat Sumurbatu yang terbanyak masih berada di sektor pertanian sebesar 29,72 persen, disusul oleh karyawan swasta 16,38 persen dan buruh tidak tetap sebesar 13,95 persen.

Hal ini sejalan dengan masih tersedianya lahan pertanian berupa sawah dan kebun di wilayah ini. Dari keseluruhan lahan di Kelurahan Sumurbatu seluas 568,95 hektar , luas lahan yang masih digunakan untuk pertanian mencapai 375,65 hektar terdiri dari sawah tadah hujan 138 hektar ditambah tanah kebun/tegalan 237,65 hektar atau mencapai 66,03 persen. Sementara lahan yang menjadi lokasi tempat pembuangan sampah luasnya 37 hektar, terdiri dari TPA sampah DKI Jakarta 27 hektar dan TPA Kota Bekasi 10 hektar atau hanya 6,51 persen. Ditambah dengan lahan permukiman penduduk seluas 123 hektar atau hanya 21,62 persen.

Selengkapnya rincian peruntukan tanah seluas 5.689 km<sup>2</sup> atau 568,9 ha di Kelurahan Sumurbatu dapat dilihat di tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Peruntukan tanah di Kelurahan Sumurbatu

No	Peruntukan tanah	Luas (ha)	Persentase
1	Tanah pemukiman penduduk	123,00	21,62
2	Tanah Perkantoran	3,50	0,61
3	Tanah pemakaman umum	22,00	3,87
4	Tanah Perusahaan/industri	2,00	0,35
5	Tanah sawah tadah hujan/milik perorangan	138,00	24,26
6	Tanah irigasi	0,80	0,14
7	Tanah TPA sampah DKI	27,00	4,75
8	Tanah TPA sampah Kota Bekasi	10,00	1,76
9	Tanah sarana pendidikan	1,00	0,17
10	Tanah tegalan/kebun	237,65	41,77
11	Tanah lapangan dan sarana jalan	4,00	0,70
Jumlah		568,95	100

*Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Sumurbatu tahun 2008*

Mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Sumurbatu berbeda jika dibandingkan dengan 3 kelurahan lain yang ada di Kecamatan Bantargebang. Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bantargebang secara keseluruhan yang terbanyak adalah bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran, disusul sektor industri dan sektor konstruksi. Sementara di Kelurahan Sumurbatu, mata pencaharian penduduk yang terbanyak adalah di sektor pertanian. Rincian selengkapnya lihat lampiran 4 .

Di wilayah Kecamatan Bantargebang terdapat banyak perusahaan industri. Menurut data statistik tahun 2007 terdapat 91 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 16.874 orang. Namun, kebanyakan angkatan kerja di Kelurahan Sumurbatu tidak terserap di sektor industri karena sumber daya manusia yang rendah sebagian besar hanya berpendidikan SD atau SMP, sementara pendidikan minimal yang disyaratkan di perusahaan adalah setingkat SMA.

#### **4.2. Sejarah Daerah**

Desa Sumurbatu secara administratif lahir pada tahun 1957 , merupakan gabungan dari 3 kemandoran yaitu Kemandoran Ciketing Megrek, Ciketing Ilir

dan Ciketing Udik. Nama Sumurbatu diambil dari nama sebuah Kramat, yaitu Kramat Sumurbatu yang artinya sumber air yang keluar dari batu. Pada tahun 1957 s.d tahun 1982 Desa Sumurbatu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Tahun 1982 Kecamatan Setu dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Setu dan Kecamatan Bantargebang, sejak itu Desa Sumurbatu termasuk salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bantargebang. Tahun 1984 Desa Sumurbatu dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Sumurbatu dan Desa Ciketing Udik. Dan mulai tanggal 19 April 2002 Desa Sumurbatu resmi berubah menjadi Kelurahan Sumurbatu.

Sejak lama mata pencaharian utama warga Sumurbatu adalah petani dengan sistem pertanian sawah tadah hujan, namun sebelum tahun 1970-an petani hanya dapat satu kali menanam padi dalam setahun karena menggunakan padi tinggi yang umurnya mencapai 7 bulan. Warga juga melakukan “nderep” atau menjadi buruh panen ke daerah-daerah pertanian lain di luar Sumurbatu untuk mendapatkan upah kerja. Tahun 1960-an sebagaimana daerah lainnya di Indonesia warga Sumurbatu pernah mengalami kondisi kelaparan dan kekurangan. Warga hanya bisa makan singkong kering dan jagung.

Sarana pendidikan saat itu masih sangat kurang, hanya ada satu sekolah rakyat atau SR dengan jumlah siswa kurang dari 50 orang. Bahkan ada 1 kelas yang hanya berisi 5 siswa. Sangat jarang anak yang sekolah karena lokasinya yang jauh dari tempat tinggal ditambah kondisi jalan masih jalan tanah. Para orang tua pun tidak menganggap penting pendidikan. Anak-anak hanya disekolahkan di SR dan kebanyakan tidak sampai tamat karena tenaganya dibutuhkan untuk membantu menggarap sawah dan ladang.

Sarana transportasi sangat terbatas, baik jalan maupun angkutan. Jalan masih berupa jalan tanah dan angkutan hanya menggunakan “roda” yaitu gerobak yang ditarik sapi, atau berjalan kaki. Jika musim hujan, ada pula transportasi air dengan “getek” atau rakit melalui sungai “kali Asem” yang mengalir dari Sumurbatu hingga ke Tambun. Saat ini kali Asem tersebut lebih mirip selokan dibanding sungai karena telah mengalami penyempitan dan pencemaran.

Tahun 1970-an mulai terasa adanya perubahan, baik di bidang pendidikan maupun ekonomi. Setelah adanya Inpres berdirilah SDN 02 Sumurbatu, SR yang

sudah ada sebelumnya menjadi SDN 01 Sumurbatu. Di bidang pertanian mulai ada PPL atau penyuluh pertanian lapangan, tetapi keberadaannya tidak serta merta membawa perubahan pada kemajuan teknologi pertanian di Sumurbatu karena petani yang tidak percaya dengan penyuluhan yang diberikan sebelum melihat bukti keberhasilan. Misalnya untuk penggunaan bibit padi jenis baru dengan masa panen yang lebih singkat sehingga petani dapat menanam 2 kali dalam setahun. Petani di Sumurbatu akhirnya mau menggunakan bibit jenis baru tersebut setelah mendengar dan melihat keberhasilan di tempat lain, bukan karena mengikuti PPL. Sampai saat ini masih ada anggapan di masyarakat petani bahwa PPL hanya pandai berteori tetapi belum tentu terbukti.

Pada periode ini mulai ada warga Sumurbatu yang berpendidikan SMP dan diterima sebagai pegawai negeri (guru). Hal ini ternyata mempengaruhi warga Sumurbatu lainnya, sehingga lebih bersemangat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang SMP karena berharap dengan sekolah lanjutan, anak-anak mereka kelak akan dapat menjadi pegawai juga. Pada saat itu Sekolah Lanjutan yang terdekat adalah SPG C1 dan SPMP (Sekolah Pertanian Menengah Pertama) yang gedungnya saat ini telah dialih fungsikan menjadi Kantor Lurah Sumurbatu.

Dari sisi ekonomi tidak banyak perubahan yang terjadi di Desa Sumurbatu, warga masih bergantung pada pertanian sawah tadah hujan. Harga 1 hektar tanah pada saat itu hanya Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan umumnya warga masih memiliki tanah yang cukup luas.

Tahun 1980-an harga tanah di Desa Sumurbatu mulai naik, 1 meter persegi dihargai Rp 250 – Rp 300 yang berarti harga 1 hektar tanah mencapai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kenaikan harga ini terjadi seiring dengan pembangunan kompleks perumahan di wilayah setempat. Suasana pedesaan yang masih asri di lokasi penelitian pada saat itu, mengundang keinginan orang-orang kota seperti Jakarta untuk membeli tanah. Masyarakat lokal pemilik tanah mulai terdorong untuk menjual tanah-tanahnya.

Tahun 1982 terjadi pemekaran Kecamatan Setu menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Setu dan Kecamatan Bantargebang. Rata-rata penduduk di Kelurahan ini masih warga asli Sumurbatu, belum ada penduduk pendatang.

Penjualan tanah oleh warga terus terjadi secara besar-besaran , terutama pada tahun 1987-1988. Ada yang melakukannya untuk kebutuhan konsumtif, seperti untuk berangkat haji, mengadakan pesta pernikahan anak, membeli sepeda motor, bahkan untuk membiayai pencalonan kepala desa . Tetapi hal lain yang mendorong warga untuk menjual tanah secara masal adalah makelar-makelar tanah yang berkeliaran di Sumurbatu dan membujuk warga agar mau menjual tanahnya. Saat itu warga hanya memiliki bukti berupa girik saja.

Pada saat itu pembangunan di Ibukota Jakarta memerlukan banyak tanah urugan. Gayung bersambut, warga yang merasa diuntungkan rela menjual tanah-tanahnya dalam jumlah besar . Tetapi, pada tahun 1986 tanpa sepengetahuan warga, tanah yang tadinya merupakan lahan galian tanah untuk kepentingan pengurangan pada pembangunan beberapa perumahan di Jakarta seperti Sunter, Podomoro dan Kelapa Gading serta perbaikan jalan di Narogong berubah menjadi TPA (tempat pembuangan akhir) sampah bagi Pemda DKI. Pemulung yang umumnya berasal dari Indramayu dan daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Karawang mulai hadir di Desa Sumurbatu bersamaan dengan dibukanya TPA Bantargebang. Bahkan lama kelamaan hingga saat ini banyak masyarakat lokal Sumurbatu yang ikut menekuni usaha sampah ini. Saat itu jalan di Sumurbatu masih berupa jalan tanah. Listrik mulai masuk ke wilayah ini sekitar tahun 1992 setelah tempat pembuangan akhir sampah mulai beroperasi.

Bidang pendidikan sempat mengalami kemajuan ketika pemerintah menggalakkan pemberantasan buta huruf dengan menyelenggarakan Kejar Paket A, B dan C. Di Desa Sumurbatu , program ini berjalan dengan baik dimana penggeraknya adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sebagai mitra lurah. Namun sekarang lembaga ini sudah tidak ada , diganti dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang tidak berfungsi sebagaimana LKMD dahulu, tetapi hanya menangani dana kompensasi sampah saja.

Sampai saat ini, masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian, tetapi kebanyakan hanyalah petani penggarap, sementara tanah-tanah pertanian sudah bukan milik petani.

### 4.3. Dinamika Kehidupan Masyarakat Saat Ini

Dinamika kehidupan masyarakat saat ini adalah kecenderungan yang menjadi gejala pada masyarakat setempat yang dapat ditangkap oleh penulis. Sub bab ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan beberapa hal di wilayah ini yang patut mendapat perhatian khusus.

#### 4.3.1. Pendidikan dan Kesehatan

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di masa lalu menyebabkan sumber daya manusia lokal yang ada saat ini cenderung rendah. Saat diskusi kelompok dengan petani yang dihadiri 20 orang, tidak ada satupun yang berpendidikan lebih dari sekolah dasar, sebagian besar tidak tamat SD bahkan ada yang buta huruf. Demikian pula ketika diskusi kelompok dengan 9 pemuda berusia 20 – 30 tahun, hanya satu orang berpendidikan setingkat SMP, satu orang tidak pernah bersekolah dan buta huruf, sisanya pernah bersekolah di tingkat SD, ada yang tamat dan ada yang putus sekolah.

Sejak pergantian kepemimpinan di tahun 2008, Pemerintah Kota Bekasi mengubah visi daerahnya dari visi “Bekasi Kota Unggul Dalam Jasa dan Perdagangan Bernuansa Ihsan” menjadi visi “Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan” yang menunjukkan komitmen pemimpin yang baru untuk memajukan pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi.<sup>5</sup> Bukti nyata dari komitmen ini adalah pendidikan dasar gratis di Kota Bekasi mulai tahun 2009.

Meskipun demikian, pendidikan masih menjadi permasalahan besar di wilayah Sumurbatu. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini pendidikan belum menjadi prioritas dan kebanyakan para orang tua kurang bersemangat menyekolahkan anak-anak mereka, terutama terjadi pada keluarga miskin atau sangat miskin. Jika terjadi sedikit saja guncangan ekonomi keluarga, maka yang dikorbankan lebih dahulu adalah pendidikan anak-anak.

Fakta tersebut terungkap dari hasil wawancara sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kota Bekasi

1. Satu keluarga penerima BLT dengan 5 anak, 2 anak perempuannya menikah setelah lulus SD, satu anak lelaki putus sekolah di kelas 2 SMP swasta, karena pada saat kenaikan kelas dan harus membayar biaya administrasi sekolah sebesar Rp 300.000, bertepatan dengan saat sang ibu melahirkan anak yang ke 5 dan membutuhkan biaya persalinan sebesar Rp 200.000. Uang yang sedianya disiapkan untuk membayar sekolah terpakai untuk membiayai persalinan dan “solusinya” adalah anak berhenti sekolah. Sang ibu sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan, buta huruf dan tidak tahu apakah suaminya pernah bersekolah atau tidak.
2. Seorang remaja putri usia 14 tahun yang saat ini bekerja menjaga warung nasi, setahun lalu setelah lulus SD ia tidak melanjutkan pendidikan karena ayahnya meninggal. Saat ini ibunya sudah menikah lagi, biaya pendidikan dasar di Kota Bekasi pun sudah gratis, tetapi remaja putri tersebut tetap tidak melanjutkan sekolahnya.
3. Sebuah keluarga pemulung yang memiliki 5 anak, anak pertama laki-laki baru lulus SD di tahun 2009, 2 anak perempuan masih bersekolah di SD, dan 2 lagi anak laki-laki yang masih balita. Anak pertama yang baru lulus SD tersebut sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah tetapi ikut bekerja membantu ayahnya sebagai pemulung. Sementara, si anak memiliki nilai yang baik dan masih berkeinginan untuk sekolah, biaya pendidikan dasar gratis dan SMP negeri hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah mereka.

Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan sebagai hal yang penting, barulah sebatas modal untuk dapat diterima bekerja di Perusahaan Industri (PT) yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Bantargebang. Perhatian orangtua terhadap pendidikan anaknya pun sangat kurang, hal ini mungkin disebabkan tingkat pendidikan para orangtua yang rata-rata juga rendah yaitu tamat SD atau lebih rendah. Orang tua semata-mata hanya mengandalkan sekolah sehingga prestasi akademik siswa cenderung rendah. Contohnya, tidak semua lulusan SD dari Kelurahan Sumurbatu yang ingin melanjutkan pendidikan dapat diterima di SMPN 27 akibat kalah bersaing dengan siswa dari luar Sumurbatu yang memiliki nilai lebih tinggi, sehingga terpaksa

meneruskan sekolah di SMP swasta yang lokasinya lebih jauh dan tentunya dengan biaya lebih tinggi. Namun untuk hal-hal yang mengandalkan kekuatan fisik seperti olahraga, prestasi siswa cukup menonjol bahkan hingga tingkat Kota Bekasi. Dari diskusi kelompok diperoleh informasi bahwa anak-anak yang lahir setelah tahun 1990 (saat ini di bawah 20 tahun) umumnya memiliki pendidikan yang sudah lebih baik.

Dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2009 telah mendapat penghargaan piagam Adipura sebagai *Best Effort* setelah sebelumnya 3 tahun berturut-turut mendapat predikat kota terkotor. Oleh walikota, seluruh aparat pemerintahan baik kepala dinas terkait maupun camat, diberi pilihan untuk membuat pernyataan mundur kalau mendapat predikat terkotor kembali (Poskota, 2009). Komitmen walikota ini juga turut dirasakan di Kelurahan Sumurbatu, dimana setiap hari sabtu seluruh warga harus melakukan kegiatan K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban) di lingkungan masing-masing.

Kesehatan masyarakat secara umum relatif baik karena di kelurahan ini sejak lama sudah tersedia layanan kesehatan gratis. Posyandu bagi ibu-ibu dan balita pun sudah ada di setiap RW. Masyarakat yang rentan terhadap penyakit paru-paru maupun penyakit kulit terutama adalah mereka yang tinggal di perbatasan lokasi TPA sampah atau bekerja sebagai pemulung. Dalam laporan kelurahan tahun 2008 dari 1.063 orang balita yang ada, hanya 1 orang yang mengalami gizi buruk. Dari hasil penelusuran di lapangan, balita yang menderita gizi buruk ternyata adalah anak seorang pemulung dengan ibu penderita TBC. Lingkungan rumahnya memang sangat kumuh karena tumpukan sampah, dan kesadaran keluarga ini akan kesehatan masih sangat rendah. Menurut kader posyandu yang mendampingi penulis, bidan puskesmas bahkan harus datang ke rumah ini untuk memberikan obat rutin TBC kepada si ibu, karena yang bersangkutan tidak bersedia datang ke puskesmas dengan alasan tidak ada uang transport. Kesadaran masyarakat pemulung akan kesehatan yang rendah seperti inilah yang perlu segera diperbaiki.



### 4.3.2. Perekonomian Masyarakat

Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat kelurahan Sumurbatu lebih rendah dibanding warga kelurahan lain yang ada di Bantargebang. Jika mengacu pada kriteria miskin versi BKKBN, Kelurahan ini memiliki jumlah keluarga miskin (pra KS + KS I) tertinggi yang disebabkan karena alasan ekonomi.

Hal itu terlihat dari hasil pentahapan keluarga sejahtera di Kecamatan Bantargebang sebagai berikut :

Tabel 4.6. Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Bantargebang

No	Kelurahan	Pra KS		KS I		KS II	KS III	KS III+	Jumlah KK
		Alasan Ekonomi	Bukan Alasan Ekonomi	Alasan Ekonomi	Bukan Alasan Ekonomi				
1.	Ciketing Udik	115	98	216	129	1.399	1.151	890	3.998
2.	Sumurbatu	312	273	526	161	433	156	17	1.878
3.	Cikiwul	76	28	532	285	1.049	1.555	727	4.297
4.	Bantar Gebang	32	25	254	162	3.663	1.766	230	6.132
Jumlah		535	424	1528	737	6.544	4.628	1.864	16.305

Sumber : BPS Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang dalam Angka Tahun 2007

Di masa lalu mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani dengan sistem tadah hujan yang sederhana. Tingkat pendidikan masyarakatnya rendah sebatas pendidikan dasar. Sementara itu, sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan industri di Kota Bekasi , Kecamatan Bantargebang menjadi kawasan industri dengan 91 perusahaan yang menyerap 16.874 tenaga kerja, berada di wilayahnya. Perekonomian berkembang pesat di Kecamatan Bantargebang, tetapi tidak demikian di Kelurahan Sumurbatu karena sumber daya manusia yang rendah tidak dapat terserap di sektor industri. Sebagai gambaran, hanya 76 orang warga Kelurahan Sumurbatu yang terserap di sektor industri (dari 16.874 orang) .Sementara jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya - karena keluarga petani biasanya punya banyak anak - mengakibatkan jumlah pengangguran di Kelurahan Sumurbatu juga semakin meningkat.

Masyarakat petani yang sangat tergantung pada tersedianya lahan pertanian juga harus menghadapi kenyataan perluasan lahan pemukiman Kota

Bekasi dengan berdirinya kompleks-komplek perumahan, masih ditambah lagi dengan berdirinya lokasi pembuangan sampah yang semakin mempersempit luas lahan pertanian yang ada. Kekurangan modal petani juga mengakibatkan produktivitas pertanian yang rendah menjadi semakin rendah.

Warga pendatang dengan kualitas pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat pendapatan lebih baik, mulai masuk ke wilayah ini bersamaan dengan pembangunan kompleks-komplek perumahan. Kondisi ekonomi warga perumahan yang terkonsentrasi di RW 06 dan RW 07 ini relatif lebih baik dibanding masyarakat yang tinggal di RW lainnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima beras untuk orang miskin.

Tabel 4.7. Jumlah RTS penerima raskin di Kelurahan Sumurbatu per RW

No.	RW	Jumlah KK	Jumlah RTS raskin	RTS dalam persen
1.	RW 01	658	124	18,84
2.	RW 02	580	111	19,14
3.	RW 03	602	119	19,77
4.	RW 04	456	112	24,56
5.	RW 05	451	139	30,82
6.	RW 06	279	32	11,47
7.	RW 07	234	18	7,69
	Jumlah	3.260	655	20,09

*Sumber : diolah dari data kelurahan tahun 2008*

Sebagian masyarakat lokal yang tidak bisa bertahan di pertanian akhirnya memilih bekerja sebagai tukang ojek, tenaga keamanan di perumahan, supir angkot atau pemulung. Kaum wanita yang tinggal di dekat kompleks perumahan mulai bekerja menjadi buruh cuci atau pembantu rumah tangga. Ada pula yang membuka warung makan kecil-kecilan.

TPA sampah selain mengundang ribuan pemulung untuk datang ke wilayah ini, ternyata juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal di usaha pengolahan sampah. Namun, sekali lagi karena sumber daya manusia yang rendah dengan modal yang rendah, masyarakat lokal sebagian besar hanya bisa menjadi tenaga pengorek dan penyobek, posisi terendah di usaha pengolahan sampah. Sementara posisi pengepul dan bos sebagai pemilik modal dikuasai oleh

orang luar. Artinya, pelaku yang mendapat bagian keuntungan terbesar dari usaha pengolahan sampah ini bukanlah warga lokal. Ada beberapa pemilik modal dari warga lokal yang kemudian bisa menjadi pengepul, tetapi jumlahnya sangat sedikit tidak sampai 10 orang. Sementara bos pemulung seluruhnya berasal dari luar Sumurbatu. Selain itu, kehadiran para pemulung juga membuka peluang bagi masyarakat lokal pemilik tanah di sekitar TPA untuk menyewakan tanah-tanahnya kepada para pengepul atau bos pemulung.

Masyarakat petani yang masih bertahan untuk melakukan aktivitas pertanian dihadapkan pada masalah produktivitas yang rendah di level subsisten. Produktivitas rendah karena petani kekurangan modal untuk membeli benih, pupuk dan obat-obatan penyemprot hama. Akibatnya petani harus berhutang untuk modal kerjanya dan ketika panen harus membayar hutang terlebih dulu. Ditambah lagi dengan kurang dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap pengembangan pertanian.

#### **4.3.3. Potensi Pertanian sebagai Mata Pencaharian dan Permasalahannya**

Berdasarkan kondisi demografis diketahui bahwa 29,72 persen masyarakat masih bermata pencaharian sebagai petani, dan masih tersedia lahan pertanian meliputi sawah dan kebun seluas 375,65 hektar atau mencapai 66 persen dari luas wilayah. Sehingga potensi pertanian sebagai mata pencaharian dilihat dari sisi SDM dan ketersediaan lahan di wilayah ini masih cukup besar.

Potensi pertanian juga terlihat dari hasil pembuatan peta desa, dimana sebagian besar wilayah yang dipetakan oleh masyarakat sendiri khususnya di RW 02 masih banyak yang difungsikan sebagai lahan sawah dan juga ladang yang ditanami dengan palawija. Hasil pembuatan peta desa dapat dilihat pada gambar 4.1. di halaman berikut :

Gambar 4.1. Peta Desa

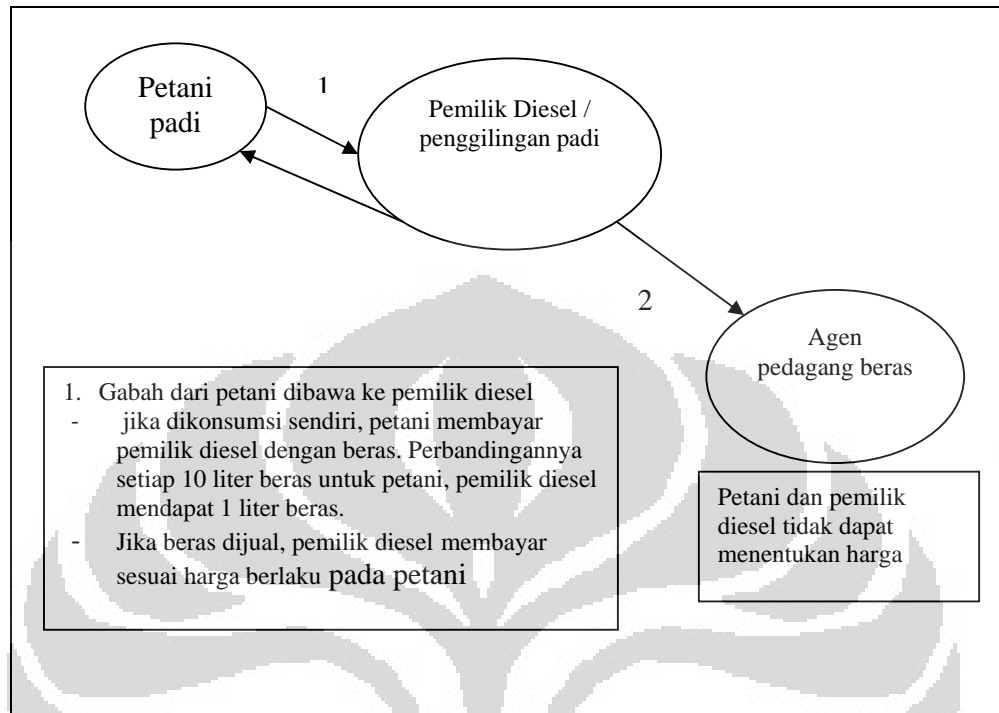


*Sumber : Data Primer, hasil Diskusi PRA, 2009*

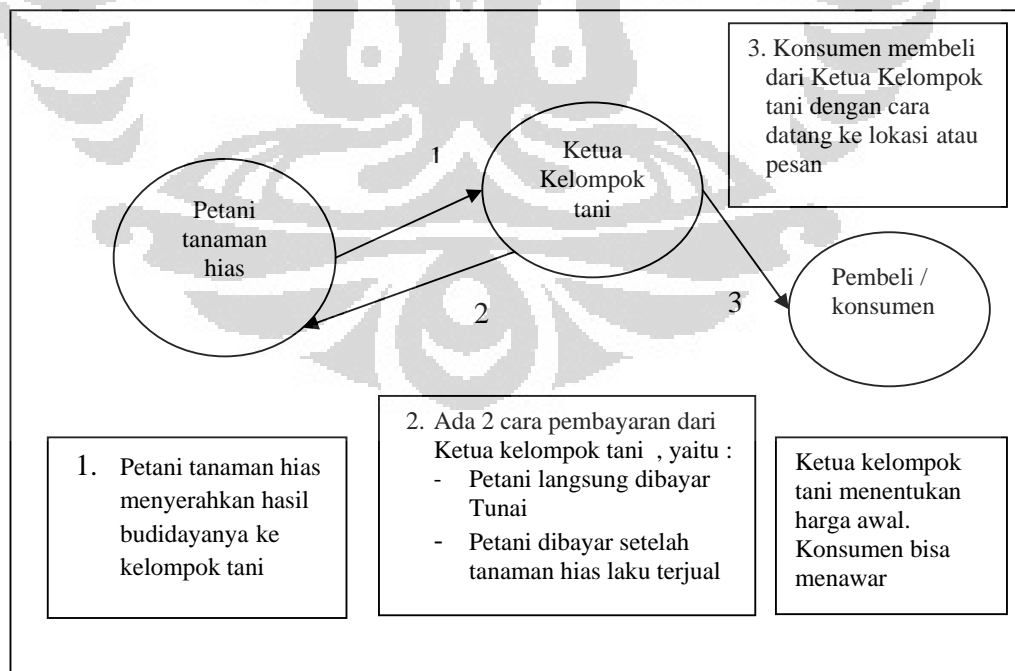
Pembuatan kalender musim tanaman pertanian juga dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan utama masyarakat petani setempat yang dilakukan sepanjang tahun mulai dari menanam, melakukan aktivitas pemeliharaan hingga panen. Kegiatan yang teridentifikasi antara lain yaitu menanam padi sawah dan padi darat, singkong, cabe, jagung dan sayur-sayuran seperti timun dan kacang panjang. Ada pula yang memilih spesialisasi memelihara ikan lele, beternak bebek, bahkan menanam tanaman hias. Selengkapnya di lampiran 6.

Menurut para petani, pemasaran produk pertanian sangat mudah. Tidak ada kendala pemasaran hasil pertanian, meskipun tidak ada fisik pasar secara khusus di wilayah kelurahan ini. Ada dua pasar yang jaraknya relatif dekat sekitar 3,5 kilometer yaitu pasar kecamatan Bantargebang dan pasar kecamatan Setu dimana petani bisa menjual hasil pertaniannya. Namun yang sering terjadi adalah petani sama sekali tidak perlu membawa hasil pertaniannya ke pasar karena agen, pedagang atau pembeli justru datang langsung ke lokasi. Kelemahan petani adalah tidak dapat menentukan harga produk pertaniannya. Bagan alur pemasaran beberapa produk pertanian adalah sebagai berikut :

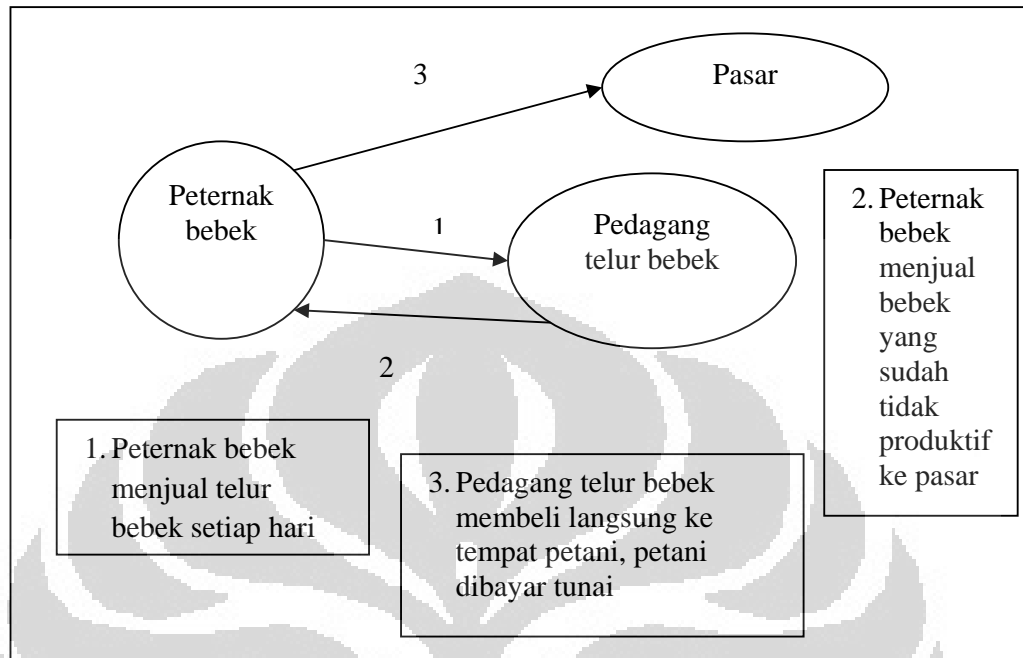
Gambar 4.2. Bagan Alur Pemasaran Beras



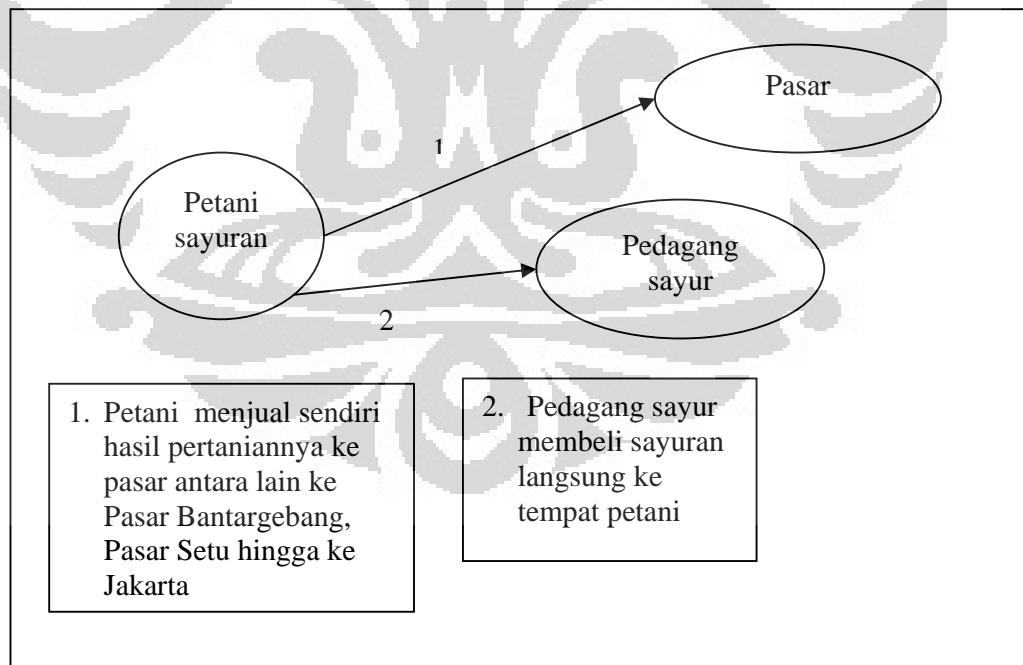
Gambar 4. 3. Bagan Alur Pemasaran Tanaman Hias



Gambar 4.4. Bagan Alur Pemasaran Bebek dan Telur Bebek



Gambar 4.5. Bagan Alur Pemasaran Sayuran



Sumurbatu juga telah lama dikenal sebagai pusat pengembangan hortikultura. Sebagian besar warga masyarakat adalah petani buah-buahan ,

khususnya rambutan. Bahkan hampir setiap rumah di sini memiliki pohon rambutan. Sayangnya, tanaman buah yang ada masih dikelola secara tradisional, dibiarkan saja secara alami tanpa ada pengembangan.

Dari hasil diskusi kelompok pemuda, ternyata para pemuda juga memiliki ketertarikan untuk menekuni pertanian, tetapi bukan lagi menggarap sawah seperti orang-orang tua mereka melainkan pertanian dengan menggunakan lahan sempit sesuai dengan keadaan kota, seperti pembibitan ikan lele yang telah dimulai oleh beberapa orang pemuda. Adapula yang menyatakan keinginannya untuk tahu lebih banyak mengenai pertanian jamur dan budidaya ikan hias karena selama ini mereka belum menerima bimbingan atau penyuluhan dari pihak PPL.

Konsep pertanian kota yang telah mulai dikembangkan di Sumurbatu berupa budidaya tanaman hias yang memiliki nilai ekspor. Harga 1 pohon bisa mencapai Rp 20 juta di pasar dalam negeri bahkan lebih dari itu jika diekspor ke mancanegara. Saat ini baru sekitar 4 orang yang menekuni budidaya tanaman hias ini dipimpin oleh bapak Kabung Kurnia. Beliau juga tengah merintis produksi minuman kesehatan berupa sari buah mengkudu sekaligus telah melakukan pembibitan 1.000 pohon mengkudu. Rencananya bibit itu akan dibagikan kepada beberapa anggota tani yang berminat untuk jangka panjang dapat menjadi tambahan pendapatan bagi petani sekaligus menjadi sumber bahan baku sari mengkudu yang diproduksi kelompok ini. Namun sayang sampai sekarang rencana ini masih terkendala karena belum ada ijin dari BPOM.

Bapak Kabung Kurnia yang merupakan Ketua Kelompok Tani Subur Makmur (KTSM) adalah seorang tokoh pertanian di Kota Bekasi. Sampai saat ini beliaulah yang selalu dikirim untuk mewakili Pemerintah Kota Bekasi dalam berbagai *even* pertanian, baik di Propinsi Jawa Barat maupun di tingkat pusat. Namun, beliau menyatakan keprihatinan atas kurangnya dukungan pemerintah Kota Bekasi terhadap petani dan pertanian, petani seolah dibiarkan berjalan sendiri. Hal ini dirasakannya mulai dari pembubaran Dinas Pertanian Kota, hingga tidak adanya pendampingan pemerintah kota saat ia harus menghadiri *even-even* pertanian di Propinsi Jawa Barat, sementara wakil petani dari daerah lain bahkan didampingi oleh kepala daerahnya.

Meskipun masih ada potensi yang cukup besar dari sisi SDM, lahan maupun kemudahan pemasaran hasil pertanian, namun sektor pertanian di wilayah ini dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti :

1. Rendahnya tingkat pendapatan petani sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan antara lain :
  - Produktivitas pertanian yang rendah karena berbagai faktor terutama kekurangan modal sehingga petani tidak bisa berproduksi pada skala ekonomis, dan faktor lain seperti pengairan yang kurang memadai akibat jauhnya sumur dari ladang, tanaman diserang hama akibat kurangnya pengetahuan petani, sawah yang terkena limbah pengolahan sampah sehingga gagal panen.
  - Kurangnya penyuluhan dari PPL tentang informasi dan teknologi pertanian terbaru
  - Lahan pertanian yang dimiliki petani tinggal sedikit, sebagian besar lahan garapan sudah menjadi milik pengembang perumahan atau milik warga Jakarta. Sebenarnya lahan-lahan tersebut masih bisa digarap petani dengan sistem bagi hasil, namun kadang-kadang petani tidak berani menggarap karena ada kekhawatiran akan terjadi kerugian jika sewaktu-waktu pemilik lahan ingin memanfaatkan lahannya sebelum tiba waktu panen, terutama untuk tanaman yang berumur panjang seperti singkong (8 bulan).
2. Sumber daya manusia petani yang rendah, umumnya pendidikan kepala keluarga hanya tamat SD atau tidak tamat SD.
3. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap pengembangan pertanian. Hal ini tampak dari :
  - Dibubarkannya Dinas Pertanian Kota Bekasi dan Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kota Bekasi. Fungsi dari instansi tersebut kemudian direduksi dan hanya menjadi bagian dari Dinas Perekonomian Kota Bekasi. Selain itu, UPTD (unit pelaksana teknis daerah) pertanian di bawah Dinas Perekonomian yang tadinya berjumlah 5 UPTD untuk



seluruh wilayah Kota Bekasi, saat ini hanya tinggal 1 UPTD saja yaitu di kecamatan Bantargebang . Struktur pemerintahan yang demikian ternyata kurang mendukung pengembangan pertanian karena program-program pertanian yang datang dari pusat ataupun dari Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan salurannya di tingkat Kota.

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi tahun 2008 – 2028 yang masih menunggu pengesahan , tidak mencantumkan adanya pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk pertanian. Bahkan kecamatan Bantargebang dan Mustika jaya yang saat ini masih memiliki lahan persawahan cukup luas telah ditetapkan fungsinya sebagai wilayah industri, permukiman skala besar, TPU (tempat pemakaman umum) dan TPA dengan *buffer zone*. Sampai saat ini, RUTRD (Rencana Umum Tata Ruang Daerah) Kota Bekasi masih menetapkan Kelurahan Sumurbatu sebagai wilayah pembuangan sampah (TPA), TPU, permukiman dan pengembangan holtikultura.<sup>6</sup>

4. Kelompok tani yang ada belum berfungsi optimal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian nomor 273 tahun 2007, yaitu sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi:

- Para anggota kelompok tani kurang aktif menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok tani
- Terjadi miskomunikasi antara anggota dan ketua kelompok.
- PPL dalam melakukan penyuluhan hanya sebatas melakukan kunjungan kepada ketua kelompok tani.

#### **4.3.4. Sosial Kemasyarakatan**

Di Kelurahan Sumurbatu tidak ada tradisi tertentu yang melembaga. Tetapi masih terdapat tradisi setempat yang dilakukan masyarakat lokal. Tradisi ini tidak mengikat masyarakat secara keseluruhan, mengingat saat ini masyarakat di

---

<sup>6</sup> Selayang pandang Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, disusun oleh Lurah Sumurbatu tahun 2006

wilayah setempat sudah semakin heterogen karena interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang.

Contoh tradisi yang masih ada, pada saat memiliki hajatan seperti menikahkan anak, masyarakat terbiasa mengadakan acara yang meriah dengan biaya melebihi batas kemampuannya sehingga harus berhutang kesana-kemari. Hal ini karena prinsip mengutamakan penampilan yang dalam bahasa setempat berbunyi "*biar tekor asal nyohor*". Atau pada saat lebaran ada kewajiban tidak tertulis di dalam satu keluarga besar bahwa anggota yang muda harus memberikan "bingkisan" kepada yang lebih tua meskipun misalnya, si anggota muda tadi sedang tidak memiliki uang, sehingga ia harus berhutang pula. Jika ini tidak dilakukan akan menjadi bahan gunjingan karena dianggap tidak mampu memberi padahal satu tahun hanya sekali. Tradisi yang tampaknya ikut memperburuk kondisi perekonomian warga lokal.

Ada pula satu fenomena di masyarakat setempat, meskipun tidak sampai menjadi tradisi, yaitu praktek poligami. Praktek poligami ini tampak menonjol karena cukup banyak dilakukan oleh orang yang dianggap tokoh masyarakat, seperti pengurus RT atau RW bahkan tokoh pendidik. Tapi ada juga pelaku poligami dari masyarakat biasa. Perilaku ini dapat menyebabkan wanita dan anak-anak rentan terhadap penelantaran secara ekonomi maupun non ekonomi. Misalnya seorang wanita tua miskin penerima BLT, saat wawancara, anak dari wanita ini bercerita bahwa ayahnya masih hidup tetapi sudah menikah dengan perempuan lain, dan sejak itu ibunya tidak pernah dinafkahi lagi. Atau seorang informan yang menjadi istri kedua, suaminya cukup bertanggung jawab menafkahi dia dan anak-anaknya secara finansial. Tetapi sang suami yang juga ayah dari 3 anaknya ini jika berkunjung, tidak pernah menginap di rumah si istri muda untuk menghindari konflik dengan istri pertama. Sehingga, otomatis seluruh tanggung jawab pendidikan anak berada di tangan ibunya.

#### **4.3.5. Dampak Modernisasi**

Proses pembangunan di Kelurahan Sumurbatu dapat dikatakan berlangsung dengan sangat cepat. Tahun 1986 saat lokasi TPA sampah mulai dioperasikan, di

wilayah ini belum ada listrik dan belum ada jalan aspal. Masyarakat lokal adalah petani berpendidikan rendah yang terbiasa hidup dalam kesederhanaan pedesaan.

Tiba-tiba, setelah desa mereka menjadi lokasi pembuangan sampah, arus pembangunan begitu deras masuk ke wilayah ini. Dimulai dari masuknya listrik, lalu pembangunan jalan yang diikuti dengan datangnya warga kota Jakarta dan pengembang perumahan untuk membeli tanah-tanah petani. Petani dengan senang hati menjual tanah mereka yang luas dengan harga murah, karena menurut mereka harga itu sudah menguntungkan. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa melakukan perdagangan dengan cara barter tergiur untuk memperoleh uang banyak demi membeli barang-barang konsumsi seperti yang mereka lihat dari televisi. Mereka membeli sepeda motor, membangun rumah, menunaikan ibadah haji, membuat pesta hajatan, mencalonkan diri menjadi kepala desa, yang semuanya dibiayai dari menjual tanah, sesuatu yang seharusnya menjadi faktor produksi utama bagi mereka.

Adanya televisi turut mempercepat masuknya arus modernisasi ke desa ini sehingga menimbulkan sikap mental yang materialistis, konsumtif dan ingin serba instan. Hal ini juga berpengaruh pada kurangnya rasa hormat dan kasih sayang anak kepada orang tua. Contohnya, seorang janda penerima raskin sekolah hanya sampai kelas 3 SD, punya 3 anak, anak pertama laki-laki tamatan SD sekarang jadi pemulung bersama ibunya, anak kedua perempuan tamatan SMP jadi buruh pabrik karung, dan anak bungsu lelaki masih sekolah di SMK. Kehidupan sehari-hari mereka sangat memprihatinkan. Seringkali si ibu harus berhutang kepada pengepul / juragannya untuk sekedar menyediakan makan. Tetapi apa yang dilakukan si anak bungsu. Ia memaksa ibunya untuk membelikan sepeda motor dan mengancam akan bunuh diri jika keinginannya tidak terpenuhi. Dengan terpaksa si ibu menuruti kemauan anaknya, segala upaya dilakukan si ibu untuk tetap dapat membayar cicilan motor sebesar Rp 500.000 per bulan, termasuk menjual kompor dan tabung gas subsidi dari pemerintah. Bahkan listrik di rumah mereka pun sudah dicabut karena tidak mampu bayar tagihan. Ada tetangga yang menyarankannya untuk menjadi *jablay* (sebutan untuk pelacur) di TPA, tetapi ia menolak. Ia menuturkan cerita ini pada penulis dengan berlinang air mata. Ironis

mendengarnya, anak lelaki yang sudah berpendidikan lebih tinggi, ternyata tidak bisa menyikapi modernisasi dengan cara yang lebih cerdas.

Mental materialistis itu pula yang menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana kompensasi sampah. Awalnya masyarakat lokal yang merasa tersisih dan dirugikan akibat dampak keberadaan TPA sampah, menuntut adanya kompensasi. Namun setelah tuntutan dipenuhi dan dana kompensasi sampah diberikan kepada masyarakat, yang terjadi bukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi digunakannya dana kompensasi tersebut oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akhirnya kondisi ini memunculkan semakin hilangnya rasa kebersamaan masyarakat berganti dengan individualisme sebagaimana warga kota.

Mental materialistis dan ingin serba instan yang mulai berkembang di tengah masyarakat bertemu dengan tingginya angka pengangguran akhirnya memicu terjadinya kriminalitas di wilayah setempat. Dari wawancara diperoleh informasi bahwa di wilayah ini sering terjadi pencurian, mulai dari mesin *sanyo*, kambing, sepeda motor hingga komputer sekolah. Meski demikian, aparat kelurahan mengatakan bahwa belum ada keyakinan bahwa pelakunya adalah warga Sumurbatu mengingat sampai saat ini belum ada pelaku pencurian yang tertangkap.

Dampak buruk modernisasi juga tampak pada masyarakat yang cenderung meninggalkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya terutama pada generasi muda. Hal ini antara lain terungkap pada saat pembuatan jadwal kegiatan sehari dengan beberapa pemuda, dari 9 orang yang hadir hanya satu orang yang melaksanakan sholat lima waktu, sementara sisanya hanya melaksanakan kurang dari lima waktu bahkan lebih banyak yang tidak melaksanakan sama sekali, dengan berbagai alasan.

Ketidaksiapan mental masyarakat bisa jadi berhubungan dengan lemahnya fungsi pendidikan dalam keluarga. Di masa lalu, pernikahan terutama di kalangan wanitanya sering dilakukan pada usia yang sangat dini, 12 hingga 15 tahun. Akibatnya, keluarga cenderung memiliki banyak anak tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dari hasil wawancara dengan seorang ibu warga penerima raskin yang menikah di usia 13

tahun, dengan 5 anak , anak terkecil berusia 4 tahun. Anak ini dalam satu hari bisa menghabiskan uang jajan lebih dari Rp 10.000. Saat ditanya mengapa tidak menolak keinginan anaknya ? menurutnya, jika tidak dituruti, anak ini bisa “menghancurkan” semua barang-barang yang ada di rumah. Lalu, bagaimana jika tidak ada uang ? saya berhutang dulu ke warung kata si ibu. Sebuah pola asuh yang salah sejak awal , yang akan melahirkan generasi materialistis berikutnya.

#### **4.4. Kelembagaan di Masyarakat**

Di dalam setiap masyarakat pasti terdapat lembaga-lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam diri masyarakat itu sendiri. Baik itu berupa lembaga tradisional maupun lembaga-lembaga yang datang dari luar masyarakat seperti lembaga pemerintah , swasta maupun LSM (lembaga swadaya masyarakat). Ada lembaga yang bersifat informal seperti kelompok atau perkumpulan, adapula lembaga-lembaga formal yang memiliki struktur organisasi yang jelas seperti Kantor Kelurahan dan aparatnya. Penelitian ini melakukan identifikasi terhadap lembaga-lembaga dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi, diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat beberapa lembaga yang merupakan *stakeholder* atau pemangku kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian, antara lain aparat Kelurahan, Ketua RT/RW , LPM, BKM, Sekolah formal, Madrasah informal, Karang Taruna, Kelompok Tani, kelompok pengajian, puskesmas, posyandu, PKK dan TPA sampah.

Aparat kelurahan sebagai bawahan dari pemerintah kota hanya menjalankan program-program turunan dari pemerintah kota dan Lurah sering kali harus melakukan tugas-tugas koordinasi dengan kecamatan maupun pemerintah kota. Manfaat dan pengaruh yang dirasakan masyarakat baru sebatas pelayanan administratif pemerintahan seperti pengurusan surat-menyurat . Ditambah lagi Lurah dan aparat kelurahan lainnya sebagian besar tidak berdomisili di Sumurbatu tetapi ditempatkan oleh Pemerintah kota, sehingga ikatan yang terjadi antara aparat kelurahan dengan masyarakatnya timbul sebatas

tugas dari pemerintah. Peranan pengurus RT dan RW sebagai perpanjangan tangan dari Lurah sangat dirasakan masyarakat.

Dari sisi peran kelembagaan dan dana yang dimiliki sebenarnya LPM adalah lembaga yang sangat berpeluang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, namun dari pengalaman yang ada, peran LPM belum dapat diharapkan sepenuhnya, karena selama ini lebih berorientasi pada pembangunan proyek-proyek fisik seperti jalan dan bangunan, sementara dari sisi dana banyak penyimpangan yang terjadi.

Lembaga-lembaga bentukan pemerintah lainnya seperti BKM / KSM, PKK dan posyandu juga belum mampu menjadi penggerak dari proses pemberdayaan masyarakat, akibat berkembangnya budaya materialistis di tengah masyarakat. Sehingga hampir setiap kegiatan yang diadakan lembaga-lembaga tersebut baru dapat berjalan jika masyarakat mendapatkan imbalan materi seperti uang atau materi dalam bentuk lainnya.

Kelompok pengajian menjadi satu-satunya lembaga masyarakat yang masih mampu menggerakkan masyarakat untuk berkumpul karena motivasi yang bersifat spiritual. Kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi proses pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dalam kelompok. Namun, sayangnya selama ini materi-materi yang diberikan dalam kelompok-kelompok pengajian belum menyentuh sisi pemberdayaan ekonomi.

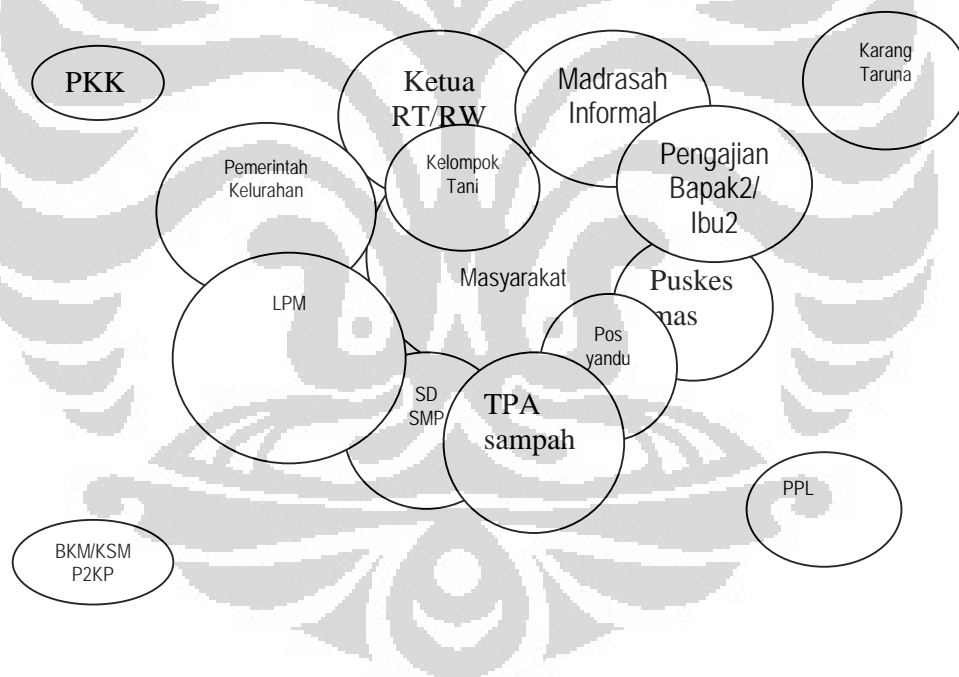
Untuk pengembangan pertanian, selain potensi sdm dan lahan yang dimiliki masyarakat, Kelurahan Sumurbatu memiliki seorang tokoh pertanian Kota Bekasi sekaligus ketua kelompok tani yang berkomitmen untuk memajukan pertanian terutama pertanian kota atau pertanian modern, ditambah lagi dengan keberadaan PPL yang juga memiliki komitmen yang sama. Lurah yang saat ini menjabat, sebelumnya adalah PPL Kecamatan Bantargebang sehingga cukup memahami permasalahan pertanian di wilayah setempat dan memiliki keberpihakan pada petani. Namun dalam upaya pengembangan pertanian, ketiganya merasa terkendala dengan kebijakan pemerintah kota yang tidak mendukung, antara lain dengan tidak adanya Dinas Pertanian Kota Bekasi.

Sementara di sisi lain, ada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian yang dapat dijadikan sebuah model pembelajaran.

Lurah dalam hal ini diharapkan dapat menjadi koordinator dalam pemberdayaan masyarakat, karena memiliki kewenangan selaku wakil dari pemerintahan dan dapat menggerakkan para pengurus RT dan RW untuk meneruskannya di lingkungan masing-masing.

Secara lengkap peran masing-masing lembaga akan diuraikan dalam peran lembaga yang ada di masyarakat. Adapun diagram venn kelembagaan yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok adalah sebagai berikut :

Gambar 4.6. Diagram Venn Hubungan Kelembagaan



#### 4.4.1. Peran Lembaga yang ada Dalam Masyarakat

##### 4.4.1.1. Aparat Kelurahan

Pemerintah Kelurahan berpengaruh bagi masyarakat dalam pelayanan administratif pemerintahan karena bertugas melayani masyarakat dalam pembuatan surat-menyurat seperti KTP, KK dan kartu miskin, menyalurkan

bantuan dari pemerintah seperti raskin, meneruskan program-program dari pemerintah daerah, membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di kelurahan , sebagai mediator yang memfasilitasi hubungan masyarakat dengan pemerintah kecamatan dan kota juga dalam masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.

Karena di wilayah Kelurahan ini terdapat lokasi TPA sampah, maka wilayah ini seolah identik dengan pemulung dan kemiskinan. Sisi baiknya adalah wilayah ini menjadi sangat sering dijadikan lokasi penelitian, bakti sosial pembagian sembako maupun kesehatan gratis dari lembaga maupun masyarakat umum dan juga menjadi sasaran program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kantor lurah juga sudah sering memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti pelatihan membuat sablon, pelatihan perbengkelan, bahkan pelatihan komputer untuk karang taruna. Ada pula pelatihan pembuatan emping melinjo, pelatihan ternak lele dan lain-lain. Namun, pelatihan-pelatihan tersebut tidak berlanjut kepada pemberdayaan, selalu berhenti sebatas pelatihan saja.

Contoh nyata yang ditemui penulis adalah pelatihan bagi pemulung yang dilaksanakan tanggal 11 – 15 Mei 2009 mengenai pengolahan sampah dari Departemen Tenaga Kerja. Dilanjutkan pelatihan tanggal 18 – 22 Mei 2009 tentang kewirausahaan pemulung yang diberikan Dinas Sosial Kota Bekasi. Usai pelatihan, kelompok “pemulung” yang telah dilatih mendapat bantuan 1 unit mesin pencacah sampah plastik. Namun, sampai saat penelitian di lapangan mesin pencacah tersebut tidak dimanfaatkan, hanya disimpan di rumah salah seorang warga pengepul. Setelah ditelusuri, ternyata banyak dari peserta pelatihan pemulung bukan berasal dari pemulung. Dari target 60 orang peserta, yang benar-benar pemulung hanya 10 orang, sisanya adalah masyarakat petani dan berbagai elemen masyarakat lain. Dengan demikian, pelatihan ini dapat dikatakan telah salah sasaran. Pihak kelurahan mengaku hal tersebut terjadi karena sangat sulit untuk mengumpulkan warga pemulung. Bagi pemulung waktu adalah uang, sehingga pemulung lebih memilih bekerja di TPA sampah dibanding harus duduk



selama berjam-jam untuk mengikuti pelatihan dengan risiko kehilangan pendapatan.

Pihak kelurahan membenarkan anggapan bahwa sebagian besar warga memiliki sifat malas, sulit berubah dan cenderung materialistis, misalnya saja dalam kegiatan K3 masyarakat mau berpartisipasi jika ada “uang rokok”nya. Untuk triwulan 4 tahun 2009 ini, pihak LPM telah membagikan dana sebesar Rp 2.000.000 untuk kegiatan K3 ke setiap RW.

Di sisi lain, Lurah sebagai bawahan dari Pemerintah Kota, lebih sering melakukan rapat-rapat koordinasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kota, dibandingkan berkoordinasi dengan masyarakatnya. Maka tidak heran jika akhirnya masyarakat belum merasakan peran Lurah dan aparatnya dalam pengentasan kemiskinan ataupun pemberdayaan masyarakat secara khusus.

#### **4.4.1.2. Pengurus RT/RW**

Pengurus RT/ RW memiliki pengaruh dan hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat, karena menjadi ujung tombak dari pemerintahan di kelurahan dan sangat memahami kondisi di wilayahnya masing-masing. Ketua RT diperlukan oleh masyarakat untuk memfasilitasi hubungannya dengan Ketua RW dan pemerintah kelurahan misalnya dalam penyaluran beras miskin, pengurusan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), pengurusan surat keterangan tidak mampu dan sebagainya.

#### **4.4.1.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

LPM adalah lembaga yang bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Perda pembentukannya LPM berfungsi antara lain : menumbuhkembangkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program, melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pengurus LPM Sumurbatu terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang Sekretaris dan 14 orang anggota pengurus yang merupakan perwakilan dari 7 RW yang ada, masing-masing 2 orang. Ketua dan wakil ketua dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Kedudukan dan peran LPM di Kelurahan Sumurbatu menjadi sangat strategis karena kewenangannya mengelola dana pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang disalurkan Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan dana kompensasi atas keberadaan TPST Bantargebang dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Sebagai gambaran, tahun 2006 besar dana yang dikelola oleh LPM kelurahan Sumurbatu mencapai Rp 6.284.300.000,- (enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Karena itulah pengurus LPM merupakan posisi yang prestisius sehingga warga masyarakat sangat antusias untuk dipilih dan memilih pengurus LPM .

Meskipun memiliki tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat, sejak didirikan tahun 2004 LPM Sumurbatu lebih fokus pada pengelolaan dana kompensasi sampah yang berjumlah besar tersebut. Itupun sebatas pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pos polisi, lapangan olahraga, pembangunan mesjid dan kegiatan bersifat fisik lainnya. Belum ada satu pun kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat , dan hal ini diakui oleh Ketua LPM yang sekarang menjabat.

Dana besar yang dikelola oleh sumber daya manusia yang rendah ditambah lagi dengan tidak adanya aturan yang secara jelas mengharuskan pertanggungjawaban dana tersebut, menimbulkan risiko penyimpangan yang besar dalam pengelolaan dana kompensasi di kelurahan Sumurbatu. Contohnya adalah proyek pembangunan masjid yang telah berjalan lebih dari 2 tahun dan menghabiskan biaya sebesar Rp 850.000.000,00 tetapi realisasi fisiknya hanya berupa pondasi dan tiang saja. Sebagaimana kutipan artikel berikut : *Sebanyak 16 orang perwakilan warga Sumurbatu Selasa (12/2/2008), mendatangi Kantor Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Pemerintah Kota Bekasi melaporkan dugaan penyelewengan dana kompensasi sampah senilai Rp 850 juta untuk pembangunan masjid. Masjid Baitul Mu'min yang berlokasi di Kampung Cisalak, Kelurahan Sumur Batu RT 001/04. "Dana pembangunan sudah cair Rp 850 juta. Namun, sejak 2006 pembangunan masjid baru selesai sekitar 15 persen...masjid*

yang memiliki luas bangunan sekitar 25 x 18 meter ini, baru berbentuk pondasi dan tiang-tiang".(tempointeraktif, 2008)

Contoh penyimpangan lain yang terjadi sebagaimana kutipan artikel berikut : *Sekretaris LPM Kelurahan Sumur Batu mengakui sejumlah proyek fisik, yang bersumber dari dana kompensasi sampah, mengalami pemotongan anggaran. Bahkan diperkirakan mencapai 60 persen dari anggaran yang diperuntukkan. Pemotongan tersebut mulai terjadi setelah anggaran dana dicairkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Contohnya, untuk pembangunan pos polisi di kelurahan. Anggarannya Rp 50 juta, tetapi yang diserahkan LPM dan lurah ke pelaksana pembangunan hanya Rp 35 juta, dan yang turun ke pemborong tinggal sekitar Rp 15 sampai Rp 20 juta.*(Kompas, 2005)

Sementara itu, tidak ada pemantauan atau pengawasan dari instansi terkait atas penggunaan dana kompensasi oleh LPM. Hal ini diakui oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Bekasi pada dua periode berbeda sebagaimana kutipan artikel berikut : *Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Bekasi Dudi Setiabudi mengakui, pihaknya tidak memantau penyerapan dana kompensasi di tingkat kelurahan setelah dana tersebut disalurkan melalui LPM setempat.*(Kompas, 2005) Dan satu kutipan artikel lagi : *Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Bekasi, H. Gunung Hilman mengaku dirinya tidak mengetahui dan belum mendapat laporan permasalahan ini. "Kita tidak ikut campur. Kami hanya menyalurkan dana saja."*(Tempointeraktif, 2008)

Selain mengelola proyek pembangunan fisik, pengurus LPM juga bertanggung jawab melakukan pembagian dana kompensasi kepada masing-masing kepala keluarga yang tercatat secara resmi sebagai penerima kompensasi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, masyarakat menganggap LPM adalah lembaga yang sama pentingnya dengan kantor kelurahan karena setiap triwulan LPM lah yang membagikan dana sebesar Rp 200.000 kepada setiap KK di Kelurahan ini. Seharusnya setiap KK berhak menerima dana kompensasi sebesar Rp 100.000 per bulan. Sehingga total yang diterima setiap triwulan adalah Rp 300.000 per KK. Namun, atas kesepakatan bersama setiap triwulan, setiap KK menyerahkan Rp 100.000 kepada LPM untuk kebutuhan pembangunan fisik.

Karena peran pengelolaan dana kompensasi tersebut, maka masyarakat menganggap penting terhadap keberadaan lembaga LPM, meskipun masyarakat juga mengakui bahwa belum ada peran penting lain terkait dengan fungsi pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan LPM.

#### **4.4.1.4. Madrasah Informal**

Madrasah Informal merupakan sarana pendidikan yang tanpa syarat dan tanpa batasan usia hanya bermodalkan kemauan kuat dari peserta didik. Manfaat yang besar terutama dirasakan pada saat biaya pendidikan dasar belum digratiskan oleh pemerintah. Lulusan madrasah ini memiliki kemampuan setingkat tsanawiyah (SMP), namun karena madrasah tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka lulusannya tidak dapat diakui secara formal.

Madrasah ini diasuh oleh seorang tokoh agama secara tradisional dan cenderung eksklusif. Disini santri putri harus menggunakan rok atau kain panjang tidak boleh memakai celana panjang, demikian juga santri putra jika sholat harus mengenakan sarung, para santri dan jamaah diharamkan menonton televisi, mendengarkan radio dan menggunakan alat kontrasepsi KB, pengeras suara tidak boleh digunakan untuk mengumandangkan azan, tidak bersedia menerima bantuan dari pemerintah dan hanya mengandalkan para donatur yaitu warga masyarakat.

#### **4.4.1.5. SD dan SMP**

SD dan SMP memiliki manfaat yang besar dan hubungan yang dekat dengan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana SD dan SMP di kelurahan mereka, anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan gratis di tingkat dasar dengan tidak perlu sekolah di daerah lain, sehingga menghemat ongkos transportasi ke sekolah.

#### **4.4.1.6. Puskesmas**

Puskesmas sangat penting dan dekat hubungannya dengan masyarakat. Di Puskesmas seluruh penduduk kelurahan Sumurbatu bisa menikmati layanan

kehatan gratis dan lokasinya yang bersebelahan dengan kantor lurah relatif dekat dengan pemukiman warga dan dilewati angkutan umum.

#### **4.4.1.7. Kelompok Tani**

Kelompok Tani berpengaruh penting terutama bagi masyarakat petani karena merupakan wadah untuk berorganisasi dan jembatan penghubung dengan PPL dan Pemerintah baik di tingkat Kota maupun Propinsi. Program maupun bantuan kepada petani juga disalurkan melalui kelompok tani, misalnya bantuan bibit padi dari pemerintah provinsi Jawa Barat . Pada tahun 2010 Kelompok tani akan semakin penting peranannya karena menjadi saluran distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Sehingga petani yang tidak bergabung dalam kelompok tani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Meski penting, kelompok tani kurang dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat menimba ilmu pertanian oleh masyarakat. Adanya rasa malas dari para petani untuk menghadiri pertemuan kelompok, karena memang belum dapat merasakan manfaat dari kelompok tani ini secara langsung. Para anggota kelompok tani lebih sering mengikuti acara-acara yang bersifat formalitas dan insidental seperti cerdas cermat Pertasikencana atau pameran-pameran yang diadakan oleh Departemen Pertanian atau Dinas Pertanian Jawa Barat.

#### **4.4.1.8. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)**

PPL dapat membantu para petani dalam memberikan penyuluhan pertanian dan sebagai jembatan penghubung antara petani dengan pemerintah sehingga dianggap penting tetapi hubungannya dirasakan jauh oleh masyarakat petani karena PPL seringkali hanya berkunjung kepada ketua kelompok tani saja . Ada seorang warga petani yang mengaku sudah 10 tahun tidak pernah menerima penyuluhan dari PPL. Selain itu, masih ada anggapan di masyarakat petani bahwa PPL adalah orang yang pandai berteori, tetapi belum tentu teori itu berhasil di lapangan.

Pihak PPL Kecamatan Bantargebang mengatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku, PPL seharusnya melakukan aktivitas LAKU (pelatihan dan kunjungan) yaitu setiap dua minggu sekali PPL mendapatkan pelatihan dari

ahli-ahli pertanian mengenai teknologi terbaru pertanian, dilanjutkan dengan kunjungan PPL ke petani untuk menyampaikan hasil pelatihan tersebut. Namun kenyataannya, saat ini tidak ada lagi pelatihan untuk para PPL di Kota Bekasi mengingat pengembangan sektor pertanian tidak menjadi prioritas dari Pemerintah Kota Bekasi. PPL pun mengaku hanya melakukan kunjungan ke tempat ketua kelompok tani seminggu sekali.

Sebenarnya PPL masih memiliki semangat dan komitmen untuk memajukan pertanian. Namun, terkait dengan dibubarkannya BIPP (Badan Informasi Penyuluhan Pertanian) Kota Bekasi, dan tenaga PPL menjadi fungsional di bawah Dinas Perekonomian Rakyat khususnya UPTD Pertanian Bantargebang, menyulitkan PPL untuk bekerja secara optimal di lapangan, salah satunya karena keterbatasan anggaran. Apalagi berhadapan dengan masyarakat Kelurahan Sumurbatu yang umumnya hanya tertarik mengikuti suatu kegiatan jika ada imbalan uang atau materi. Sehingga timbul kekhawatiran dalam diri PPL untuk mengumpulkan para petani. Salah satu tugas yang belum bisa dijalankan PPL adalah membentuk kelompok tani baru.

#### **4.4.1.9. Karang Taruna**

Karang Taruna yang merupakan wadah kegiatan para pemuda dirasakan cukup penting terutama oleh kalangan pemuda tetapi cukup jauh hubungannya dengan masyarakat secara umum. Hal ini bisa jadi karena adanya kesenjangan hubungan maupun pemikiran antara pemuda dengan generasi tuanya.

Karang Taruna pernah mendapatkan alokasi dana dari LPM sebesar Rp 120.000.000. Dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pemberdayaan pemuda, tetapi justru digunakan untuk membeli seperangkat peralatan *Band*, dengan harapan dapat digunakan oleh para pemuda untuk berlatih musik sekaligus dapat tampil di berbagai acara-acara masyarakat. Saat ini, peralatan *Band* tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena tidak terawat dan tentu saja tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

#### 4.4.1.10. TPA Sampah

Di Kelurahan Sumurbatu terdapat dua lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, yang oleh masyarakat setempat lebih kerap disebut “*bulog*”. Satu adalah milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta seluas 27 hektar dan saat ini dikelola oleh PT Godang Tua Jaya yang memenangkan lelang pengelolaan sampah di Bantargebang, sekarang disebut TPST Bantargebang. Satu lagi adalah milik Pemerintah Kota Bekasi seluas 10 hektar yang dikelola PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang melakukan pengolahan sampah di IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu) berupa kegiatan pengomposan dan bio diesel.

Awalnya, keberadaan TPA di wilayah ini tidak begitu disadari oleh masyarakat. Lama kelamaan mulai timbul dampak berupa pencemaran lingkungan. Yang sangat terasa adalah polusi udara karena aroma sampah menyebar ke seluruh di sekitar lokasi dan kedatangan para pemulung yang menimbulkan kekumuhan. Pada Akhir tahun 2003 hingga awal tahun 2004 sempat timbul penolakan warga setempat dengan melakukan pemblokiran terhadap truk-truk sampah yang masuk secara besar-besaran. Aksi berhenti setelah Pihak Pemerintah Kota Bekasi berjanji akan memenuhi tuntutan warga antara lain memberikan dana kompensasi kepada warga tiga kelurahan, yaitu Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumurbatu dan merekrut warga setempat menjadi pegawai di dalam TPST Bantargebang dan IPST Sumurbatu.

Peran perusahaan pengelola TPA sampah tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tetapi pada saat ada kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti perayaan 17 Agustus, warga dapat mengajukan permohonan bantuan dana kepada pihak pengelola. Ada pula beberapa warga yang direkrut menjadi pegawai di lingkungan TPST dan IPST. Saat ini TPA sampah sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat Sumurbatu dan masyarakat justru ingin mempertahankan keberadaannya mengingat besarnya dana kompensasi yang diterima warga, juga sebagai alternatif lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Meskipun, masyarakat tetap mengaku merasa terganggu dengan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Keberadaan TPA sampah membawa dampak negatif maupun positif. Dampak negatifnya antara lain seperti banyaknya gubuk-gubuk liar pemulung

yang sulit untuk ditertibkan sehingga terkesan kumuh, sebagian besar pemulung yang ada adalah pendatang dari luar Sumurbatu yang tidak melaporkan diri sehingga secara kependudukan sangat sulit dipantau aparat kelurahan, dan banyaknya perusahaan pengolahan sampah di luar lokasi TPA yang tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah dan membuangnya ke sungai, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini belum ada aturan atau sanksi yang tegas yang dikenakan terhadap para pengusaha ini. Dampak lain adalah harga pasar tanah di wilayah ini menjadi sangat rendah bahkan di bawah NJOP nya.

Sementara dampak positifnya antara lain menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat lokal terutama warga yang lokasi pemukimannya berbatasan langsung dengan TPA, pembangunan sarana dan prasarana fisik sangat terbantu dengan adanya dana kompensasi sampah, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan cuma-cuma di puskesmas. Dan selama empat tahun terakhir warga Kelurahan Sumurbatu mendapatkan alokasi dana kompensasi sebesar Rp 100.000 per KK per bulan untuk 2.877 KK (data 2008)

#### **4.4.1.11. Kelompok Pengajian**

Kelompok Pengajian baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu sangat penting dan dekat hubungannya dengan masyarakat. Ada kelompok pengajian yang diasuh oleh kiai yang masih berpandangan tradisional dan adapula kelompok-kelompok pengajian yang diasuh oleh ustad-ustad yang berpikiran lebih maju. Tetapi hubungan kelompok-kelompok ini sangat harmonis. Dalam pengajian mereka mendapatkan ketenangan spiritual sebagai penyeimbang dalam menghadapi permasalahan hidup.

Kelompok-kelompok pengajian ini menjadi satu-satunya wadah dimana masyarakat lokal datang untuk menghadiri dengan niat yang murni untuk mengaji tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Mereka datang karena merasakan kebutuhan akan kelompok, tidak perlu digerakkan oleh pihak-pihak luar karena sudah lama ada di tengah masyarakat dengan waktu-waktu pertemuan yang sudah terjadwal. Misalnya, malam jumat untuk tahlilan, pengajian selasa dan kamis.



Namun kegiatan ini kurang diminati oleh generasi muda, hal ini karena dampak modernisasi sehingga kelompok-kelompok pengajian seperti ini dianggap sudah ketinggalan jaman. Maka, tidak mengherankan jika nilai-nilai agama (dalam bentuk formalitas sekalipun) sudah mulai luntur di kalangan pemuda.

#### **4.4.1.12. PKK dan Posyandu**

PKK belum cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Saat ini PKK harus melaksanakan program Posdaya seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Namun pengurus PKK mengakui kesulitan mencari SDM yang bersedia menjalankan program-program yang ada.

Posyandu yang merupakan bagian dari kegiatan PKK dianggap cukup penting karena disini anak-anak balita mendapatkan imunisasi dan makanan tambahan yang bergizi. Di tiap RW terdapat posyandu tetapi yang paling aktif adalah posyandu yang berada di kompleks perumahan. Di luar kompleks, masih banyak ibu-ibu yang baru tertarik datang ke posyandu untuk melihat perkembangan kesehatan balita mereka jika ada pembagian makanan tambahan gratis dan semacamnya. Jika tidak, mereka cenderung tidak datang.

#### **4.4.1.13. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

BKM berfungsi sebagai mediator dalam pengelolaan dan penyaluran dana P2KP (sekarang PNPM) bagi masyarakat.<sup>7</sup> BKM Sumurbatu berdiri tahun 2001, membawahi 6 KSM (kelompok swadaya masyarakat) yaitu 5 KSM di RW 01 sampai RW 05, ditambah 1 KSM sosial. Sementara di RW 06 dan 07 dimana tingkat kesejahteraan warganya relatif baik tidak dibentuk KSM.

BKM mengelola dana P2KP I tahap 2 sebesar Rp 100.000.000 dengan alokasi 20 persen untuk fisik yang telah direalisasikan untuk pembangunan jalan setapak dan perbaikan sarana MCK warga miskin, 30 persen untuk kegiatan sosial, dan 50 persen untuk pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman dana

---

<sup>7</sup> P2KP = Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, PNPM = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

bergulir. Dalam pelaksanaannya belum semua masyarakat miskin merasakan manfaatnya. Akibatnya hubungan BKM dengan masyarakat dirasakan cukup jauh.

Untuk tahun 2008, Sumurbatu kembali mendapat alokasi dana PNPM sebesar Rp 250.000.000. Sebesar 30 persen dialokasikan untuk kegiatan fisik dan sosial sesuai arahan dari Bappeda Kota Bekasi dan telah digunakan untuk rehabilitasi rumah warga miskin dari berlantai tanah menjadi lantai semen (*difloor*), sementara untuk alokasi ekonomi belum direalisasikan.

Pihak pengurus BKM mengeluhkan sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi program. Karena masyarakat cenderung tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan, kecuali ketika akan ada pencairan dana atau kegiatan-kegiatan pemberian bantuan. Akibatnya, kegiatan yang bersifat pembinaan keswadayaan tidak bisa berjalan. Dana bergulir yang telah disalurkan kepada warga sekarang sudah tidak berjalan lagi akibat pengembalian dari peminjam pertama dana bergulir tersebut macet. Menurut pengurus, salah satu penyebab macetnya pengembalian dana bergulir adalah karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa dana bergulir dari P2KP tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan.

#### **4.4.1.14. Sekolah Alam Tunas Mulia**

Sekolah alam Tunas Mulia terletak di RT 02 RW 04 Kelurahan Sumurbatu berdekatan dengan SDN 01 Sumurbatu, di atas lahan seluas kurang lebih 2000 meter persegi. Berawal dari sebuah Taman Pengajian Qur'an atau TPQ pada tahun 2002 di musholla Al-Insan di sekitar lokasi TPA sampah. Sasarannya adalah anak-anak pemulung pendatang. Selain TPQ untuk anak-anak juga ada pengajian untuk kaum ibu.

Mulai tahun 2004 resmi menjadi sebuah PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat dan menyediakan program Kejar Paket A dan B, 3 tahun terakhir mulai mengelola PAUD atau pendidikan anak usia dini, semuanya secara gratis. Sampai saat ini jumlah siswa sudah mencapai 180 anak, terdiri dari 96 siswa PAUD dan sisanya kejar paket A dan B. Meski sasaran awalnya adalah anak-anak pemulung, saat ini pembinaan mulai menyentuh masyarakat lokal. Lulusan dari

sekolah ini yang telah mendapat ijazah persamaan adalah 6 orang untuk kejar paket A dan 4 orang untuk kejar paket B. Sedikitnya lulusan dibanding jumlah siswa antara lain karena seringkali anak-anak pemulung pindah dan tidak menyelesaikan studinya. Meski demikian pihak sekolah yakin bahwa pendidikan mereka akan tetap bermanfaat bagi anak didiknya.

Pihak pengelola sekolah cukup pandai memanfaatkan peluang demi keberlangsungan sekolah. Yaitu dengan menjalin kerjasama ke berbagai pihak terutama Portal Infaq (sebuah lembaga ZISWAF) yang sangat membantu penyediaan lahan dan operasional sekolah. Ada pula program-program CSR dari beberapa perusahaan, sehingga pihak sekolah telah sering melakukan aksi-aksi sosial untuk masyarakat setempat seperti pengobatan gratis, mengadakan pernikahan masal bagi pasutri tidak mampu yang belum memiliki surat nikah.

Pengelola sekolah juga memanfaatkan program-program pemerintah seperti :

- Membentuk kelompok tani Makmur yang tergabung dalam PPNSI (Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia) Kota Bekasi dan telah mendapatkan bantuan dari Menteri Pertanian berupa 15 ekor sapi.
- Mengajukan bantuan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui program KUPP (kewirausahaan untuk pemuda produktif) bagi PKBM berupa pelatihan beternak bebek dan pengolahan telur asin yang diikuti oleh 20 orang. Telah dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2009, di akhir pelatihan mendapat bantuan 150 ekor bebek yang menjadi modal awal usaha beternak bebek di kelompok tani. Usaha pengolahan telur asin akan mulai dijalankan dalam 6 bulan ke depan, setelah bebek yang ada mulai bertelur.

Dengan memanfaatkan program tersebut, selain bergerak di pendidikan, sekolah alam juga telah melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa usaha penggemukan sapi dan ternak bebek. Pihak sekolah berharap usaha tani yang dikembangkan ini akan menjadi mata pencaharian alternatif bagi para pemulung, terutama yang sudah lama menetap di wilayah setempat agar dapat keluar dari usaha sampah. Usaha ternak bebek dipilih karena tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa menghasilkan pendapatan harian dari produksi telur bebek. Dalam usaha tani tetap berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada,

seperti pakan bebek yang memanfaatkan sampah restoran di TPA berupa kepala-kepala ikan, tahu atau roti yang kadaluwarsa yang jumlahnya sangat berlimpah. Tanpa biaya, tetapi berprotein tinggi sehingga sangat mendukung produktivitas bebek.

Pihak pengelola Sekolah Alam telah melakukan pemberdayaan secara terpadu, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sekaligus pembinaan mental spiritual yang dapat menjadi model pemberdayaan di tengah masyarakat Sumurbatu. Selain itu juga telah membuat jaringan (*networking*) yang sangat baik dengan berbagai pihak yang turut menunjang keberhasilan program-programnya.

Sekolah Alam Tunas Mulia – Portal Infaq sudah sangat dikenal di luar wilayah Sumurbatu. Melalui website [www.portalinfaq.org](http://www.portalinfaq.org), masyarakat umum maupun dunia usaha mengenal sekolah ini. Berbagai media mulai dari dalam negeri hingga luar negeri seperti Al-Jazeera pernah meliputnya. Namun demikian, ternyata di tengah masyarakat lokal, sekolah ini belum cukup dikenal secara luas. Sehingga dalam diskusi kelompok, namanya tidak ikut disebutkan sebagai lembaga di masyarakat. Hal ini wajar mengingat sekolah alam sejak awal lebih berkonsentrasi pada pemulung pendatang. Satu hal lagi sekolah ini belum bersinergi dengan lembaga lain yang ada di Sumurbatu. Misalnya, PPL selaku Pembina kelompok tani tidak tahu keberadaan kelompok tani makmur. Pihak sekolah mengakui, bahwa mereka selalu menginformasikan kegiatannya kepada lurah juga ketua LPM, namun jika seandainya ada tindak lanjut, pihak pengelola menginginkan hal tersebut datang dari inisiatif lurah atau LPM dan bukan dari pihak sekolah.

Mengenai pemberdayaan masyarakat lokal, pihak sekolah (dalam hal ini bapak Juwarto) mempunyai pengalaman pribadi, yaitu pembuatan emping melinjo dengan bahan dasar melinjo yang sangat mudah diperoleh di wilayah setempat. Pada saat itu, masyarakat lokal di RW 05 khususnya kaum ibu diberikan pelatihan membuat emping selama satu bulan dengan diberi upah. Setelah pelatihan, dengan peralatan dari Pak Juwarto, ibu-ibu ini mulai memproduksi melinjo. Usaha ini cukup menguntungkan, dengan perhitungan bahan baku 3 kilogram melinjo seharga @Rp 1.000,- akan menghasilkan 1 kilogram emping yang laku di pasaran

seharga Rp 20.000 per kilogram, sehingga dari setiap kilogram emping, pendapatan kotor adalah Rp 17.000. Pak Juwarto dapat memberikan upah sebesar Rp 12.000 per hari per orang dengan asumsi setiap orang memproduksi minimal 1 kilogram emping setiap harinya. Namun, ternyata produktivitas ibu-ibu ini rendah, sehingga target tersebut tidak pernah tercapai dan lama kelamaan produksi terhenti. Usaha ini pernah dilanjutkan dengan melibatkan ibu-ibu warga perumahan (bukan masyarakat lokal) dan ternyata target produksi minimal 1 kilogram per hari tersebut dapat tercapai. Pengalaman tersebut menunjukkan etos kerja masyarakat lokal Sumurbatu yang umumnya rendah.

#### 4.4.2. Modal Sosial Masyarakat

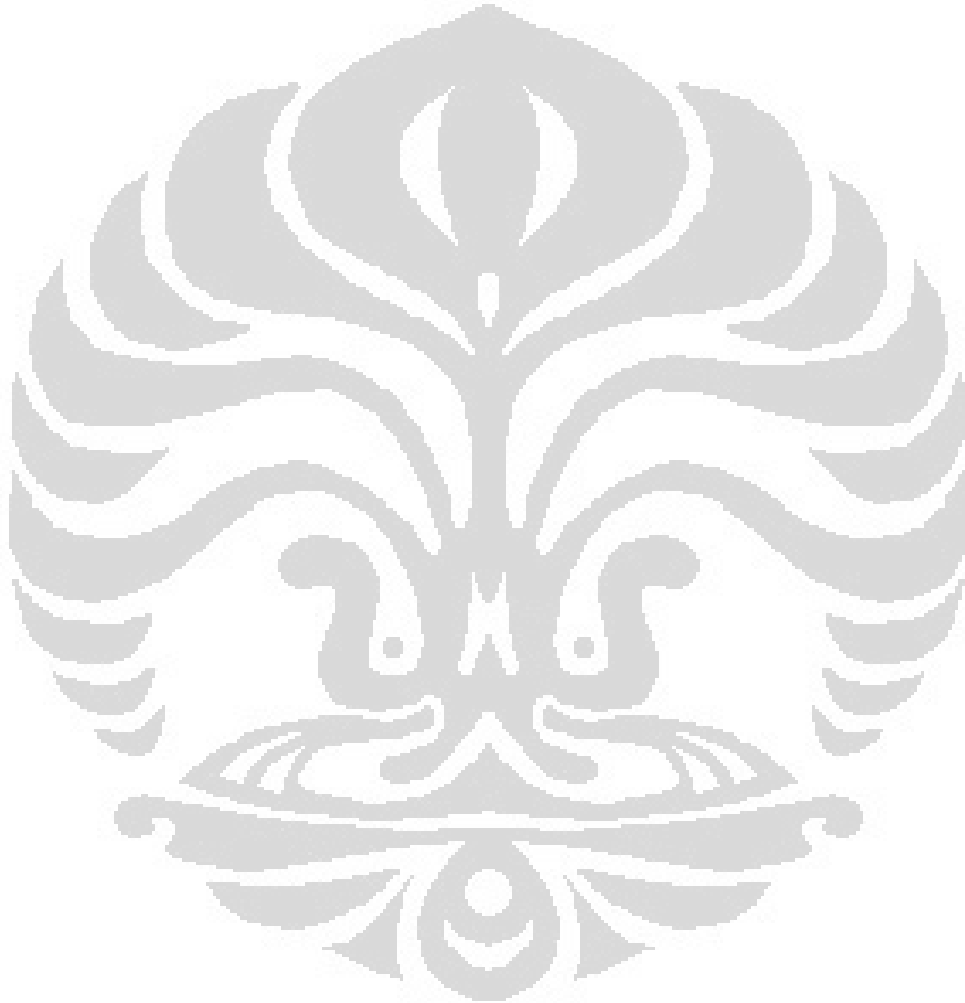
Jika kembali pada konsep modal masyarakat yang berupa *bonding*, *bridging* dan *linking*, maka masyarakat di lokasi penelitian nampaknya masih memiliki *bonding* yang kuat dalam bentuk formalitas agama yang tampak dari maraknya kelompok-kelompok pengajian atau majelis ta'lim. Data kelurahan 2008 menyebutkan ada 25 kelompok di wilayah ini.

Namun di luar bentuk formalitas agama tersebut, ikatan antar masyarakat sudah mulai melemah akibat adanya mental materialistis, atau memandang suatu ikatan berdasarkan materi atau uang. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan *bridging* di dalam masyarakat yang juga lemah. Kurang adanya koordinasi atau ikatan antar kelompok atau antar lembaga dalam masyarakat.

Apa yang terjadi dapat dijelaskan dengan konsep *linking capital* yang menjelaskan hubungan antara masyarakat kecil dengan penguasa, pemerintah atau kelompok yang memiliki kekuasaan lainnya. Akibat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok penguasa di masa lalu, timbul rasa tidak percaya dari masyarakat, demikian pula sebaliknya. Rasa saling percaya (*mutual trust*) yang cenderung lemah, tercermin dari norma-norma yang muncul di masyarakat seperti pinjaman modal usaha dari pemerintah tidak perlu dikembalikan, sehingga dana bergulir mengalami kemacetan dan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lain yang belum menerima bantuan. Dari sisi penguasa juga timbul

rasa tidak percaya kepada masyarakat, dimana masyarakat dipandang sebagai penyandang sifat malas, tidak bisa berubah, dan tidak jujur.

Sehubungan dengan modal sosial yang ada, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan *bonding* yang masih ada, yaitu dalam bentuk formalitas agama di kelompok pengajian dalam rangka menumbuhkan modal sosial yang lain.



## **BAB 5**

### **IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA SWOT**

#### **5.1. Identifikasi Permasalahan Umum**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab 4, dapat ditarik beberapa permasalahan umum terkait kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, antara lain :

- Kesejahteraan masyarakat lokal umumnya rendah akibat dari tingkat pendapatan yang rendah.
- Potensi pertanian yang cukup besar kurang dikembangkan dan tidak didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.
- Pendapatan masyarakat petani rendah karena produktivitas pertanian yang rendah.
- Kualitas sumber daya manusia yang rendah terutama karena tingkat pendidikan yang rendah.
- Tingkat pengangguran yang tinggi akibat dari kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga tidak terserap di sektor industri.
- Rawan terjadi kriminalitas akibat banyaknya pengangguran di tengah masyarakat
- Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah. Jika ada yang menganggap pendidikan penting, baru sebatas untuk memenuhi persyaratan bekerja di perusahaan industri.
- Etos kerja yang rendah atau adanya sifat malas dari masyarakat lokal.
- Berkembangnya budaya materialistis dan ingin serba cepat (*instan*) akibat arus modernisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir dari masyarakat lokal.

- Rasa kebersamaan di tengah masyarakat mulai berkurang karena berkembangnya budaya materialistis sehingga seringkali sebuah ikatan terjadi karena adanya imbalan uang atau materi.
- Pencemaran lingkungan terutama polusi udara dan pencemaran air sungai akibat penumpukan dan pengolahan sampah yang belum memadai oleh para pelaku usaha sampah di luar lokasi TPA sampah.
- Banyaknya pemulung pendatang yang mendirikan gubuk-gubuk liar di luar lokasi TPA sampah menimbulkan kekumuhan di sebagian wilayah.
- Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat belum memiliki arah yang jelas untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat hanya dipahami sebatas pembangunan sarana prasarana fisik dan belum menyentuh pemberdayaan dari sisi mentalitas.
- Telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat dari kompensasi sampah di masa lalu dan masih ada risiko penyimpangan akibat tidak ada pemantauan dari instansi yang berwenang.
- Berbagai program pemerintah baik berupa pelatihan-pelatihan maupun bantuan modal untuk pemberdayaan masyarakat belum berhasil memberdayakan masyarakat lokal, antara lain karena lemahnya *mutual trust* antara pemerintah dan masyarakat, misalnya anggapan masyarakat bahwa pinjaman modal usaha dari pemerintah tidak perlu dikembalikan, sebaliknya anggapan pemerintah bahwa masyarakat itu malas, sulit berubah dan tidak akan mengembalikan pinjaman pemerintah.

## 5.2. Analisa SWOT

Untuk memperoleh gambaran potensi pemberdayaan masyarakat ke depan dan strategi yang bisa dikembangkan maka dilakukan analisa *SWOT* (*strength, weakness, opportunity, threat*) dengan terlebih dahulu menyusun matriks identifikasi *SWOT* berdasarkan hasil penelitian. Kategori dalam matriks identifikasi dibagi menurut modal yang ada di tengah masyarakat meliputi modal



manusia (*human capital*), modal lingkungan (*environmental capital*), modal fisik (*physical capital*), modal finansial (*financial capital*) dan modal sosial (*social capital*) . Selain lima kategori modal masyarakat di atas, dalam matriks juga dilakukan identifikasi terhadap peluang dan tantangan yang ada di sektor pertanian dan sektor di luar pertanian. Selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 7. Secara ringkas, hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut :

### 5.2.1. *Strengths*

Berdasarkan matriks identifikasi SWOT, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama masyarakat adalah potensi pertanian yang cukup besar, infrastruktur yang sudah cukup lengkap dan memadai, memiliki lembaga-lembaga masyarakat lengkap dengan kepengurusannya, tersedianya dana pemberdayaan masyarakat yang cukup besar dan memiliki kelompok-kelompok pengajian dengan ikatan yang kuat. Beberapa poin kekuatan di Kelurahan Sumurbatu adalah :

- Masih tersimpan potensi yang besar di sektor pertanian baik dari jumlah SDM yang cukup banyak, serta mulai muncul ketertarikan SDM muda untuk menekuni pertanian terutama pertanian di lahan sempit, bernilai jual tinggi seperti beternak lele, atau budidaya ikan hias
- Potensi pertanian berupa tersedianya lahan pertanian yang masih luas,
- Sarana dan Prasarana fisik yang memadai seperti sarana transportasi berupa jalan dan angkutan, yang turut mendukung pemasaran hasil-hasil pertanian, serta sarana lainnya seperti sarana ibadah, gedung-gedung sekolah, gedung kantor, sarana kesehatan, dan listrik.
- Tersedia dana pemberdayaan masyarakat yang besar dari kompensasi sampah, baik yang dikelola oleh LPM maupun yang diterima langsung oleh warga.
- Telah memiliki lembaga-lembaga masyarakat seperti LPM, BKM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, PPL.
- Hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dengan warga pendatang, baik yang tinggal di kompleks perumahan maupun pemulung yang tinggal di lokasi TPA.

- Terdapat kelompok-kelompok pengajian yang masih mencerminkan *bonding* yang kuat antar anggota masyarakat

### 5.2.2. *Weakness*

Terkait dengan kelemahan, beberapa kelemahan yang mendasar di Kelurahan Sumurbatu antara lain :

- Tingkat pendidikan sumber daya manusia yang rendah serta kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah.
- Adanya sifat malas sekaligus sifat materialistis dalam diri masyarakat yang seringkali mengukur sesuatu dari adanya imbalan uang atau materi.
- Sebagian wilayah telah mengalami pencemaran lingkungan akibat banyaknya perusahaan pengolahan sampah di luar lokasi TPA sampah, terutama polusi udara dan pencemaran sungai
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi prioritas utama dari masyarakat melebihi prioritas pembangunan SDM.
- Terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana pemberdayaan masyarakat oleh LPM di masa lalu.
- Warga tidak memanfaatkan dana tunai dari kompensasi sampah untuk menabung
- Rasa kebersamaan antar warga mulai lemah karena masyarakatnya mulai berorientasi pada materi
- Lembaga-lembaga masyarakat yang ada belum memainkan peran yang semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 5.2.3. *Opportunities*

Meskipun masih banyak kelemahan mendasar pada masyarakat Kelurahan Sumurbatu, namun ada beberapa peluang yang masih mungkin untuk dapat dimanfaatkan. Beberapa peluang penting yaitu :

- Peluang sektor pertanian , yaitu
  - Komitmen pemerintah pusat (Departemen Pertanian) dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memajukan pertanian.

- Pemasaran hasil pertanian yang sangat mudah karena wilayah ini telah lama dikenal sebagai sentra pertanian di Kota Bekasi
- Terdapat lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pertanian yang dapat menjadi model pemberdayaan.
- Peluang lain di luar sektor pertanian antara lain :
  - Kecamatan Bantargebang merupakan daerah pengembangan industri
  - Terbukanya peluang kerja di bidang usaha pengolahan sampah karena keberadaan TPA sampah.
  - Sering dijadikan daerah sasaran program-program bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum untuk penanggulangan kemiskinan seperti BLT, raskin, P2KP, posdaya, bakti sosial , pelatihan-pelatihan ketrampilan dan penelitian.
  - Biaya pendidikan dasar (SD dan SMP) dan biaya pelayanan kesehatan gratis

#### **5.2.4. Threats**

Beberapa tantangan yang harus diantisipasi oleh masyarakat kelurahan Sumurbatu dalam menghadapi permasalahan ke depan, antara lain adalah

- Di sektor pertanian terdapat beberapa tantangan atas keberlanjutannya sebagai mata pencaharian masyarakat lokal, yaitu :
  - Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi tahun 2008 – 2028 tidak lagi mencantumkan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk pertanian.
  - Tidak ada Dinas Pertanian Kota Bekasi
  - Kemungkinan perluasan lahan pemukiman oleh pengembang dan perluasan lahan TPA sampah
- Di luar sektor pertanian, tantangan yang dihadapi antara lain :
  - Pengolahan sampah secara tradisional di luar lokasi TPA yang dilakukan para pelaku usaha sampah memperparah pencemaran lingkungan yang antara lain disebabkan Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki peraturan

dan sanksi yang jelas terhadap pelaku usaha sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan

- Menyangkut modal finansial, tidak ada pemantauan yang jelas dari instansi terkait terhadap pengelolaan dana kompensasi sehingga risiko terjadinya penyimpangan cukup besar.
- Lowongan pekerjaan di sektor industri mempersyaratkan ketrampilan atau tingkat pendidikan tertentu, terutama setingkat SMU

### **5.3. Identifikasi Akar Masalah**

Pada identifikasi permasalahan umum telah diuraikan mengenai kesejahteraan masyarakat lokal yang umumnya masih rendah akibat dari tingkat pendapatan yang rendah dan berbagai permasalahan umum yang terjadi di wilayah setempat. Atas dasar identifikasi permasalahan umum tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil analisa SWOT sebelumnya, di sektor pertanian terdapat kekuatan dalam diri masyarakat (SDM dan lahan pertanian) berikut peluang dari luar (berupa kemudahan pemasaran hasil, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta contoh pemberdayaan yang sudah ada). Selama ini pemberdayaan masyarakat dari sektor pertanian cenderung terabaikan mengingat kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak mendukung pertanian. Hal ini membuat sektor pertanian layak dipilih menjadi sumber pemberdayaan masyarakat di wilayah Sumurbatu, terutama untuk pemberdayaan ekonomi.

Dari hasil analisa SWOT juga diidentifikasi adanya peluang bagi masyarakat lokal di sektor industri, namun peluang tersebut menjadi sangat sulit untuk diambil mengingat kelemahan SDM yang ada yaitu tingkat pendidikan rendah sehingga tidak memenuhi syarat yang diminta sektor industri. Pemberdayaan masyarakat berupa perbaikan tingkat pendidikan formal dapat ditempuh akan tetapi memerlukan waktu yang relatif panjang, sementara saat ini tingkat pengangguran relatif tinggi. Untuk peluang usaha pengolahan sampah, sampai saat ini telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan pemerintah berupa pelatihan pengolahan sampah dan kewirausahaan pemulung, bahkan bantuan peralatan berupa mesin pencacah sampah. Namun upaya-upaya tersebut juga belum membawa hasil sebagaimana

yang diharapkan karena tanggapan dari pihak pemulung yang kurang mendukung. Hal ini tampak antara lain dari keengganan para pemulung untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan dan memilih tetap bekerja dengan cara lamanya.

Berangkat dari berbagai pertimbangan tersebut, dalam pencarian akar masalah ini, penulis memulai dari kesejahteraan masyarakat petani yang rendah akibat dari pendapatan yang rendah. Pendapatan masyarakat petani yang rendah adalah akibat dari produktivitas pertanian yang rendah. Beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas pertanian yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Kurangnya modal yang dimiliki petani sehingga tidak mampu memproduksi pada skala ekonomis,
2. Kurangnya pengetahuan petani misalnya tentang penyakit tanaman dan cara mengatasinya sehingga produksi menurun,
3. Petani tidak pernah membuat rencana usaha karena tidak tahu cara membuat perencanaan yang benar, dan
4. Dampak dari pencemaran lingkungan.

Faktor kekurangan modal petani disebabkan petani tidak memiliki akses terhadap modal, yang juga disebabkan oleh paling tidak empat hal , yaitu petani tidak memiliki tabungan, bank yang tidak memberi akses modal pada petani miskin, bantuan modal pemerintah yang tersedia bukan ditujukan untuk sektor pertanian, dan jika ada bantuan atau program yang ditujukan untuk sektor pertanian tidak dapat diakses oleh petani karena kelemahan kelembagaan, dalam hal ini di Kota Bekasi tidak ada Dinas Pertanian Kota yang berujung pada masalah kelemahan dalam kebijakan pemerintah. Sementara penyebab petani tidak memiliki tabungan ada dua , yaitu kembali pada pendapatan yang rendah dan petani belum memiliki kesadaran untuk menabung karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya menabung.

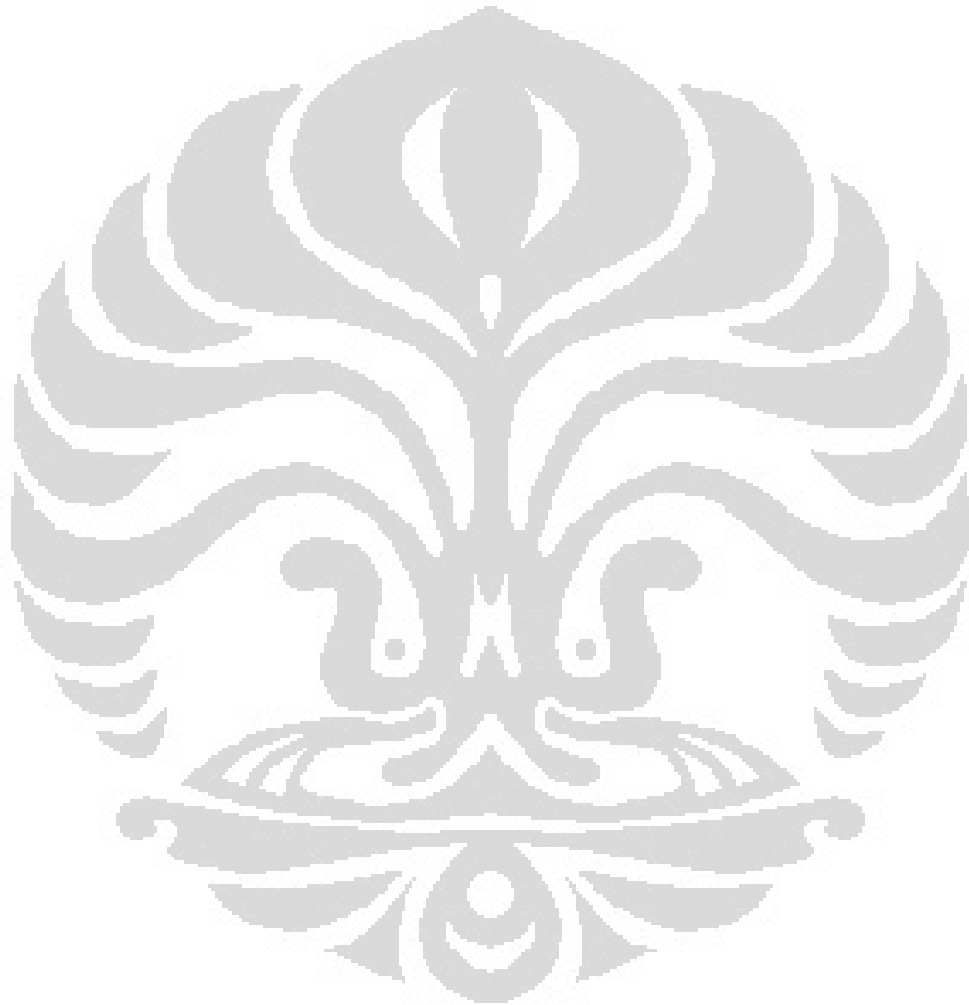
Faktor kedua penyebab rendahnya produktivitas pertanian adalah kurangnya pengetahuan petani yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan

dan juga kurangnya penyuluhan yang diperoleh petani. Tingkat pendidikan rendah disebabkan banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak ada biaya yang sebenarnya akan kembali lagi kepada tingkat pendapatan orang tua yang rendah. Sementara kurangnya penyuluhan pertanian adalah akibat dari kelemahan kelembagaan yang berujung pada masalah kelemahan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pertanian.

Faktor ketiga adalah petani selama ini menjalankan usahanya dengan cara tradisional, tidak pernah membuat rencana usaha ataupun memperhitungkan antara masukan dan keluaran dari usahanya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan petani akan pentingnya rencana usaha yang penyebabnya telah dijelaskan di atas.

Faktor keempat penyebab rendahnya produktivitas pertanian adalah dampak dari pencemaran lingkungan. Dampak ini dirasakan terutama oleh petani padi yang terpaksa harus mengairi sawahnya dengan air sungai yang tercemar pada saat musim kemarau. Pencemaran terjadi disebabkan tidak adanya pengolahan limbah usaha sampah yang dilakukan di luar lokasi TPA. Hal ini masih terus terjadi karena belum ada aturan dan sanksi yang tegas yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada para pengusaha yang melakukan pencemaran lingkungan. Masalah ini kembali berakar pada kelemahan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Gambaran mengenai pencarian akar masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat secara skematis melalui diagram tulang ikan pencarian akar masalah di gambar 5.1. Diagram tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk menampung seluruh permasalahan yang ada, namun diharapkan dapat berguna sebagai patokan dalam menganalisa SWOT untuk melihat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal ke depan terutama adalah analisa terhadap masalah utama yang dapat dijadikan fokus penanganan yang akan dituangkan dalam skenario rencana aksi .



#### 5.4. Penentuan Prioritas Masalah

Berdasarkan analisa SWOT dan pencarian akar masalah yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa masalah yang menjadi prioritas untuk ditangani berdasarkan pertimbangan besarnya masalah tersebut, potensi masalah untuk menjadi lebih besar, frekuensi masalah itu terjadi dan dampaknya terhadap banyak orang. Bila dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, prioritas masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

##### Kekuatan :

Berpijak pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki Kelurahan Sumurbatu, tampak bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki **potensi di sektor pertanian berupa masih tersedianya tanah pertanian yang cukup luas dan SDM petani yang cukup banyak**. Potensi ini **didukung dengan infrastruktur yang memadai** berupa sarana dan prasarana fisik **yang memudahkan pemasaran dan pengangkutan hasil-hasil pertanian** , sumber dana pemberdayaan masyarakat yang besar, dan telah terbentuknya lembaga-lembaga masyarakat dengan struktur kepengurusannya, serta memiliki kelompok-kelompok pengajian dengan ikatan yang kuat. Sumber-sumber daya tersebut sangat memadai dan potensial untuk digunakan sebagai modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah setempat.

##### Kelemahan

Hampir seluruh kelemahan yang ada berkaitan dengan **masalah kualitas sumber daya manusia yang rendah tampak dari tingkat pendidikan yang rendah serta dari sisi mentalitas adanya sifat materialistis, malas**. Kelemahan SDM terjadi di sisi intelektual dan mentalitas.

##### Peluang

Melihat peluang-peluang yang telah diuraikan sebelumnya, hampir seluruh **peluang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah (pusat dan propinsi) maupun dukungan dari masyarakat yang berada di luar**



**masyarakat lokal.** Sangat sedikit peluang yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.

### Tantangan

Meskipun terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan peluang pada masyarakat, namun **banyak pula kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bekasi yang justru menjadi tantangan** bagi terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya petani.

Atas dasar tersebut dapat ditentukan bahwa terdapat prioritas masalah yang harus segera diatasi terutama yang penyebabnya berasal dari dalam diri masyarakat sendiri dan dapat diatasi oleh masyarakat. Sementara untuk beberapa masalah yang disebabkan kelemahan kelembagaan dan kelemahan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah tidak menjadi prioritas dalam penyusunan skenario rencana aksi, karena berasal dari luar masyarakat dan sifatnya tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh masyarakat.

Masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah **rendahnya produktivitas pertanian** terutama yang disebabkan oleh :

1. Petani tidak membuat rencana usaha karena kurangnya pengetahuan, dan
2. Kurangnya modal petani dalam menjalankan usahanya

Masalah mentalitas masyarakat lokal umumnya dan masyarakat petani khususnya juga menjadi masalah yang penting untuk dibenahi, namun demikian tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Mengingat masalah mentalitas ini cukup mendasar maka penanganannya akan dilakukan secara terus menerus, melekat dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dari skenario *action plan*.

## BAB 6

### SKENARIO ACTION PLAN

Berdasarkan analisa SWOT dan pencarian akar masalah yang diuraikan dalam bab 5 telah diidentifikasi bahwa prioritas masalah utama yang perlu segera diatasi adalah masalah **rendahnya produktivitas pertanian** terutama yang disebabkan oleh :

1. Petani tidak membuat rencana usaha karena kurangnya pengetahuan, dan
2. Kurangnya modal petani dalam menjalankan usahanya

Selanjutnya akan dilakukan penyusunan suatu skenario *Action Plan* . Disini digunakan istilah skenario karena penyusunannya merupakan justifikasi penulis berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan skenario ini adalah

- Masyarakat lokal di Kelurahan Sumurbatu sudah sangat sering mendapatkan berbagai pelatihan dan bantuan modal untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah yang sifatnya *top down* dimana inisiatif berasal dari instansi pemerintah, dan masyarakat hanya menjadi peserta
- Dari berbagai macam program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya *top-down* tersebut belum pernah terjadi tindak lanjut yang menghasilkan pemberdayaan masyarakat.
- Skenario Rencana aksi yang dirumuskan hendaknya merupakan rencana yang paling mungkin untuk direalisasikan, berasal dari inisiatif masyarakat lokal dan mendapat dukungan dari *stakeholder* yang terkait agar dapat benar-benar berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk dapat menjadi sebuah *Action Plan* , dari skenario *action plan* yang sudah ada masih harus dilakukan proses sosialisasi, koordinasi dan pementapan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang dapat berperan, proses selengkapnya sebagai berikut :

- Koordinasi seluruh *stakeholders* secara sinergis dan sosialisasi skenario *action plan* kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan *stakeholders* lainnya yang berpengaruh di masyarakat terutama tokoh masyarakat khususnya di bidang pertanian dan tokoh agama.
- Pembentukan forum pemberdayaan masyarakat yang mempertemukan seluruh *stakeholders* yang akan terlibat di lapangan serta unsur-unsur yang dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat . Dalam forum ini juga dilakukan penentuan koordinator pelaksana.
- Pemantapan skenario *action plan* menjadi *action plan* melalui proses curah pendapat (*brain storming*) dalam forum pemberdayaan masyarakat.
- Penyiapan para *stakeholders* sebagai kader pelaksana program

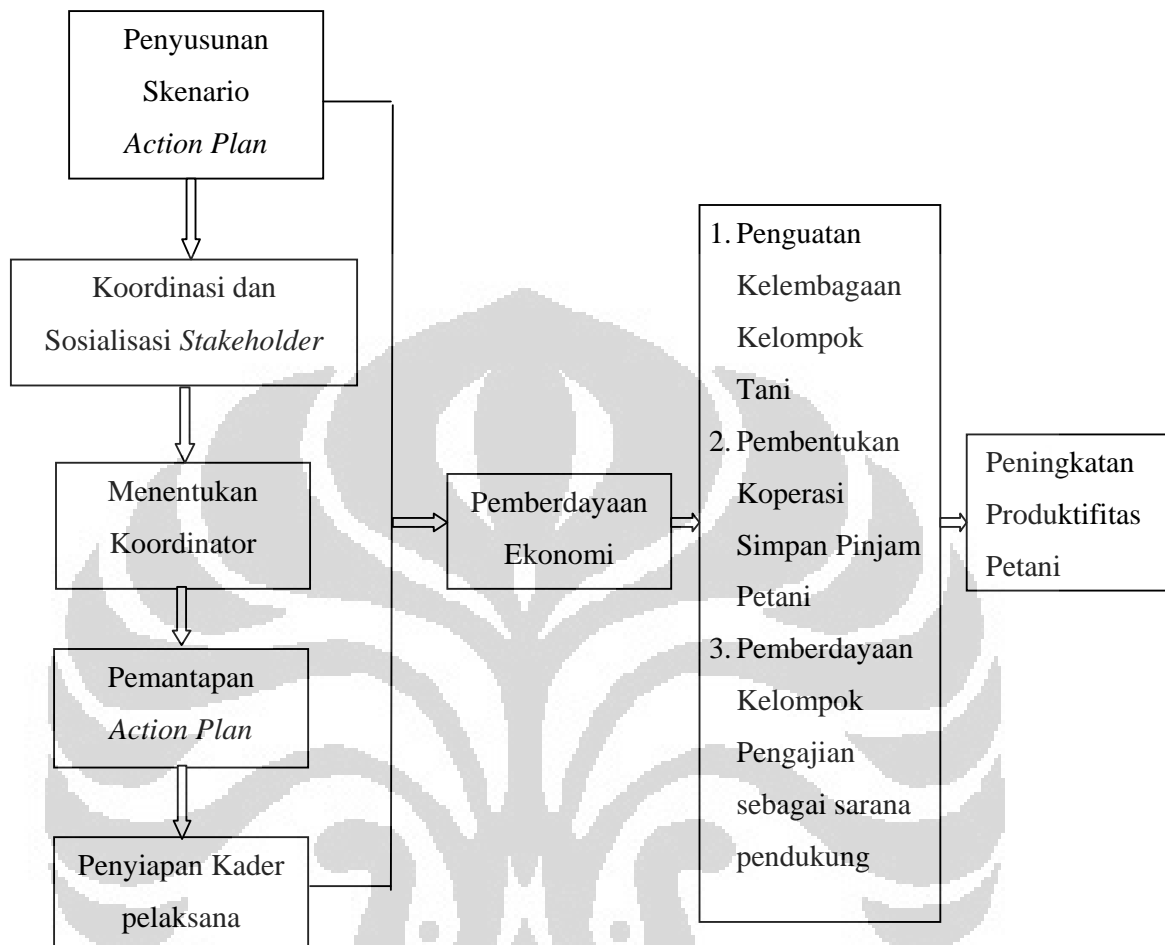
### **6.1. Bentuk Kegiatan Skenario Action Plan**

Dalam bab 2 disebutkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat dapat bervariasi, dimana berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi, kesehatan, hukum, lingkungan, sosial budaya, politik hingga pemberdayaan spiritual.

Dan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan prioritas masalah yang dipilih yaitu peningkatan produktivitas pertanian maka diperlukan suatu bentuk intervensi melalui pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui program :

1. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani
2. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam untuk Petani
3. Pemberdayaan Kelompok Pengajian sebagai sarana pendukung pemberdayaan ekonomi

Gambar 6.1. Skema Pemberdayaan Masyarakat



## 6.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki bentuk sebagai berikut :

### 6.2.1. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani

Kelompok tani yang saat ini tampak aktif dalam masyarakat kelurahan Sumurbatu hanya ada satu kelompok, itupun belum berfungsi secara maksimal. Pemberdayaan fungsi kelompok tani antara lain akan dilakukan dengan menjadwalkan kembali pertemuan-pertemuan rutin anggota kelompok tani dan mengundang PPL untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam pertemuan tersebut. Bila dimungkinkan, dilakukan pembentukan pengurus kelompok tani yang membidangi spesialisasi usaha tani tertentu dan membentuk

sub kelompok tani yang sesuai, misalnya sub kelompok petani peternak bebek, sub kelompok tani peternak lele, sub kelompok tani tanaman hias dan lain-lain sehingga memudahkan koordinasi antar petani dan mengoptimalkan hasil dari masing-masing kelompok. Dalam pertemuan-pertemuan kelompok tani yang dilakukan, mulai diberikan arahan untuk menekuni usaha tani berlahan sempit sebagai antisipasi atas tantangan alih fungsi lahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Masyarakat petani secara bertahap dikumpulkan oleh tokoh petani dengan dukungan dari aparat lurah berikut pengurus RT dan RW serta PPL. Pertemuan bisa dilakukan per RW mengingat banyaknya jumlah masyarakat petani. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pemetaan dan penggalian informasi terhadap kondisi pertanian yang ada, berapa jumlah petani di masing-masing wilayah, jenis usaha apa yang telah dilakukan, potensi pertanian yang dapat dikembangkan dan kendala yang dihadapi petani. Lalu dilakukan pemetaan berapa jumlah petani yang telah bergabung dalam kelompok dan berapa yang belum menjadi anggota kelompok.
- Tokoh petani atau PPL memberikan penyuluhan atau pemahaman mengenai organisasi kelompok tani, apa tujuan kelompok tani dan manfaatnya bagi petani jika bergabung dalam kelompok tani, juga disampaikan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk kelompok tani.
- Dalam pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, PPL dan juga aparat kelurahan disepakati pembentukan kelompok-kelompok tani baru ataupun pembentukan sub-sub kelompok tani dari kelompok yang sudah ada.
- Kelompok tani yang sudah terbentuk akan mengadakan pertemuan rutin dan akan mendapatkan pembelajaran mengenai rencana kerja kelompok, aturan bersama dalam kelompok dan pentingnya pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok.

- Dalam jangka panjang diharapkan kelompok tani akan berfungsi sebagai kelas belajar, wadah kerjasama dan unit produksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan pembentukannya.

*Stakeholder* yang dapat berperan : PPL, Ketua Kelompok tani, Lurah dan aparat Kelurahan, UPTD Pertanian Bantargebang, Pengurus RT dan RW.

### **6.2.2. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam untuk Petani**

Selama ini petani tidak memiliki akses kepada pinjaman modal. Petani tidak dapat meminjam dari bank, karena meski masih memiliki asset berupa tanah dan rumah, petani tidak memiliki penghasilan yang tetap atau kontinuitas usaha yang dapat dibuktikan secara formal. Pinjaman modal yang saat ini tersedia dari pemerintah bukan ditujukan untuk pertanian, mengingat program yang ada adalah untuk usaha dagang. Karena itu akan dibentuk koperasi simpan pinjam untuk petani yang nantinya akan memberikan akses permodalan bagi petani sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Langkah-langkah pembentukannya akan dilakukan sebagai berikut :

- Koperasi dibentuk oleh kelompok tani Subur Makmur yang saat ini sudah terbentuk dan beranggotakan kurang lebih 50 orang. Ketua Kelompok Tani akan mengkoordinir pertemuan-pertemuan awal untuk membentuk kesepakatan pendirian koperasi, meliputi : pemupukan modal awal yang berasal dari tabungan anggota. Pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota ini sangat penting, selain untuk membentuk modal awal juga agar para anggota mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi yang akan mereka bentuk. Waktu yang dibutuhkan untuk menabung diperkirakan sekitar 5 bulan. Anggota kelompok tani akan diarahkan untuk menabung dengan cara menyisihkan sebagian dari dana kompensasi sampah yang diterima tunai setiap triwulan. Selama masa itu akan tetap dilakukan pertemuan-pertemuan rutin yang menyepakati aturan main berikut pembentukan pengurus koperasi yang tentunya berasal dari anggota kelompok tani.

- Setelah pemupukan modal terlaksana segera dibentuk badan hukum koperasi. Dengan memiliki badan hukum, sebuah koperasi di Kota Bekasi dapat mengajukan pinjaman bantuan koperasi kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi Kota Bekasi sebesar Rp 50.000.000,- sekaligus mendapatkan pembinaan dari dinas terkait dalam pengelolaan koperasi. Diharapkan pinjaman ini akan menjadi stimulus bagi para anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha.
- Setelah memiliki badan hukum secara resmi dan mendapatkan pembinaan secara rutin , modal usaha mulai digulirkan kepada anggota. Pemberian pinjaman modal ditujukan kepada mereka yang telah membuat rencana usaha atau membuat proposal pemanfaatan modal. Kemampuan menyusun rencana ini akan diperoleh para anggota kelompok tani sebagai hasil dari program penguatan kelembagaan kelompok tani.
- Setelah perguliran pinjaman modal, pertemuan anggota koperasi dilakukan secara rutin sesuai kesepakatan dan dalam setiap pertemuan dilakukan evaluasi hasil usaha para anggota dan akan dipantau perkembangannya antara kondisi sebelum mendapat pinjaman modal dengan kondisi setelah mendapatkan pinjaman modal koperasi.

*Stakeholder* yang dapat berperan : Kelompok tani, tokoh masyarakat bidang pertanian, PPL, Dinas Koperasi, aparat kelurahan

### **6.2.3. Pemberdayaan Kelompok Pengajian sebagai sarana pendukung**

Kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah mengakar di dalam masyarakat dan hingga saat ini ikatan kuat yang masih dimiliki masyarakat berada di dalamnya. Masyarakat biasanya hadir tanpa harus diundang atau tanpa mengharapkan imbalan tertentu, karena kegiatan ini sudah terjadwal dengan baik dengan motivasi yang bersifat spiritual.

Untuk memberdayakan kelompok pengajian agar dapat menjadi sarana pendukung pemberdayaan ekonomi dalam dua program yang telah disebut sebelumnya , maka materi pengajian akan ditambah dengan materi mengenai

pemberdayaan ekonomi, etos kerja yang tinggi, dan motivasi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tidak hanya bagi diri sendiri tetapi bagi masyarakat luas. Materi yang menekankan ajaran bahwa tangan yang di atas (memberi) lebih dicintai Allah daripada tangan yang di bawah (meminta-minta) dan untuk dapat memberi maka seseorang harus berdaya secara ekonomi. Juga materi-materi lain yang intinya memberi pencerahan wawasan ekonomi yang selama ini tidak pernah dibahas dalam pengajian. Diharapkan dalam jangka panjang akan memberikan pengaruh pada perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dipandang perlu, aparat kelurahan dapat memanfaatkan acara-acara rutin kelompok pengajian ini untuk melakukan sosialisasi program dan arahan lain. Dimana biasanya sangat sulit untuk mengumpulkan warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi.

*Stakeholder* yang dapat berperan : tokoh agama dan tokoh masyarakat, aparat kelurahan, Pengurus RT dan RW

### **6.3. Tahapan Pelaksanaan Program**

#### Tahap Persiapan

Tahapan persiapan program meliputi upaya sosialisasi dan koordinasi program kepada seluruh *stakeholder* yang dapat berperan, dilanjutkan dengan penentuan koordinator pelaksana program yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan terlebih dahulu pemantapan *Action Plan* dalam bentuk *Brain Storming* atau curah pendapat untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat. Setelah seluruh masukan masyarakat diidentifikasi kemudian dilakukan penyiapan kader pelaksana dan infrastruktur yang dibutuhkan.

#### Tahap Jangka Pendek (< 6 bulan)

Program awal yang segera perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah :

- Dalam program penguatan kelembagaan kelompok tani mulai dilakukan peremuan-pertemuan antara masyarakat petani dengan *stakeholder* terkait



untuk melakukan pemetaan kondisi sekarang dan potensi pertanian yang ada, hingga pembentukan kelompok / sub kelompok tani.

- Dalam program pembentukan koperasi simpan pinjam dilakukan proses sosialisasi akan pentingnya koperasi dan pemupukan modal dari para anggotanya melalui tabungan.
- Memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian rutin untuk mulai memberikan materi-materi pemberdayaan ekonomi. Dilakukan secara terus menerus sesuai dengan jadwal yang sudah ada. *Stakeholder* yang terlibat melakukan koordinasi secara berkala.

#### Tahan Jangka Menengah (6 bulan sampai 1 tahun)

Dalam jangka menengah dapat dilihat :

- Telah terbentuk kelompok-kelompok tani baru atau sub-sub kelompok tani dari kelompok yang sudah ada, dimana masing-masing kelompok menjalankan aktivitas seperti : pertemuan rutin anggota, penyusunan rencana kerja kelompok, melakukan suatu usaha bersama , melakukan proses pembelajaran baik mengenai teknologi pertanian maupun rencana usaha tani.
- Pembentukan badan hukum koperasi dan perguliran pinjaman modal pada petani. Pemberian modal kepada anggota koperasi untuk meningkatkan produksi pertaniannya, misal untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, dengan terus menerus memperoleh pendampingan dari Ketua Kelompok Tani maupun PPL. Diharapkan tingkat pengembalian pinjaman modal dari anggota koperasi berjalan lancar mengingat bersamaan dengan program pinjaman modal juga dilakukan sosialisasi secara terus-menerus akan pentingnya kerjasama yang baik yang saling menguntungkan untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi dan juga dukungan dari sarana kelompok pengajian.

Jika ada kisah sukses dari hasil perguliran modal petani ini, akan disosialisasikan dalam pertemuan-pertemuan rutin anggota koperasi

maupun melalui kelompok-kelompok pengajian sehingga akan menimbulkan efek meniru dalam hal yang positif.

- Dari kelompok-kelompok pengajian dengan pengayaan materi diharapkan dalam jangka menengah ini mulai terlihat hasilnya berupa perubahan positif menyangkut perilaku masyarakat dan terciptanya *bonding* yang lebih kuat diluar formalitas agama, demikian pula dengan modal sosial lainnya.

#### Tahap Jangka panjang (> 1 tahun)

Mulai terjadi pemberdayaan ekonomi yang merupakan hasil sinergi dari program-program yang dilaksanakan . Terjadi peningkatan produktivitas pertanian dibandingkan dengan saat belum dilakukannya program. Hal ini terlihat dari peningkatan kuantitas hasil pertanian setelah dilakukannya program.

#### **6.4. Pengelolaan Program**

Mengingat selama ini masyarakat sering apatis dan tidak peduli dengan program atau kegiatan yang bersifat *top down* dan datang dari luar masyarakatnya, maka pengelolaan program diharapkan sejak awal benar-benar dilakukan melalui suatu forum yang dibentuk dari dalam masyarakat setempat (bukan oleh aparat pemerintah). *Stakeholders* lainnya diluar masyarakat setempat hanya berperan sebagai pendukung teknis dan fasilitator program, hal ini untuk menjaga sifat partisipatif dari program.

#### **6.5. Tidak Lanjut**

Setelah program-program di atas mulai berjalan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus yang tidak hanya melibatkan pengelola program tetapi juga masyarakat selaku pelaksana yang sebenarnya. Diharapkan setelah program berlangsung selama satu periode dapat dilakukan rancangan ulang program untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada, yang diketahui dari hasil evaluasi.



**MATRIKS IDENTIFIKASI**  
**KEKUATAN-KELEMAHAN-PELUANG-TANTANGAN (SWOT)**

NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
1.	<b>Modal Manusia</b> <i>(Human Capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM pertanian cukup banyak</li> <li>- Secara kuantitas lebih banyak SDM berusia muda</li> <li>- SDM muda mulai tertarik untuk menekuni pertanian terutama pertanian lahan sempit, bernilai jual tinggi seperti beternak lele, atau budidaya ikan hias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan SDM secara umum rendah</li> <li>- Keterampilan yang dimiliki masyarakat rendah</li> <li>- Etos kerja rendah / sifat malas</li> <li>- Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah</li> <li>- Budaya materialistis</li> <li>- Tidak mau merantau atau keluar dari wilayah asalnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pendidikan dasar (SD dan SMP) dan biaya kesehatan gratis</li> <li>- Terdapat lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada pengembangan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak warga pendatang yang memiliki tingkat pendidikan dan etos kerja yang lebih tinggi</li> <li>- Pembangunan yang pesat dari Kota Bekasi menyebabkan deras arus modernisasi</li> </ul>
2.	<b>Modal Lingkungan dan Sumber daya Alam</b> <i>(Environment Capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lahan pertanian yang masih luas</li> <li>- Sumber air tanah di sebagian besar wilayah masih baik, dapat dimanfaatkan sebagai air bersih</li> </ul>	<p>Sebagian wilayah telah mengalami Pencemaran lingkungan akibat banyaknya perusahaan pengolahan sampah di luar lokasi TPA sampah, terutama polusi udara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai dikembangkan teknologi pengolahan sampah secara modern di TPA sampah</li> <li>- Komitmen Walikota Bekasi untuk meraih Adipura 2010 yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan sampah secara tradisional di luar lokasi TPA yang dilakukan para pelaku usaha sampah TPA memperparah pencemaran</li> </ul>

		- Lahan tanah secara umum cukup subur	dan pencemaran sungai	mendorong kebersihan lingkungan	lingkungan yang terjadi
NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak pohon-pohon buah seperti rambutan dan melinjo</li> <li>- Lokasi wilayah yang strategis , relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan /pasar</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kota Bekasi belum memberi sanksi yang jelas terhadap perusahaan pengolah sampah di luar lokasi TPA yang menyebabkan pencemaran lingkungan</li> </ul>
3.	<b>Modal Fisik</b> <i>(physical capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan dan sarana transportasi memadai</li> <li>- Bangunan sekolah untuk pendidikan dasar sudah memadai</li> <li>- Sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas, klinik, MCK, air bersih sudah memadai</li> <li>- Sudah ada bangunan kantor yang memadai untuk lembaga Aparat Kelurahan, LPM, BKM, Karang Taruna, PKK</li> <li>- Masyarakat lokal</li> </ul>	Pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi prioritas utama dari masyarakat melebihi pembangunan SDM	Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi atas pembangunan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan tingginya arus migrasi ke wilayah ini , baik warga pendatang resmi maupun pemulung</li> </ul>

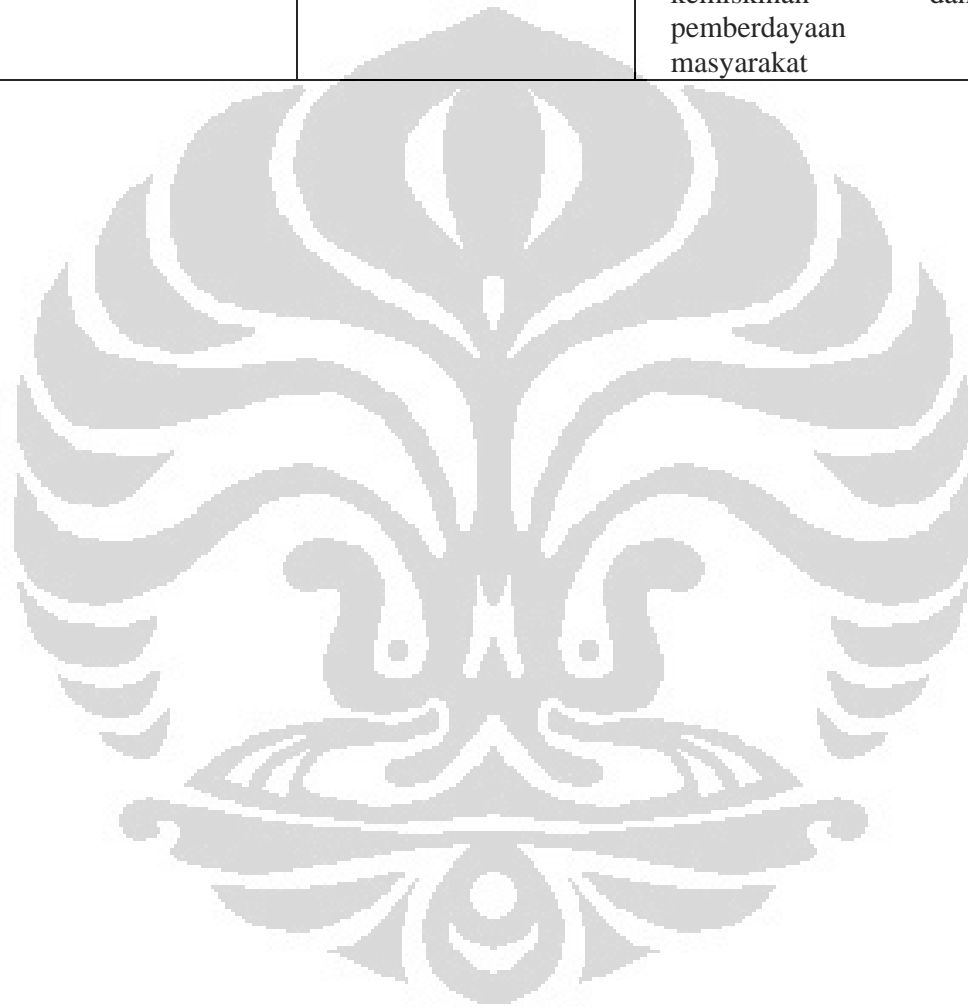
		umumnya masih memiliki asset berupa rumah dan tanah meski dalam luas yang terbatas			
NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
4.	<b>Modal Finansial</b> <i>(Financial Capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Dana pemberdayaan masyarakat yang besar dari kompensasi sampah yang dikelola LPM</li> <li>- Warga menerima dana kompensasi sampah dalam bentuk tunai Rp 200.000 setiap triwulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di masa lalu sering terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana pemberdayaan masyarakat oleh LPM</li> <li>- Warga tidak menggunakan dana tunai dari kompensasi untuk menabung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi penggunaan dana pemberdayaan masyarakat tidak ditentukan oleh Pemkot Bekasi tetapi diserahkan pada kesepakatan masyarakat</li> <li>- Terdapat Dana pinjaman bergulir dari proyek P2KP untuk masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemantauan atas penggunaan dana pemberdayaan masyarakat dari Instansi terkait di atasnya</li> <li>- Alokasi dana pemberdayaan masyarakat sangat tergantung dari hasil kesepakatan para pengurus LPM dan tokoh masyarakat yang belum tentu mencerminkan kebutuhan masyarakat</li> <li>- Anggapan masyarakat bahwa pinjaman modal uaha dari pemerintah tidak perlu dikembalikan.</li> </ul>
5.	<b>Modal Sosial Kemasyarakatan</b> <i>(Social Capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasa kebersamaan antar warga mulai lemah karena</li> </ul>		

		warga pendatang , baik yang tinggal di komplek perumahan maupun dengan pemulung pendatang	masyarakatnya mulai berorientasi pada materi		
NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat tokoh-tokoh agama (ustad) yang cukup berpengaruh di masyarakat</li> <li>- Terdapat kelompok-kelompok pengajian yang masih mencerminkan adanya <i>bonding</i> yang kuat antar anggota masyarakat</li> <li>- Sudah memiliki lembaga-lembaga masyarakat seperti Kelurahan, LPM, BKM, Karang Taruna, Kelompok Tani ,PKK dengan kepengurusannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga-lembaga yang ada belum optimal dalam menjalankan perannya</li> </ul>		
6.	<b>Peluang dan Tantangan sektor Pertanian</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pemerintah pusat (Departemen Pertanian) dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memajukan pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi tahun 2008 – 2028 tidak lagi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasaran hasil pertanian sangat mudah karena telah wilayah ini lama dikenal sebagai sentra pertanian di Kota Bekasi</li> </ul>	<p>mencantumkan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada Dinas Pertanian Kota Bekasi</li> </ul>
NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pertanian yang dapat menjadi model pemberdayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemungkinan Perluasan lahan pemukiman oleh pengembang dan Perluasan lahan TPA sampah</li> <li>- Pencemaran lingkungan</li> </ul>
7.	<b>Peluang dan tantangan Ekonomi di luar Sektor pertanian</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Bantargebang adalah daerah pengembangan industri</li> <li>- Terbukanya peluang kerja di bidang usaha pengolahan sampah karena keberadaan TPA</li> <li>- Sering dijadikan daerah sasaran program-program bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum untuk penanggulangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lowongan pekerjaan di sektor industri mempersyaratkan ketrampilan atau tingkat pendidikan tertentu, terutama setingkat SMU</li> </ul>



				kemiskinan pemberdayaan masyarakat	dan	
--	--	--	--	--	-----	--



**Universitas Indonesia**

**MATRIKS IDENTIFIKASI**  
**KEKUATAN-KELEMAHAN-PELUANG-TANTANGAN (SWOT)**

NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
1.	<b>Modal Manusia</b> <i>(Human Capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM pertanian cukup banyak</li> <li>- Secara kuantitas lebih banyak SDM berusia muda</li> <li>- SDM muda mulai tertarik untuk menekuni pertanian terutama pertanian lahan sempit, bernilai jual tinggi seperti beternak lele, atau budidaya ikan hias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan SDM secara umum rendah</li> <li>- Keterampilan yang dimiliki masyarakat rendah</li> <li>- Etos kerja rendah / sifat malas</li> <li>- Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah</li> <li>- Budaya materialistis</li> <li>- Tidak mau merantau atau keluar dari wilayah asalnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pendidikan dasar (SD dan SMP) dan biaya kesehatan gratis</li> <li>- Terdapat lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada pengembangan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak warga pendatang yang memiliki tingkat pendidikan dan etos kerja yang lebih tinggi</li> <li>- Pembangunan yang pesat dari Kota Bekasi menyebabkan derasnya arus modernisasi</li> </ul>
2.	<b>Modal Lingkungan dan Sumber daya Alam</b> <i>(Environment Capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lahan pertanian yang masih luas</li> <li>- Sumber air tanah di sebagian besar wilayah masih baik, dapat dimanfaatkan sebagai air bersih</li> <li>- Lahan tanah secara umum cukup subur</li> </ul>	Sebagian wilayah telah mengalami Pencemaran lingkungan akibat banyaknya perusahaan pengolahan sampah di luar lokasi TPA sampah, terutama polusi udara dan pencemaran sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai dikembangkan teknologi pengolahan sampah secara modern di TPA sampah</li> <li>- Komitmen Walikota Bekasi untuk meraih Adipura 2010 yang mendorong kebersihan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan sampah secara tradisional di luar lokasi TPA yang dilakukan para pelaku usaha sampah TPA memperparah pencemaran lingkungan yang terjadi</li> </ul>

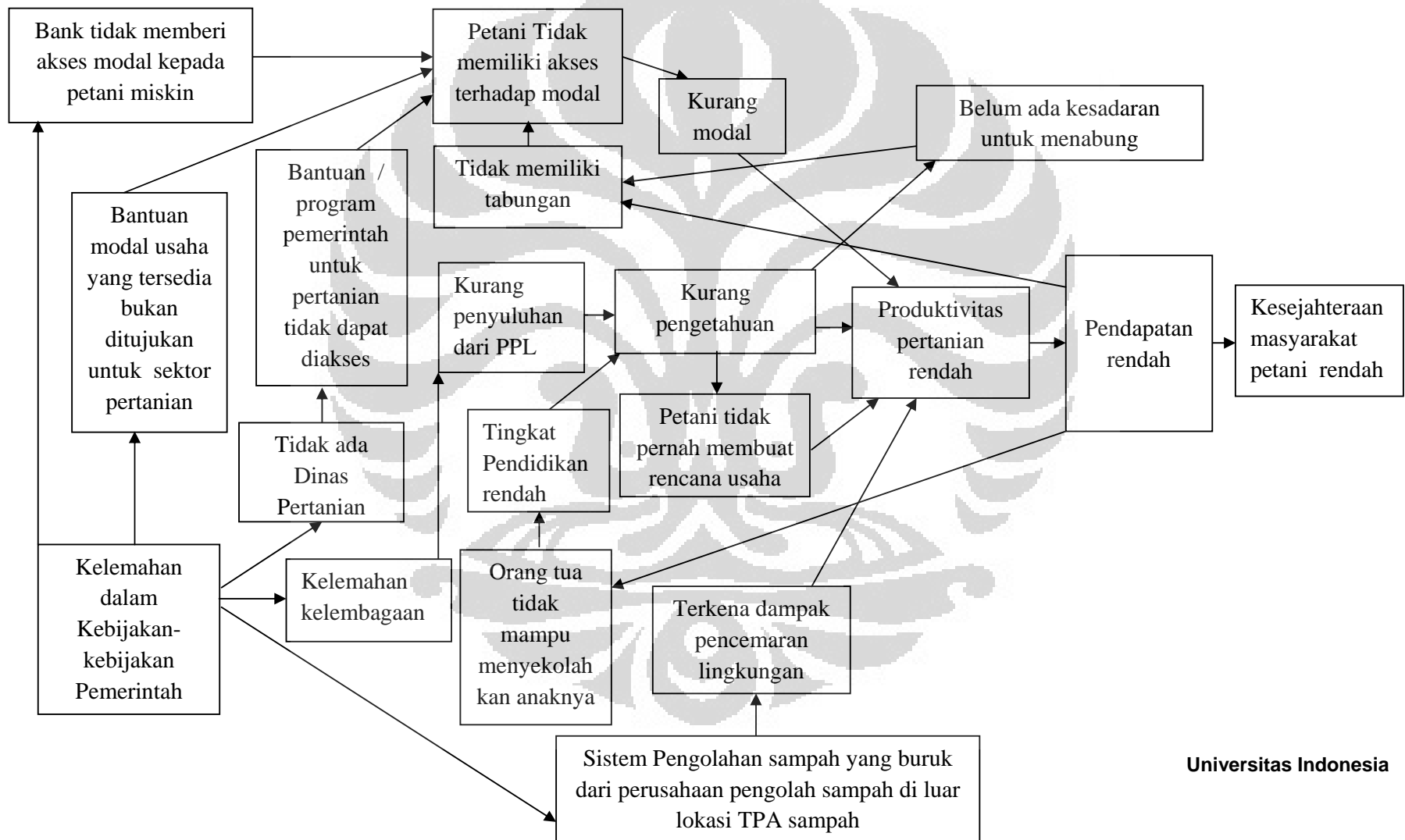
NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak pohon-pohon buah seperti rambutan dan melinjo</li> <li>- Lokasi wilayah yang strategis , relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan /pasar</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kota Bekasi belum memberi sanksi yang jelas terhadap perusahaan pengolah sampah di luar lokasi TPA yang menyebabkan pencemaran lingkungan</li> </ul>
3.	<b>Modal Fisik</b> <i>(physical capital)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan dan sarana transportasi memadai</li> <li>- Bangunan sekolah untuk pendidikan dasar sudah memadai</li> <li>- Sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas, klinik, MCK, air bersih sudah memadai</li> <li>- Sudah ada bangunan kantor yang memadai untuk lembaga Aparat Kelurahan, LPM, BKM, Karang Taruna, PKK</li> <li>- Masyarakat lokal umumnya masih memiliki asset berupa rumah dan tanah meski dalam luas yang terbatas</li> </ul>	Pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi prioritas utama dari masyarakat melebihi pembangunan SDM	Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi atas pembangunan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan tingginya arus migrasi ke wilayah ini , baik warga pendatang resmi maupun pemulung</li> </ul>

NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
4.	<b>Modal Finansial</b> ( <i>Financial Capital</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Dana pemberdayaan masyarakat yang besar dari kompensasi sampah yang dikelola LPM</li> <li>- Warga menerima dana kompensasi sampah dalam bentuk tunai Rp 200.000 setiap triwulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di masa lalu sering terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana pemberdayaan masyarakat oleh LPM</li> <li>- Warga tidak menggunakan dana tunai dari kompensasi untuk menabung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi penggunaan dana pemberdayaan masyarakat tidak ditentukan oleh Pemkot Bekasi tetapi diserahkan pada kesepakatan masyarakat</li> <li>- Terdapat Dana pinjaman bergulir dari proyek P2KP untuk masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemantauan atas penggunaan dana pemberdayaan masyarakat dari Instansi terkait di atasnya</li> <li>- Alokasi dana pemberdayaan masyarakat sangat tergantung dari hasil kesepakatan para pengurus LPM dan tokoh masyarakat yang belum tentu mencerminkan kebutuhan masyarakat</li> <li>- Anggapan masyarakat bahwa pinjaman modal uaha dari pemerintah tidak perlu dikembalikan.</li> </ul>
5.	<b>Modal Sosial Kemasyarakatan</b> ( <i>Social Capital</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dengan warga pendatang , baik yang tinggal di komplek perumahan maupun dengan pemulung pendatang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasa kebersamaan antar warga mulai lemah karena masyarakatnya mulai berorientasi pada materi</li> </ul>		

NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat tokoh-tokoh agama (ustad) yang cukup berpengaruh di masyarakat</li> <li>- Terdapat kelompok-kelompok pengajian yang masih mencerminkan adanya <i>bonding</i> yang kuat antar anggota masyarakat</li> <li>- Sudah memiliki lembaga-lembaga masyarakat seperti Kelurahan, LPM, BKM, Karang Taruna, Kelompok Tani ,PKK Dan pengurusnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga-lembaga yang ada belum optimal dalam menjalankan perannya</li> </ul>		
6.	<b>Peluang dan Tantangan sektor Pertanian</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pemerintah pusat (Departemen Pertanian) dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memajukan pertanian.</li> <li>- Pemasaran hasil pertanian sangat mudah karena telah wilayah ini lama dikenal sebagai sentra pertanian di Kota Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi tahun 2008 – 2028 tidak lagi mencantumkan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk pertanian.</li> <li>- Tidak ada Dinas Pertanian Kota Bekasi</li> </ul>

NO	ASPEK	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pertanian yang dapat menjadi model pemberdayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemungkinan Perluasan lahan pemukiman oleh pengembang dan Perluasan lahan TPA sampah</li> <li>- Pencemaran lingkungan</li> </ul>
7.	<b>Peluang dan tantangan Ekonomi di luar Sektor pertanian</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Bantargebang adalah daerah pengembangan industri</li> <li>- Terbukanya peluang kerja di bidang usaha pengolahan sampah karena keberadaan TPA</li> <li>- Sering dijadikan daerah sasaran program-program bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lowongan pekerjaan di sektor industri mempersyaratkan ketrampilan atau tingkat pendidikan tertentu, terutama setingkat SMU</li> </ul>

**Gambar 5.1. Diagram Tulang Ikan Pencarian Akar Permasalahan**



Universitas Indonesia

## DAFTAR REFERENSI

- Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal (1996), *Berbuat Bersama Berperan Setara*, Bandung, Driyamedia untuk KPDTNT.
- Adi, Isbandi Rukminto (2008), *Intervensi Komunitas , Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, PT Rajagrafindo Persada
- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat (2004), *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Bappenas – Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005), *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)*
- Giyarsih, Sri Rum (2001) , *Gejala Urban Sprawl sebagai Pemicu Proses Densifikasi Permukiman di Daerah Pinggiran Kota (urban fringe area) Kasus Pinggiran Kota Yogyakarta*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan teknik Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, vol. 12/1  
[http://acadstaff.ugm.ac.id/lecturer\\_cv.php?rand=MTMyMDkwMTQ3&uri=](http://acadstaff.ugm.ac.id/lecturer_cv.php?rand=MTMyMDkwMTQ3&uri=)
- Green, Paul G. and Anna Haines (2002) *Asset Building and Community Development*, California, Sage Publication
- Hikmat, Harry (2007) , *Marginalisasi Komunitas Lokal dalam Perspektif Kontingensi Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kota Bekasi)*,<http://perencanaan.depsos.go.id/index.php?item=ANA&mod=ref>
- Hasbullah, Jousairi (2006), *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, Jakarta : MR-United Press.
- Ikhsan, M. (2008) , *Roadmap Menuju Ketahanan Pangan ; Peran Strategis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*, bahan mata kuliah Kebijakan Ekonomi Indonesia di MPKP-UI
- Jhingan, M.L (2008) , *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, edisi keenambelas, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kecamatan Bantargebang dalam angka 2008, BPS Kota Bekasi 2008
- Kompas Cybermedia (2007) , *Kemiskinan dan Pengangguran, Tantangan bagi Walikota Bekasi*, 03 September 2007  
<http://202.146.5.33/ver1/Metropolitan/0709/03/191002.htm>



- Kompas (2009), *Kota Bekasi 12 Tahun, Masalah Kepadatan Penduduk Menghadang*, 16 Maret 2009  
<http://www.kompas.com/read/xml/2009/03/16/06484682/masalah.kepadatan>
- Kompas (2005). *Penyimpangan Dana Kompensasi Diselidiki* ,Sabtu, 03 Desember 2005 <http://www.kompas.com>
- Koran tempo (2004), *Ribuan Penderita TBC Baru Tak Tertangani* Kamis, 7 Oktober 2004 <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh>
- Kota Bekasi dalam angka 2007, BPS Kota Bekasi 2008
- Kota Bekasi dalam angka 2006, BPS Kota Bekasi 2007
- Kota Bekasi dalam angka 2005/2006, BPS Kota Bekasi 2006
- Kuncoro , Mudrajad (2006), *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Keempat, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Madina online (tanpa tahun), *ASDA II Pemkot Bekasi Dadang Hidayat: Akibat Pendatang Baru, Kemiskinan Kota Bekasi Terus Meningkat*,  
[http://www.madina-sk.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=775](http://www.madina-sk.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=775)
- Marzali, Amri (2005), *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Moleong, Lexy J (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 04 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2000-2010
- Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 04 tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi
- Poskota (2009), *Syukuran Adipura di Bekasi*, Chotim B . Jumat, 12 Juni 2009  
<http://www.poskota.co.id>,
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (2005), *Pedoman Teknis Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan*, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung (2005), *Teori Ekonomi Makro suatu pengantar edisi ketiga*, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI.
- Rahardjo , M Dawam (1987), *Mulai Berguru dari Rakyat , Sebuah pengantar dari buku Pembangunan Desa, Robert Chambers*, Jakarta, LP3ES.

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2008-2028, Bappeda Kota Bekasi
- Suharto, Edi (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001) , *Industrialisasi di Negara sedang Berkembang, Kasus Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- (2008), *Ekonomi Kerakyatan*, Kadin Indonesia & Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti,  
<http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2740-14042008.pdf>
- Tempointeraktif (2008), *Warga Laporkan Penyelewengan Dana Kompensasi Sampah*, <http://www.tempointeraktif.com> Selasa, 12 Februari 2008, berita yang sama dimuat di <http://www.republika.co.id> dan <http://www.pikiran-rakyat.com>
- Todaro, Michael P. and Stephen C Smith (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* , Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga
- Usman, Sunyoto (2008), *Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat*, Penerbit Pustaka Pelajar
- World Bank, *World Development Report 2008, Agriculture for Development*
- World Bank, INDOPOV (2006) , *Laporan Era Baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*.
- Yunus, Muhammad (2008), *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama

## LAMPIRAN 1

Tabel Perkembangan Jumlah dan Persentase keluarga miskin (pra sejahtera dan sejahtera I) di Kota Bekasi tahun 2000 s.d 2007

Tahun	Keluarga miskin			KS II, III dan III+	Total Keluarga	% Kel Miskin
	Pra KS	KS I	Jumlah			
2000	11.739	70.388	82.127	263.104	345.231	23,79
2001	13.278	66.127	79.405	269.513	348.918	22,76
2002	15.603	71.451	87.054	275.651	362.705	24,00
2003	16.141	73.983	90.124	297.367	387.491	23,26
2004	16.296	79.091	95.387	321.507	416.894	22,88
2005	19.031	81.718	100.749	331.505	432.254	23,31
2006	18.726	84.432	103.158	338.670	441.831	23,35
2007	20.448	72.995	93.443	345.481	438.924	21,29

*Sumber : Kota Bekasi dalam angka 2007, BPS Kota Bekasi( diolah dari data tahapan keluarga di Kota Bekasi)*

## LAMPIRAN 2

Tabel Perbandingan Hasil Rekapitulasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) hasil pendataan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dengan RTS hasil pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 menurut kecamatan di Kota Bekasi

No	Kecamatan	RTS PSE 2005	PPLS 2008		Perbandingan naik / (turun)
			RTS	ART	
1	Pondok Gede	3.604	3.016	10.084	(588)
2	Jati Sampurna	2.060	2.062	6.395	2
3	Pondok Melati	1.832	1.817	6.425	(15)
4	Jati Asih	3.425	3.358	11.808	(67)
5	Bantargebang	1.738	1.979	5.138	244
6	Mustikajaya	2.742	2.742	7.891	0
7	Bekasi Timur	4.585	4.515	17.830	(70)
8	Rawalumbu	3.130	3.237	10.798	107
9	Bekasi Selatan	2.992	1.994	7.480	(998)
10	Bekasi Barat	4.620	4.711	17.363	83
11	Medan Satria	2.376	2.993	10.390	617
12	Bekasi Utara	5.005	5.320	19.372	315
Jumlah		38.109	37.744	130.974	365

Sumber data : PPLS BPS Kota Bekasi tahun 2008

## LAMPIRAN 3

Tabel Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi

Jenis Penggunaan	Pola Penggunaan Lahan (1998)		Rencana Pemanfaatan Lahan (2000-2010)	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
<b>A. LAHAN TERBANGUN</b>	10.753,93	51,09	16.228,78	77,10
1. Perdagangan dan Jasa	311,53	1,48	736,72	3,50
2. Pemerintahan dan Bangunan Umum	105,25	0,50	195,11	0,93
3. Perumahan	9.758,32	46,36	11.299,00	53,68
4. Industri	397,83	1,89	631,47	3,00
5. Pendidikan	181,02	0,86	210,49	1,00
6. Jaringan Prasarana Perkotaan	-	-	3.157,35	15,00
<b>B. LAHAN TIDAK TERBANGUN</b>	10.295,07	48,91	4.820,22	22,90
1. Pertamanan	10,52	0,05	1.052,45	5,00
2. Lapangan Olah raga	73,67	0,35	210,49	1,00
3. Jalur Hijau	505,18	2,40	2.643,75	12,56
4. Pemakaman	111,56	0,53	282,06	1,34
5. Pertanian (sawah, tegalan, Kebun)	9.594,13	45,58	631,47	3,00
<b>KOTA BEKASI</b>	21.049,00	100,00	21.049,00	100,00

Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010

## LAMPIRAN 4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Bantargebang, Tahun  
2007

Kelompok Umur (dalam tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	3.240	2.584	5.824
5 – 9	4.200	4.080	8.280
10 – 14	4.320	4.624	8.944
15 – 19	5.760	5.576	11.336
20 – 24	4.560	2.448	7.008
25 – 29	2.520	3.400	5.920
30 – 34	1.920	3.536	5.456
35 – 39	4.320	5.576	9.896
40 – 44	2.880	2.584	5.464
45 – 49	2.520	2.040	4.560
50 – 54	1.920	816	2.738
55 – 59	360	272	632
60 – 64	240	408	648
65 – 69	480	272	752
70 – 74	240	272	512
75 +	120	136	256
Jumlah	39.600	38.624	78.224

*Sumber data : BPS Kota Bekasi , Kecamatan Bantargebang dalam Angka 2008*

( Catatan Penulis : terdapat perbedaan data dari BPS tentang jumlah penduduk kecamatan Bantargebang antara data jumlah penduduk berdasarkan pembagian per kelurahan dengan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur )

## LAMPIRAN 5

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Bantargebang,  
tahun 2007

	Kelurahan	Sektor Pekerjaan									Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ciketing Udik	623	209	249	23	875	999	728	38	410	4.154
2	Sumurbatu	529	102	76	-	457	355	97	7	333	1.956
3	Cikiwul	618	173	739	98	755	972	413	98	555	4.421
4	Bantar gebang	202	166	1854	407	747	1339	828	354	421	6.318
	Jumlah	1.972	650	2.918	528	2.834	3.665	2.066	497	1.719	16.849

Keterangan sektor pekerjaan

- 1 pertanian
- 2 pertambangan dan penggalian
- 3 industri
- 4 listrik, gas, air
- 5 konstruksi
- 6 perdagangan, hotel dan restoran
- 7 angkutan
- 8 lembaga keuangan
- 9 Jasa-jasa

## LAMPIRAN 6

Tabel Kalender musim tanaman pertanian di Kelurahan Sumurbatu

Jenis Tanaman	Bulan / Tahapan penanaman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Singkong	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen / jual	V											
Padi darat	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen / jual			V					V				
Padi Sawah	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen / jual	V					V						
Kacang Panjang	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen / jual		V				V						
Jagung	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen / jual		V				V						
Cabe	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen /jual (cabe yang dipanen dan dijual pada tahun ini adalah cabe yang ditanam tahun lalu)										V		
Sayur mayur	- Tanam - Rawat/Tunggu Hasil - Panen / jual	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beternak bebek	Pemeliharaan sepanjang tahun, mengambil hasil berupa telur bebek setiap hari selama 9 bulan, 3 bulan bebek tidak bertelur	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Memelihara Ikan lele	Memelihara lele dikerjakan sepanjang tahun dan bisa terus menghasilkan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Menanam tanaman hias	Dilakukan sepanjang tahun, dan memiliki pasar baik di tingkat lokal maupun untuk orientasi ekspor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V



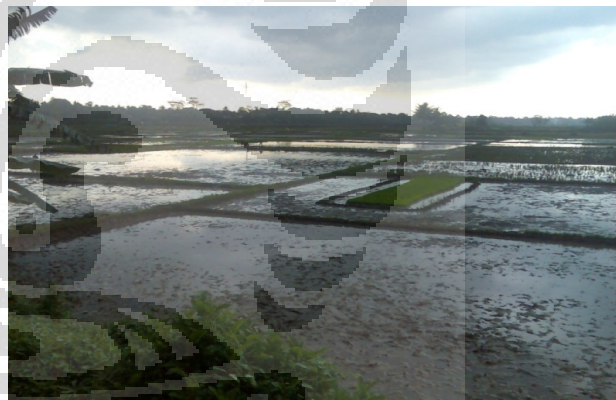
FOTO-FOTO LOKASI PENELITIAN



Foto Keramat Sumurbatu, yang menjadi asal muasal nama Desa Sumurbatu

Lokasi di sekitar Keramat yang masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian

AREAL PERSAWAHAN YANG LUAS DI KELURAHAN SUMURBATU



Lahan dengan peruntukan tanah pemakaman umum masih dimanfaatkan warga petani sebagai lahan sawah produktif



BEBERAPA BIDANG USAHA TANI YANG DILAKUKAN WARGA SUMURBATU



Beternak bebek



Bertanam singkong dan lengkuas



Budidaya Tanaman Hias



Menanam Sayuran (cai sim)



Pembibitan benih ikan lele



Memelihara kambing

Foto Air sungai yang tercemar limbah pengolahan sampah terpaksa digunakan untuk mengairi sawah pada saat tidak ada hujan



**FOCUS GROUP DISCUSSION KELOMPOK TANI SUBUR MAKMUR**



Foto Diskusi sejarah desa



Foto Pembuatan diagram venn kelembagaan



Hasil Pemetaan desa



Foto air minum dari air tanah di RW 02, masih layak minum (tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa)



Foto Usaha alternatif kelompok tani memproduksi obat herbal sari mengkudu

## SARANA DAN PRASARANA FISIK DI KELURAHAN SUMURBATU



Foto bangunan SDN 02 Sumurbatu



Foto kondisi jalan di depan SDN 02 Sumurbatu



Foto bangunan SDN 01 Sumurbatu

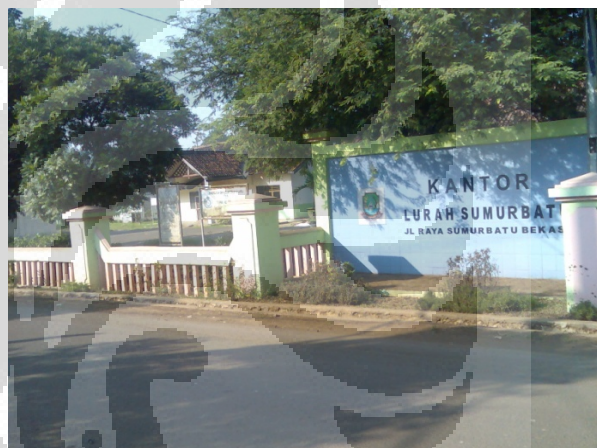


Foto Kantor Lurah Sumurbatu



Foto Komplek kantor Lurah, kantor LPM, Pos Polisi, Puskesmas, musholla seluas 3,5 hektar



Foto persimpangan jalan di depan kantor lurah Sumurbatu



Kolam ikan sekaligus jamban keluarga



Sumber air bersih warga miskin



Foto rumah warga miskin petani berlantai tanah berdingding bamboo



Foto rumah warga miskin lansia penerima BLT dan raskin



Foto dapur warga pemulung di RW 05 sekaligus tempat penumpukan sampah hasil memulung, aroma sampah sangat terasa

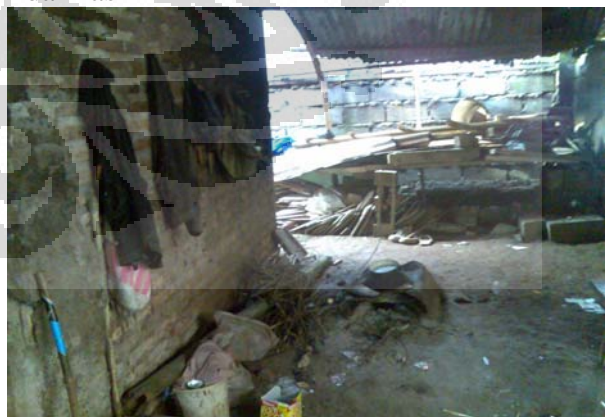


Foto dapur warga pemulung di RT 03/ RW01 memasak dengan kayu bakar. Kompor dan tabung gas dari pemerintah telah terjual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari



Foto Gubuk-gubuk liar pemulung musiman di pinggir jalan raya sumur batu diwilayah RW 01



Warga miskin pemulung di RT 03/RW 01 menumpuk hasil memulung di samping rumah sebelum disetor ke pengepul



Foto Rumah warga lokal di RW 03 yang telah menjadi pengepul, bangunan rumah permanen, tetapi menyatu dengan sampah hasil pemilahan sebelum disetor kepada “Bos” untuk kemudian dijual ke pabrik-pabrik



Foto mesin pencacah plastik bantuan dari pemerintah (depnaker) kepada kelompok pemulung yang telah mendapat pelatihan , belum dapat dimanfaatkan

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIKEMBANGKAN OLEH SEKOLAH ALAM TUNAS MULIA



Foto Sekolah informal untuk anak-anak dhuafa yang putus sekolah



Foto suasana belajar di Tunas Mulia (dokumen Portal Infaq)



Foto Usaha penggemukan sapi potong



Foto Peternakan bebek dengan pakan dari olahan sampah restoran





Foto keluarga pemulung dengan jumlah anak 5 orang, termasuk 2 balita yang menderita kurang gizi

